

DIENE MANISASI ANAK MARGINAL

Keberhasilan Pengelompokan dan Pemberdayaan

Disusun oleh
Jaya Kusuma

Persembahkan
Untuk Keluarga



© 2000 by Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) - Yogyakarta Institute

DEHUMANISASI
ANAK MARJINAL
Berbagai Pengalaman Pemberdayaan

DEHUMANISASI ANAK MARJINAL

Berbagai Pengalaman Pemberdayaan

**Pengantar
Juni Thamrin**

**Penyunting
Surya Mulandar**

Diterbitkan Atas Kerja Sama Yayasan AKATIGA - Gugus Analisis

DEHUMANISASI ANAK MARJINAL

Berbagai Pengalaman Pemberdayaan

Pengantar

Juni Thamrin

Penyunting

Surya Mulandar

Penulis

Indrasari Tjandraningsih

Wasis Sasmito

Rostymaline Munthe

Otoviana sp

Anny Simandjuntak

MT. Heru P

Azas Tigor

Cecep Junaidi

Nusa Putra

Sarah Whitmore

Tata Sudrajat

Perancang Kulit

Budiman Pagarnegara

Gambar Kulit

Jusac / ESC Studio

Diterbitkan pertama kali oleh Yayasan AKATIGA dan
Yayasan Gugus Analisis, Juni 1996

© Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT):

Dehumanisasi anak marjinal: berbagai pengalaman pemberdayaan/
Penyunting, Surya Mulandar; Pengantar, Juni Thamrin. -- Bandung:
Yayasan Akatiga, 1996.
xi, 185 hlm.; 23 cm

Diterbitkan atas kerja sama dengan Gugus Analisis
ISBN 979-8589-20-3

1. Anak - Tenaga kerja

I. Mulandar, Surya

331.31

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan ekspresi dari berbagai pengalaman pendampingan dan pengamatan intensif teman-teman yang tergabung dalam berbagai organisasi nonpemerintah (Ornop/NGOs) di Indonesia. Secara lebih spesifik, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kepedulian dan komitmen kuat untuk membantu upaya pemberdayaan (**empowerment**) -- bukan pengaturan (**regulation**) apalagi penghapusan (**abolishment**) -- buruh anak dan anak-anak jalanan.

Buruh anak dan anak-anak jalanan -- yang menghadapi situasi "ter atau dipaksa" bekerja ataupun yang "ter atau dipaksa" bertahan hidup di jalan sebagai rumah utamanya -- merupakan dua kategori sosial yang hadir sebagai realitas hidup di tengah-tengah kita. Keberadaan mereka seringkali tidak terlalu mendapat perhatian banyak orang, karena telah dianggap sebagai fenomena sehari-hari. Kita tentu dengan mudah dapat menemukan anak-anak yang berjualan makanan dan minuman, koran, tukang semir, pengelap mobil, pemulung di perempatan lampu lalu lintas jalan raya atau di sekitar pasar, stasiun, terminal maupun di berbagai pusat kegiatan ekonomi pinggiran. Bahkan di sekitar kawasan industri Tangerang atau Bandung Raya, pada jam-jam istirahat makan siang, terlihat banyak buruh anak berbaur dengan buruh dewasa sedang menikmati jajanan murah pinggir jalan.

Dari hari ke hari situasi dan gambaran seperti ini tidak berkurang, justru cenderung bertambah. Menurut catatan Biro Pusat Statistik, pada 1990 ada 2,68 juta anak usia antara 10-14 yang secara prematur memasuki dunia kerja upahan. Sekalipun pada 1994, catatan BPS menunjukkan angka yang menurun, yakni "hanya" tinggal 1,99 juta orang. Akan tetapi menurut catatan lain, jumlah buruh anak di sektor informal (termasuk anak jalanan) semakin membengkak. Fenomena apakah ini, apakah hal ini merupakan residu dari proses pembangunan?

Hal yang menarik untuk dicermati adalah keberadaan mereka yang ternyata bukan merupakan dampak ikutan dari proses pembangunan. Jumlah mereka semakin banyak manakala intensitas pembangunan semakin tinggi. Mereka bukan orang-orang yang terpaksa tertinggal di landasan pacu, karena *pesawat pembangunan* tidak sempat menampung mereka. Mereka adalah sekumpulan manusia yang memang harus ditinggal, mereka menjadi material yang digunakan untuk proses pembuatan landasan pacu. Jika tidak demikian, maka landasan pacu ataupun roda perekonomian formal tidak dapat dibangun dan tidak dapat berputar menghasilkan surplus. Kondisi yang sama terjadi juga pada awal proses industrialisasi di Eropa, yang sampai saat ini fenomena buruh anak di sana tidak dapat dihilangkan secara tuntas. Gambaran yang lebih mengarah pada sistem perbudakan buruh anak terjadi di pabrik-pabrik pembuatan karpet di India.

Dalam derajat yang agak berbeda, berbagai kisah yang terekam dari berbagai penelitian tentang buruh anak dan anak-anak dalam buku ini, kurang lebih melukiskan gambaran seperti di atas. Banyak anak yang memasuki dunia kerja upahan secara prematur ini, justru ditempatkan di bagian berbahaya dan menangani material beracun. Mengapa demikian? Karena mereka adalah kelompok tenaga kerja yang paling lemah, tidak banyak protes, dan tidak terlindungi secara hukum ataupun organisasi. Mereka yang bekerja di pabrik obat nyamuk, misalnya, bekerja dengan bahan-bahan kimia pembuatan obat nyamuk tanpa perlindungan yang memadai. Mereka sering mengalami gangguan kesehatan seperti bronchitis, infeksi mata, dan kulit. Apabila sehari tidak masuk karena sakit, mereka harus merelakan upahnya dipotong. Secara umum, kelompok yang dimanfaatkan untuk kerja-kerja seperti ini adalah buruh anak perempuan. Kategori buruh anak perempuan, merupakan kategori terlemah yang mengalami proses eksploitasi ganda, sebagai *buruh, anak-anak, dan perempuan*.

Kisah yang sama terjadi pada anak-anak jalanan, yang setiap hari harus berjuang hidup di jalan. Mereka menjadi salah satu ujung tombak pemasaran produk pabrik-pabrik besar, dengan tingkat keselamatan kerja yang sangat minim. Pada malam hari mereka harus puas tidur di emperan toko, dengan berbagai risiko yang mengancam keselamatannya. Dalam kondisi apapun mereka harus senantiasa waspada dan siaga, terutama dari ancaman petugas penertiban kota, preman, dan ancaman yang datang dari orang dewasa sesamanya.

Kisah yang lebih dramatis ditunjukkan oleh kasus anak-anak yang diculik dan dipaksa bekerja di *jermal* -- tempat penangkapan ikan statis lepas pantai -- di sepanjang pantai timur Sumatera Utara. Situasi mirip perbudakan terjadi di tengah-tengah gelombang lautan. Anak-anak yang terperangkap bekerja di atas jermal, tidak dapat lari, karena kebanyakan dari mereka justru tidak dapat berenang. Mereka hidup berbekal makanan yang sangat minim, dengan harapan akan mendapat makanan tambahan dari ikan sisa hasil tangkapan. Panas terik matahari dan deru hujan menjadi santapan rutin sehari-hari. Bahkan pada malam hari, tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban sodomi yang dilakukan oleh seniornya. Selama tiga bulan mereka tidak dapat berhubungan dengan siapapun di darat. Setelah tiga bulan, mereka akan digilir ke lokasi jermal yang lain atau "dikembalikan" ke darat jika kondisinya sudah tidak menguntungkan pemilik jermal.

Secara umum mereka merupakan bagian dari "korban" struktural yang memberikan kontribusi atas suksesnya program-program pembangunan. Keberadaan mereka berjalan bersama dengan proses pemiskinan massal yang terjadi pada sebagian masyarakat di pedesaan dan perkotaan. Hampir seluruh buruh anak dan anak jalanan merupakan produk kemiskinan. Latar belakang keluarganya mempunyai problem serius, kehilangan akses sumber daya utama, terutama tanah dan usaha kecil yang mandiri.

Menurut beberapa hasil penelitian, buruh anak dan anak-anak jalanan tidak berminat untuk meneruskan dan atau memasuki dunia sekolah. Bagi mereka sekolah lebih merupakan beban dan tidak mempunyai arti signifikan terhadap penambahan upah yang dapat mereka raih. Sekolah juga merupakan "kemewahan" yang tidak dapat mereka jangkau, sekalipun gratis. Dalam banyak situasi, sekolah dasar (SD) yang merupakan program wajib belajar di pedesaan, tetap memerlukan biaya, untuk seragam sekolah, buku, dan berbagai sumbangan lainnya. Tidak mengherankan jika beberapa waktu yang lalu, beberapa surat kabar memberitakan banyak SD Inpres di pedesaan terpaksa ditutup karena tidak ada murid. Menurut statistik yang dibuat UNICEF, tergambar bahwa 90% anak-anak Indonesia telah masuk SD, dari jumlah tersebut hanya 79% (pada 1990) yang dapat menyelesaikan pendidikan SD dan hanya 55% dari jumlah yang lulus SD yang melanjutkan pada tingkat selanjutnya.

Secara juridis formal pemerintah tidak "mengakui" keberadaan fenomena buruh anak dan anak-anak jalanan. Pihak pemerintah sangat hati-hati memilih terminologi untuk menyinggung masalah ini, yaitu dengan menyatakan *anak-anak yang terpaksa bekerja*, untuk sedikit memberikan pembatasan penggunaan anak-anak sebagai tenaga kerja formal. Padahal buruh anak menghadapi persoalan cesar, yaitu eksploitasi dan dehumanisasi. Ketiadaan perlindungan kerja yang menyeluruh serta ketiadaan organisasi yang dapat memperjuangkan hak-hak buruh anak, merupakan konsekuensi dari ketidakjelasan sikap pemerintah terhadap masalah ini. Hal tersebut membuat situasi kerja yang dialami buruh anak semakin buruk.

Buku yang berada di tangan Anda ini, merupakan hasil dari sebuah loka karya nasional yang diikuti khusus oleh kalangan organisasi nonpemerintah yang mempunyai visi kearah pemberdayaan buruh anak dan anak-anak jalanan. Lokal karya tersebut diorganisir oleh Gugus Analisis Jakarta dan Yayasan AKATIGA, Pusat Analisis Sosial Bandung. Beberapa sumbangan tulisan terseleksi yang dibawa partisipan loka karya, dapat Anda nikmati dalam buku ini. Semoga tulisan singkat berbagai pengalaman pemberdayaan buruh anak dan anak-anak jalanan ini dapat membangkitkan kepedulian kita semua untuk turut

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama anak-anak sebagai penerus masa depan peradaban umat manusia.

Terima kasih.

Juni Thamrin

Direktur Eksekutif Pusat Analisis Sosial **AKATIGA**

Daftar Isi

Pengantar	v
<i>Juni Thamrin</i>	
Daftar Isi	xi
• Pemberdayaan Buruh Anak	
Beberapa Catatan Pemberdayaan Buruh Anak	1
<i>Indrasari Tjandraningsih</i>	
Menuju Pemberdayaan Buruh Anak	11
<i>Wasis Sasmito</i>	
Perlindungan dan Pemberdayaan Buruh Anak	29
<i>Rostymaline Munthe</i>	
Perundang-Undangan yang Tegas Dalam Perlindungan Buruh Anak	41
<i>Oktoviana sp</i>	
Pendampingan Pekerja Anak Perempuan	57
<i>Anny Simandjuntak</i>	
Model Pelatihan Prakejuruan Pekerja Anak	67
<i>MT. Heru P</i>	
• Pemberdayaan Anak Marjinal Perkotaan	
Advokasi Atas Penindasan dan Pemiskinan Anak-Anak Miskin Perkotaan	77
<i>Azas Tigor</i>	
Perlindungan Anak Marjinal dari Ancaman HIV/AIDS	97
<i>Cecep Junaidi</i>	
Potret Buram Anak Jalanan	111
<i>Nusa Putra</i>	
Street Literacy, Upaya Perubahan Nasib Anak Jalanan?	131
<i>Sarah Whitmore</i>	
Anak Jalanan: Dari Masalah Sehari-Hari Sampai Kebijakan	147
<i>Tata Sudrajat</i>	
Rekaman Proses	167
<i>Surya Mulandar</i>	
Catatan Penutup	181

Beberapa Catatan Pemberdayaan Buruh Anak

Indrasari Tjandraningsih
AKATIGA, Bandung

Mengapa Pemberdayaan?

Marginal, eksploitatif dan tidak bermasa depan adalah sifat-sifat yang sangat tepat untuk menunjukkan kondisi buruh anak-anak di pabrik. Marginal karena mereka melakukan jenis-jenis pekerjaan berupah rendah, eksploitatif karena bekerja hingga belasan jam sehari tanpa imbalan yang memadai, dan tidak bermasa depan karena pekerjaan mereka tidak membawa prospek apapun.

Kondisi anak-anak semacam itu sayangnya belum cukup untuk membuat orang menolehkan kepala dan memberikan kepedulian yang memadai. Sebaliknya buruh anak-anak bahkan sering dianggap tidak ada. Situasi itu jelas merupakan situasi yang tidak adil, karena keberadaan mereka bukanlah merupakan keinginan mereka sendiri dan buruh anak adalah korban perilaku orang dewasa.

Pertama-tama orang dewasa sebagai pengambil kebijakan menentukan arah dan strategi pembangunan yang berwajah industri dan sangat kapitalistik. Strategi pembangunan semacam itu kemudian memunculkan orang-orang dewasa lain yang ikut serta memanfaatkan buruh anak demi kelangsungan hidup mereka, yakni orang dewasa sebagai majikan atau mandor yang mengoptimalkan penggunaan tenaga anak demi meraih keuntungan.

Orang dewasa sebagai 'calo' tenaga kerja yang memperjualbelikan tenaga anak sebagai matapencaharian, bahkan tidak jarang pula orang-orang dewasa sebagai orang tua mengerahkan tenaga anaknya untuk menopang kelangsungan rumah tangga

dan keluarga mereka. Dalam pola relasinya dengan orang-orang dewasa tersebut, buruh anak telah mengalami eksploitasi berganda. Kondisi yang serba tidak menguntungkan buruh anak-anak tersebut, menjadi dasar untuk mengambil sikap yang pro pemberdayaan.

Alasan lain untuk sikap tersebut adalah pergeseran pandangan dan kebijakan yang menyangkut buruh dan pekerja anak yang telah terjadi sejak beberapa waktu lalu. Sebelumnya persoalan buruh anak hanya dilihat dan ditangani melalui aspek hukum belaka dengan pemecahan sederhana yakni melarang anak bekerja. Munculnya pandangan baru yang meletakkan keberadaan buruh anak pada akar persoalannya, yakni masalah kemiskinan — dan pemiskinan — sebagai dampak pembangunan membawa pikiran baru mengenai cara mengatasi masalah tersebut.

Buruh anak dan pekerja anak pada umumnya tidak selalu perlu dilarang, melainkan justru perlu perlindungan agar selama melakukan pekerjaannya, hak-hak mereka sebagai anak tetap terjamin. Cara melihat persoalan keberadaan buruh anak seperti di atas mewujud dalam pendekatan yang mengkonsentrasikan diri pada upaya memperkenalkan langkah-langkah perlindungan yang memungkinkan anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara normal dan “...melihat pekerjaan anak-anak secara prinsip pada dampaknya, baik positif maupun negatif, terhadap kesejahteraan, pertumbuhan dan perkembangan mereka.” (Boyden & Rialp 1995). Pendekatan itu juga merumuskan fokus perhatian persoalan buruh anak pada anak-anak yang melakukan jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya (*hazardous*) dan eksploitatif.

Pandangan baru tersebut menggeser ide-ide *abolisi* atau penghapusan, dengan menawarkan alternatif yang lebih realistis bagi buruh anak di negara-negara sedang berkembang. Di dalam alternatif baru itulah pendekatan yang bersifat memberdayakan buruh anak muncul.

Pemberdayaan

Pemberdayaan mempunyai makna harfiah membuat (seseorang) berdaya. Istilah lain untuk pemberdayaan adalah penguatan (*empowerment*). Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan, dalam arti mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak asasinya. Di dalam pemberdayaan terkandung unsur pengakuan dan penguatan posisi seseorang melalui penegasan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki dalam seluruh tatanan kehidupan. Di dalam proses pemberdayaan diusahakan agar orang berani menyuarakan dan memperjuangkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.

Pendekatan yang bersifat memberdayakan adalah pendekatan yang paling tepat dalam mengatasi persoalan buruh anak-anak, karena kenyataan menunjukkan bahwa mereka berada dalam kondisi yang tidak berdaya. Buruh anak, sebagai kelompok subordinat dari modal dan orang dewasa, sangat tidak berdaya menghadapi perilaku dominasi modal dan orang dewasa yang cenderung mengarah pada penyalahgunaan dan eksploitasi. Mereka tidak mengenal hak sebagai buruh maupun sebagai anak, tetapi sangat akrab dengan segala kewajiban yang dibebankan ke pundak mereka. Buruh anak juga tidak mengenal protes atau sekedar mempertanyakan jumlah hari dan jam kerja, beban pekerjaan, upah yang kerap berubah jumlahnya dan lain-lain hal yang berkaitan dengan kondisi kerja.

Buruh anak adalah kelompok buruh yang sangat ideal bagi majikan, karena sangat patuh terhadap apapun yang diperintahkan oleh majikan, mandor atau sesama buruh dewasa. Buruh anak juga sangat naif terhadap segala perlakuan yang menyangkut pelanggaran hak, karena mereka tidak pernah mengetahui bahwa mereka mempunyai hak sebagai buruh. Untuk mencegah buruh anak dari perlakuan yang mengingkari hak-hak mereka dan dari situasi yang eksploitatif itulah yang menjadi salah satu inti kegiatan pemberdayaan.

Tujuan dari pendampingan yang bersifat memberdayakan ini sebenarnya lebih luas dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan atau hak buruh anak yang terampas oleh dunia kerja, namun juga ingin menanamkan penguasaan hak dan jaminan seorang buruh serta memberi peluang agar potensi setiap orang dapat teridentifikasi dan kemudian dikembangkan. Pemberdayaan buruh anak tidak bertujuan untuk 'mengalihprofesikan' anak, akan tetapi lebih pada maksud untuk membuat buruh anak memahami hak-haknya. Dengan demikian dapat terhindar dari kemungkinan eksploitasi yang cenderung terjadi karena memanfaatkan keluguan mereka.

Beberapa NGO telah mencoba menerapkan kegiatan pendampingan yang bersifat memberdayakan terhadap buruh anak yang bekerja di pabrik. Sebuah studi yang mencoba mengamati kegiatan tersebut menghasilkan beberapa catatan menarik mengenai seluk-beluk upaya pemberdayaan tersebut¹ dan akan diulas kembali dalam tulisan ini.

Pemberdayaan Pekerja Anak

Kesimpulan dari hasil studi di atas memperlihatkan bahwa kunci kegiatan yang bersifat memberdayakan sebenarnya sederhana tetapi tidak mudah dilakukan, apalagi bila dalam hal ini pelaku pemberdayaan adalah orang-orang dewasa. **Per-teman-an**, **kesetaraan**, dan **partisipasi** merupakan tiga kondisi yang perlu ada agar terbangun atau terlaksana kegiatan yang bersifat memberdayakan.

Ketiga kondisi tersebut mensyaratkan 'kerendahan hati' orang dewasa untuk memandang dan memperlakukan buruh anak-anak sebagai individu manusia yang mempunyai kemampuan mendefinisikan keinginan dan kebutuhannya, mempunyai kemampuan mengartikulasikan keadaan dan kondisi kehidupannya, serta memiliki hak untuk menentukan pilihan dan mengam-bil keputusan bagi dirinya. Keadaan semacam itu se-

¹ Lihat "Pemberdayaan Pekerja Anak: Studi mengenai pendampingan pekerja anak" oleh penulis, April 1995.

cara umum bukan merupakan sifat anak-anak sebagaimana yang tertanam di dalam benak orang dewasa, tetapi bagi buruh anak yang mau tidak mau dalam lingkungan kerjanya telah memasuki dunia orang dewasa, kondisi tersebut sangat relevan.

Harus diakui, secara umum dunia kerja bagi anak-anak telah membuka pintu untuk melangkah ke dalam sebagian kehidupan orang dewasa dan pengalaman empiriks sebagian dari mereka, telah merubah cara hidup yang meniru orang dewasa. Konsekuensi dari keadaan tersebut tentu memberikan pengakuan terhadap kemampuan mereka untuk menentukan apa yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Prinsip **kesetaraan** sangat penting dalam upaya memberdayakan, karena dalam prinsip ini posisi anak-anak yang subordinat terhadap orang dewasa tidak akan muncul. Pelaksanaan prinsip ini telah dengan sendirinya membebaskan buruh anak dari dominasi orang dewasa yang selama ini dialami sehari-hari, utamanya dalam dunia kerja. Dengan menganggap bahwa buruh anak sebagai kawan yang setara ternyata mampu menumbuhkan kepercayaan diri dan kepercayaan terhadap para pendamping. Keadaan semacam itu sudah merupakan keuntungan tersendiri untuk bekerja sama dengan kelompok sasaran, sehingga lebih memudahkan terlaksananya kegiatan.

Pengalaman empirik membuktikan bahwa membangun kepercayaan di kalangan buruh anak bukan pekerjaan yang sederhana. Mekanisme dan kondisi kerja di pabrik telah membentuk sikap dan perilaku buruh anak yang bersifat pasif, patuh, takut, yang pada gilirannya menimbulkan sikap curiga dan waspada terhadap orang dewasa dan orang asing. Sifat-sifat tersebut sangat berlawanan dengan sifat anak jalanan yang cenderung terbuka, spontan, berani, kreatif dan kritis di mana sifat itu sangat penting untuk upaya *survival* mereka di jalanan. Sifat yang berbeda mengandung konsekuensi perbedaan cara pendekatan dan pendampingan yang berbeda pula. Artinya, perbedaan sifat atau karakteristik anak marjinal menentukan pilihan metode pendampingan.

Pendekatan yang bercorak pertemanan merupakan perwujudan prinsip kesetaraan dan terbukti efektif untuk pelaksanaan kegiatan dalam arti bahwa anak-anak sebagai kelompok sasaran antusias melibatkan diri di dalamnya. Pendekatan ini dilengkapi dengan pendekatan partisipatif yang membuka peluang bagi kelompok sasaran untuk menentukan sendiri kegiatan yang akan dilakukan dan dikelola bersama.

Model pendekatan seperti itu sebenarnya merupakan hasil dari proses interaksi dan belajar bersama-sama kelompok sasaran. Ketika kegiatan dimulai, pendekatan yang diambil adalah pendekatan yang lebih bersifat *top-down* seperti pada umumnya kegiatan pendampingan yang banyak dilakukan. Ciri *top-down* paling tidak mewujud dalam perumusan kegiatan yang disusun sendiri oleh pendamping dengan pertimbangan-pertimbangan yang dipandang penting dan bermanfaat bagi kelompok sasaran dari sisi pandang pendamping. Dalam pelaksanaannya, pendekatan itu ternyata kurang tepat sasaran. Beberapa kegiatan yang semula dianggap bermanfaat bagi buruh anak ternyata justru ditolak oleh anak-anak sendiri karena mereka bahkan tidak merasakan kemanfaatan kegiatan tersebut. Perlu dicatat di sini bahwa berbagai jenis kegiatan yang diciptakan berangkat dari asumsi bahwa kegiatan tersebut dapat digunakan untuk merangsang dan membangun motivasi dan kesadaran buruh anak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keberdayaan mereka.

Sebagai contoh, berbagai kegiatan ketrampilan sebagai *entry point* pendampingan, seperti menjahit, membuat kerajinan tangan atau kegiatan lain yang serupa tidak diminati oleh anak-anak. Beberapa hal yang menjadi sebab penolakan itu adalah *pertama*, karena kegiatan tersebut dipandang sebagai tambahan kerja yang sudah kenyang dihadapi dari hari ke hari. *Kedua* kemanfaatan penguasaan keterampilan tersebut tidak dirasakan relevansinya dengan pekerjaan sehari-hari. Beberapa kegiatan pendampingan pekerja anak yang lain yang juga memberikan kegiatan keterampilan menyablon, kursus elektronik, mengetik dan sebagainya yang dilaksanakan oleh NGO lain di luar studi ini juga masih harus diuji tingkat kemanfaatan dan penerimaannya di kalangan kelompok sasaran.

Sebaliknya kegiatan yang memungkinkan anak-anak untuk dapat mengekspresikan diri justru mendapat sambutan yang positif paling tidak dari sisi antusiasme mereka mengikutinya. Kegiatan yang berbau kesenian seperti melukis, menulis esai dan puisi mengenai kehidupan sehari-hari atau sekedar melampiaskan 'uneg-uneg' atau isi hati terhadap keadaan keseharian, berteater, atau yang bersifat *brainstorming* seperti diskusi atau tanya jawab mengenai pengalaman kerja, ternyata lebih diminati. Dari sini sebenarnya telah dapat diidentifikasi salah satu kebutuhan konkret dan utama pada buruh anak yakni kebutuhan untuk mengekspresikan diri dan kebutuhan untuk didengar; keduanya adalah kebutuhan yang tidak akan pernah dipenuhi dalam batas-batas tembok pabrik. Kedua kebutuhan dasar ini apabila terpenuhi telah dengan sendirinya memberikan pengakuan terhadap eksistensi mereka.

Jenis-jenis kegiatan yang bernafas kesenian dan berunsur ekspresi semacam itu telah diterapkan oleh beberapa NGO pendamping anak-anak jalanan, bahkan menunjukkan kecenderungan akan terus dikembangkan karena sudah dapat diidentifikasi kemanfaatannya untuk mengukur tingkat keberdayaan kelompok sasaran, paling tidak dari daya kritis yang terus berkembang².

Pengalaman yang diperoleh mengenai reaksi dan preferensi kelompok sasaran terhadap jenis kegiatan telah dijadikan kesempatan oleh para pendamping untuk mengevaluasi pilihan dan cara penentuan kegiatan. Untuk selanjutnya jenis-jenis kegiatan dan kelancaran pelaksanaannya banyak ditentukan sendiri oleh kelompok sasaran atas dasar pertimbangan bahwa kegiatan itu memang demi keuntungan mereka. Tahap lebih lanjut, pengelolaan kegiatan juga diserahkan kepada kelompok sasaran dengan pendamping hanya berperan sebagai fasilitator. Langkah-langkah tersebut mencirikan prinsip kegiatan pemberdayaan yang menjauhkan kelompok sasaran dari situasi ketergantungan pada pendamping.

² Sebagai contoh lihat JEJAL, Bakal atau Niat.

Catatan Penutup

Pemberdayaan anak-anak marjinal telah menjadi agenda bagi banyak *NGO* yang memfokuskan perhatiannya terhadap kelompok itu. Sebagai suatu langkah yang positif agenda tersebut harus dipertahankan dan disempurnakan. Tetapi harus diakui bahwa masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan ada hal-hal yang perlu diantisipasi guna mendukung efektivitas kegiatan.

Persoalan buruh anak dan anak marjinal adalah persoalan besar yang tidak dapat ditangani oleh *NGO* saja. Pemberdayaan yang dilakukan oleh *NGO* hanya merupakan bagian kecil dari usaha besar menyelamatkan anak-anak marjinal dari kondisi yang lebih buruk. Penanganan persoalan mereka menjadi tanggung-jawab komunitas sekitar, masyarakat luas dan pemerintah. Mengingat derajat persoalan buruh anak semacam itu, idealnya diperlukan upaya terpadu dari pihak-pihak tersebut di atas. Melihat keterlibatan berbagai aktor dalam persoalan buruh anak, harus dilaksanakan bermacam-macam kegiatan dengan kelompok sasaran yang berbeda-beda. Pemberdayaan buruh anak perlu diimbangi dengan upaya penyadaran pada kalangan pemerintah dan kalangan masyarakat mengenai persoalan tersebut.

Kompleksitas usaha pemberdayaan yang mencakup kelompok sasaran lain (keluarga, komunitas lokal, pihak majikan, pemerintah dan masyarakat umum) selain buruh anak tidak mungkin dilakukan oleh satu-dua *NGO* saja. Sumber daya internal masing-masing *NGO* yang terbatas mensyaratkan konsentrasi pilihan kegiatan yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan tiap-tiap lembaga atau menggalang kerjasama semata demi keuntungan kelompok sasaran. Bentuk-bentuk kerjasama yang perlu dipikirkan adalah kerjasama pada tingkat intern dengan sesama *NGO* dan kerjasama pada tingkat ekstern dengan pemerintah dan kelompok masyarakat lain di luar *NGO*, serta lembaga dana, atau kombinasi di antara keduanya. Kerjasama

dapat pula dilakukan dalam bentuk pembagian kerja di antara pihak-pihak yang bekerja sama dalam satu kerangka pemberdayaan yang disusun bersama.

Menuju Pemberdayaan Buruh Anak Di Warengan dan Gudang Tembakau

Pemberdayaan Buruh Anak di Perkebunan Tembakau

Wasis Sasmito
YPSM, Jember

Pengantar

Keberadaan anak-anak yang terpaksa bekerja maupun dipaksa bekerja di wilayah pedesaan sangat erat kaitannya dengan budaya dan tata nilai sosial masyarakat. Seorang anak dianggap memiliki makna ganda dalam keluarga dan masyarakat. Pada sisi yang satu, anak dianggap sebagai penerus garis keturunan keluarga di masa mendatang, sedang di sisi lain anak dianggap memiliki aset ekonomi potensial yang dapat dioptimalkan sebagai salah satu pilar perekonomian keluarga.

Bekerja, bagi kebanyakan anak-anak di wilayah pedesaan merupakan suatu kewajiban. Aktivitas yang dapat dikatakan sebagai suatu kerja akan terus berubah bentuk dan sifatnya berkaitan dengan umur seorang anak. Dari *momong* adik, menimba air, mencari kayu bakar sampai menjadi buruh upahan merupakan siklus yang akan dilalui seorang anak sebagai salah satu media sosialisasi tata nilai dan norma masyarakat. Akan lebih 'bagus' lagi makna potensi seorang anak, ketika potensi yang dimiliki dapat diukur dengan nilai nominal suatu kerja upahan. Sebab dengan adanya upah yang dapat diraih oleh seorang anak dapat dijadikan ukuran sumbangan terhadap pilar ekonomi keluarga.

Di sisi lain, wilayah pedesaan telah lama teralienasi oleh program industrialisasi di berbagai sektor. Agroindustri merupakan salah satu bentuk pembangunan yang telah lama merambah wilayah pedesaan. Dengan ciri-ciri kapitalistik yang terbawa di dalamnya, agroindustri memunculkan fenomena baru bagi masyarakat desa. Nilai tanah juga turut mengalami pemaknaan baru, demi-

kian pula dengan tergesernya aktifitas anak-anak dari kerja untuk keluarga menjadi kerja untuk orang lain.

Makna ekonomi seorang anak dalam satu keluarga dan terbukanya pasar tenaga kerja memunculkan anak-anak dalam angkatan kerja. Kelebihan penawaran tenaga kerja pun mengalami surplus yang cukup besar dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja. Dengan kondisi ini akhirnya posisi tawar anak-anak dalam sistem kerja yang kapitalistik ini menjadi lemah. Dalam dialektika ekonomi yang demikian timpang inilah buruh anak di bagian warengan dan di gudang tembakau diposisikan.

Tentang Kerja dan Tembakau

Sampai tahun 1992 lalu hampir 70 persen pendapatan daerah Kabupaten Jember berasal dari sektor pertanian dan perkebunan. Sedangkan 60 persennya merupakan kontribusi dari sub-sektor agroindustri komoditas tembakau, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk konsumsi pasaran tembakau di Eropa. Sudah barang tentu lapangan kerja di sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Untuk agroindustri tembakau, sampai tahun 1992, tercatat sekitar 32 perusahaan yang menempatkan unit usaha pada komoditas tembakau. Dari jumlah tersebut sekitar sembilan perusahaan berorientasi ekspor dengan spesifikasi usaha pada budidaya tembakau jenis **Besuki Na Ougts** (BNO). Lokasi unit usaha dari perusahaan tersebut mayoritas ditempatkan di wilayah pinggiran kota, tentunya dengan berbagai alasan yang cukup menguntungkan.

Keberadaan unit usaha agroindustri tembakau di daerah ini mempunyai dua sisi yang paradoksal. *Pertama*, keberadaan unit pengolahan dan budidaya tembakau di lahan pertanian, telah memberikan alternatif pekerjaan di luar sektor pertanian tradisional. *Kedua*, keberadaan unit pengolahan dan budidaya temba-

kau oleh swasta, di sisi lain justru memarginalkan petani gurem dalam memanfaatkan lahan produktif. Dari kedua sisi yang paradoksal tersebut akhirnya memunculkan ketergantungan petani atas keberadaan dan kelangsungan unit usaha tembakau. Hingga akhirnya memunculkan pula fenomena semakin lemahnya posisi tawar buruh tembakau dalam menilai hasil kerjanya.

Usaha tembakau merupakan suatu unit usaha yang bercirikan padat karya dan sekaligus juga padat modal. Pada tahun 1991, areal pertanian yang dimanfaatkan untuk budidaya tembakau mencapai angka di atas 16.000 ha, dengan kebutuhan biaya produksi mencapai sekitar Rp20 juta perhektar.

Sedangkan tenaga kerja dalam usaha tembakau yang terdapat di unit-unit usaha tembakau ini mayoritas didominasi oleh buruh perempuan, baik dari mulai tahap budidaya sampai pada tahap pengolahan di gudang. Dominasi buruh perempuan di unit-unit usaha tembakau diasumsikan bahwa pekerjaan tersebut dikategorikan sebagai 'pekerjaan ringan', yakni pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan dan ketrampilan. Kedua hal ini dianggap 'hanya' dimiliki oleh perempuan. Tak heran bila dari hasil beberapa kali survei yang dilakukan, 125.000 sampai 135.000 tenaga kerja yang telah diserap pada subsektor ini, hampir 70 persen buruh perempuan terdapat di bagian warengan, sedangkan di gudang pengolahan angkanya mencapai 90 persen buruh perempuan.

Dua tempat bekerja buruh perempuan — warengan dan gudang pengolahan — menjadi ciri utama proses produksi di unit usaha tembakau. *Warengan* sendiri arti sebenarnya adalah jaring yang digunakan dalam teknik Tembakau Bawah Naungan (TBN), yakni untuk menutupi tanaman tembakau di sawah. Jaring ini digunakan untuk mengurangi intensitas matahari sampai 80%. Sedangkan di gudang pengolahan — tempat mayoritas buruh perempuan bekerja — memiliki dua jenis bidang kerja, yakni satu gudang pengolahan semi permanen yang terbuat dari bambu. Gudang ini berfungsi sebagai pengolah tembakau pada tahap awal setelah dipetik dari lahan, termasuk juga pengeringan

meng-asapkan dan *ngujen* dilakukan di gudang ini. Sedangkan gudang lainnya dibuat permanen — oleh penduduk biasanya disebut *gudang seng* — dan lokasi yang dipilih adalah lokasi yang dekat dengan sarana transportasi. Gudang ini berfungsi untuk mengolah tembakau yang telah kering untuk melakukan sortasi dan 'pengebalan' sebelum diekspor ke luar negeri. Beberapa jenis pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh anak-anak di gudang pengolahan permanen adalah *laden* dan beberapa tahap sortasi.

Di warengan dan gudang pengolahan semi permanen yang terbuat dari bambu yang berada di lahan pertanian, aktifitasnya biasa dimulai dari bulan Mei sampai akhir Oktober. Sedang di gudang pengolahan yang permanen dilakukan pada saat tembakau akan diekspor.

Pola kerja yang terdapat di warengan maupun di gudang pengolahan yang dikembangkan oleh perusahaan berbeda dengan pola kerja yang dikembangkan oleh petani tembakau tradisional. Bahkan pola kerja di perusahaan ada beberapa pola kerja yang sebenarnya memiliki kemiripan dengan proses *deskilling* di industri garmen di perkotaan. Pola kerja dan sistem pengupahan yang tidak *fair* merupakan satu karakteristik tersendiri yang masih muncul. Hingga akhirnya dampak dari pola kerja di perusahaan yang demikian itu justru memarjinalkan buruh tembakau dalam sistem perekonomian masyarakat di sekitarnya.

Sementara serikat kerja yang diharapkan mampu memperbaiki kondisi ini, masih memperlihatkan bentuk-bentuk kolaborasinya dengan pengusaha. Beberapa pola kerja yang dimaksud adalah:

- a. Peluang mobilitas vertikal dalam organisasi kerja di gudang maupun di warengan tidak diberikan pada buruh yang tergolong 'orang luar' perusahaan. Kenyataan ini didorong oleh sifat kerja yang musiman dan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh buruh relatif tidak sesuai. Padahal pekerjaan yang harus dilakukan tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan pengetahuan dasar, tetapi lebih banyak didasari oleh *skill* dan pengalaman buruh atas kerja di sektor tembakau.

- b. Ukuran penghargaan (*premi*) dan hukuman demikian sepihak penentuannya. Bahkan peluang munculnya hukuman kepada buruh lebih besar dibandingkan dengan penghargaan, baik kuantitas maupun kualitas.

Celaknya beberapa jenis pekerjaan yang sebenarnya merupakan suatu beban kerja yang tidak layak dilakukan anak-anak, berhasil dijustifikasikan secara psikologis sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan 'tenaga-besar', sehingga bila seorang anak dapat terlibat bekerja seolah-olah merupakan suatu keberuntungan. Hingga akhirnya semakin sulit dibedakan layak dan tidak layaknya anak bekerja di unit usaha tembakau, karena ukuran yang digunakan adalah berat atau ringannya pekerjaan. Ukuran pekerjaan bukan pada pertimbangan risiko yang diterima anak-anak selama melakukan pekerjaan tersebut, ukuran kekuatan fisik berhasil mengaburkan pertimbangan risiko dari pekerjaan yang justru lebih berbahaya.

Pekerjaan yang tidak membutuhkan 'tenaga-besar' seperti; *nyetek* (menyemprot hama) *ngegembor*, *laden*, dan *sortasi* telah diberlakukan kepada anak-anak. Padahal sebenarnya pekerjaan-pekerjaan tersebut justru memiliki potensi gangguan bagi anak-anak, seperti resiko kesehatan. Namun dengan gambaran upah yang akan diperoleh, bahaya seperti kesehatan yang mungkin timbul akhirnya berhasil dikesampingkan.

Tentang Anak dan Masalahnya

Desa Tutul dan Balungkulon merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Balung. Dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kabupaten Jember, Balung merupakan salah satu wilayah pinggiran yang diharapkan dapat berfungsi sebagai titik tumbuh perekonomian Jember Wilayah Selatan (JWS). Hal ini disebabkan posisi geografisnya merupakan lahan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan.

Dengan alasan kondisi lahan yang memang kondusif untuk mengembangkan budidaya tembakau, Kecamatan Balung merupakan salah satu wilayah yang dipilih untuk perusahaan tembakau oleh swasta. Tercatat sebanyak empat perusahaan tembakau yang berorientasi ekspor menempatkan unit usahanya di Kecamatan Balung, dengan jumlah gudang pengolahan permanen hampir mencapai 12 buah. Dua sumber penyedia tenaga kerja perusahaan tembakau di Kecamatan Balung adalah desa Tutul dan Balungkulon, utamanya tenaga kerja anak-anak yang memiliki potensi sangat besar.

Karakteristik umum anak-anak (buruh anak) di dua desa ini memiliki persamaan dalam beberapa hal, di antaranya:

- a. Rendahnya tingkat pendidikan yang mampu diselesaikan oleh anak-anak di dua desa ini.
- b. Tingkat kemiskinan di kedua desa yang cukup parah dibandingkan dengan daerah lainnya.
- c. Tingginya angka perkawinan usia dini bagi anak-anak perempuan.
- d. Tingginya konsumerisme di kalangan buruh anak-anak. Biasanya setelah sebagian upah diberikan kepada orang tuanya, anak-anak cenderung untuk membelanjakan sisa upahnya ke barang-barang konsumsi, utamanya barang-barang yang dianggap sedang *trend* saat itu. Sementara kesadaran buruh anak untuk menabungkan hasil upah yang didapat masih rendah.

Dengan karakteristik demikian itu nasib paling parah dialami oleh anak-anak perempuan yang tinggal di kedua desa tersebut. Seorang anak perempuan dianggap telah memiliki pengetahuan dasar yang cukup dengan hanya menamatkan SD. Apalagi kalau ada tawaran kerja upahan yang dapat dilakukan, peluang bagi anak-anak perempuan untuk tidak melanjutkan pendidikan akan semakin besar. Bila sudah demikian maka orientasi selanjutnya adalah berusaha mendapat peluang kerja di warengan ataupun di gudang tembakau.

Berdasarkan pengalaman di lapangan selama ini, orientasi kerja dari seorang anak dapat ditimbulkan selain oleh tuntutan orang tuanya juga dapat disebabkan oleh lingkungan sekitarnya. Bahkan bekerja bagi anak-anak merupakan kegiatan sambil menunggu masa ia dianggap sudah layak berumah tangga. Mak-sudnya, seorang anak akan merasa tertuntut untuk mencari kerja dengan melihat teman-teman sebaya yang sudah kerja, namun ketika ada pinangan dari seorang lelaki akan sulit bagi seorang anak untuk menolaknya. Hal ini akhirnya dimaklumi dengan melihat kondisi kemiskinan keluarga anak-anak tersebut, sehingga dengan adanya pinangan ini maka beban ekonomi keluarga/orangtua akan berkurang.

Keluarga buruh anak merupakan golongan yang berasal dari masyarakat miskin. Ciri kemiskinan yang melekat dalam keluarga ini adalah sempitnya lahan yang dimiliki atau bahkan tidak memiliki lahan, serta rendahnya penghargaan atas pendidikan yang harus dimiliki oleh anak-anak. Kondisi sosial ekonomi yang demikian ini merupakan salah satu faktor yang membawa dampak masih tingginya angka kelahiran pada orang-orang yang berusia muda di masyarakat ini. Hal ini disebabkan usia rata-rata anak perempuan dianggap telah layak kawin berusia 14 hingga 15 tahun, sehingga angka kelahiran banyak berasal dari kelompok usia tersebut.

Faktor usia layak kawin tersebut juga dilatarbelakangi oleh fenomena yang berkembang di dalam masyarakat di daerah ini. *Pertama*, adanya anggapan bahwa anak perempuan sudah memiliki kesiapan psikologis setelah berumur di atas 15 tahun, oleh karena itu akan lebih baik kalau secepatnya anak perempuan dikawinkan daripada memberikan peluang membuat malu bagi keluarga. *Kedua*, dengan kawinnya seorang anak, berarti akan memberikan tambahan tenaga kerja bagi keluarga, sehingga beban ekonomi keluarga akan berkurang. Fenomena ini dapat dikategorikan sebagai salah satu alternatif keluarga buruh anak untuk menanggulangi permasalahan perekonomiannya.

Sedangkan bagi seorang anak yang 'beruntung' dapat masuk dalam persaingan tenaga kerja di warengan maupun gudang pengolahan, bukan berarti akan terbebas dari penindasan dan perkawin-an usia dini. Bahkan anak yang 'beruntung' ini memiliki beban ganda yang harus dihadapinya, baik di rumah (keluarga) maupun di tempat kerja. Beberapa masalah beban ganda yang selama ini masih potensial dihadapi oleh buruh anak adalah:

- a. Pola kerja yang cenderung eksploitatif atas tenaga kerja anak. Beberapa ketentuan kerja yang ada cenderung menempatkan buruh anak sama dengan buruh dewasa dalam beban kerja. Sedang imbalan yang diterima tidak sama, di antaranya jam kerja yang panjang, sistem *target* dan kuota yang tidak *fair*, tidak adanya fasilitas cuti bagi anak-anak yang mengalami menstruasi.
- b. Rendahnya upah yang diterima serta kondisi kerja yang tidak mempertimbangkan segi kesehatan bagi anak-anak. Seperti tahap kerja yang dialami di bagian warengan mengharuskan anak-anak berada di bawah terik matahari sepanjang hari. Demikian pula di gudang pengolahan kelembaban ruangan ditambah lagi dengan polusi yang ditimbulkan oleh debu dari daun tembakau memberikan peluang munculnya gangguan pernafasan.
- c. Masih adanya pelecehan seksual oleh beberapa mandor, utamanya bagi anak-anak perempuan yang cukup cantik. Menghadapi persoalan ini buruh anak-anak biasanya hanya diam, sebab sanksi yang dapat diterima adalah di-*lorot* (PHK, pemecatan) dari pekerjaan.
- d. Demikian pula di tingkat keluarga, mayoritas anak-anak yang bekerja memberikan hasil upah kepada orang tuanya, tanpa harus tahu atau tidak peduli penggunaannya. Bahkan tak jarang seorang anak justru menjadi penyumbang pendapatan terbesar bagi perekonomian keluarganya — biasanya berasal dari keluarga yang mengalami perceraian.

Tentang Strategi dan Pendekatan

Sejak awal, kompleksitas akar permasalahan fenomena eksploitasi anak-anak merupakan satu mata rantai yang saling terkait satu sama lain. Anak-anak selalu ditempatkan sebagai objek dari semua aktifitas yang dilakukan. Anak-anak dipandang sebagai sosok anggota masyarakat yang tidak memiliki *kompetensi* dan otoritas untuk merancang penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Cara pandang masyarakat yang demikian ini memberikan dampak adanya ambivalensi atas eksistensi ekonomi anak-anak. Maksudnya, di satu sisi masyarakat mengakui adanya potensi ekonomi yang dimiliki oleh anak-anak, jadi sudah dianggap suatu kewajiban kalau potensi ini dimanfaatkan dalam suatu aktifitas ekonomi. Sedang di sisi lain, anak-anak dianggap tidak boleh memiliki akses atas aktifitas ekonomi yang dilakukannya. Akibat yang terjadi adalah anak-anak cenderung menjadi pasif dalam semua permasalahan yang ditimbulkan dari suatu mekanisme kerja.

Dengan karakteristik buruh anak yang memang memiliki kekhususan dibandingkan dengan pekerja dewasa, seorang pendamping harus memahami betul karakteristik anak-anak serta latar belakang sosial ekonomi maupun budaya masyarakat tempat tinggalnya. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan adanya bias kelas menengah, cara pikir orang dewasa, serta kesenjangan dalam pola hubungan yang akan dikembangkan dalam proses pendampingan. Hingga akhirnya totalitas pendampingan sangat vital dalam proses dinamisasi kelompok.

Dengan memahami kompleksitas demikian, program pendampingan yang selama ini dilakukan bagi buruh anak di dua desa tersebut dilandasi dengan asumsi awal bahwa fenomena buruh anak merupakan salah satu karakteristik sosial yang memang harus diakui keberadaannya, maka dari itu keberadaan anak-anak yang bekerja tidak dapat dihapuskan sama sekali. Melalui asumsi ini maka muatan pendampingan merupakan kombinasi antara strategi perlindungan bagi anak-anak yang bekerja, den-

gan pe-nguatan (*empowering*) buruh anak terhadap akses kerja. Maksudnya pada tingkat tertentu aktifitas pendampingan lebih menekankan pada perlu pemberian perlindungan atas dampak negatif yang dapat menimpa anak-anak, sekaligus dikombinasikan pula dengan pembentukan kelompok-kelompok buruh anak yang difungsikan sebagai sarana penguatan.

Landasan yang paling substansial dalam program ini adalah pengakuan adanya hak ekonomi oleh anak-anak, oleh karena itu program lebih menggunakan pendekatan berdasarkan kelompok sasaran anak (*target group-based approach*), serta masyarakat dan keluarga mereka sebagai sasaran pendukung. Artinya kelompok anak-anak dianggap sebagai bagian anggota masyarakat yang memiliki potensi aktif untuk melakukan pemahaman atas semua realitas yang ada di sekitarnya, sedangkan keluarga dan masyarakat diposisikan sebagai 'tiang penyangga' dalam pemberdayaan dan perlindungan buruh anak-anak. Dengan pendekatan ini maka anak-anak didorong untuk secara aktif melakukan anali-sa atas kerja dan dampaknya.

Tingkat operasional strategi dan model pendekatan yang demikian itu diaplikasikan dengan menyusun beberapa tujuan jangka pendek, serta rangkaian aktifitas yang menjadi *workplan* dalam jangka waktu tertentu. Beberapa tujuan di tingkat operasional yang diharapkan terwujud adalah:

- a. Munculnya kesadaran dan pemahaman atas keberadaan aktifitas kerja bagi anak-anak dengan segala dampak negatifnya. Kesadaran yang dimaksud tidak hanya ditekankan pada anggota kelompok, tetapi harus ada proses sosialisasi antar-buruh anak, antara anak dan keluarga, hingga akhirnya kepada masyarakat.
- b. Berkembangnya kemampuan berpikir kritis dan analitis dari buruh anak-anak atas permasalahan yang dihadapinya, baik di tingkat keluarga, masyarakat maupun di tempat kerjanya.

- c. Munculnya kebutuhan baru dari anak-anak atas pola kehidupan berkelompok dan penguatan solidaritas antara buruh anak, sehingga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar buruh anak dalam mekanisme kerja yang kapitalistik.

Tentang Pemberdayaan dan Hasilnya

Strategi penguatan dan model pendekatan yang menempatkan buruh anak-anak sebagai landasan aktifitas, memberikan berbagai konsekuensi logis dalam penjabaran bentuk-bentuk kegiatan yang diadakan. Buruh anak-anak sebagai sasaran utama, mendapatkan porsi yang cukup besar dalam rangkaian program pendampingan daripada keluarga dan masyarakat. Beberapa kegiatan yang dijadikan media sosialisasi pemberdayaan adalah:

Rekreasi.

Realitas yang dihadapi buruh anak di desa Tutul dan Balungkulon ini menempatkan aktifitas yang memiliki kadar rutinitas yang tinggi. Untuk itu melalui aktifitas rekreasi merupakan sarana yang cukup efektif untuk mengajak mereka memahami suatu persoalan dan akar permasalahannya. Biasanya anak-anak mampu menghilangkan kendala psikologis dalam aktualisasi sikapnya ketika ia jauh dari lingkungan rumah maupun tempat kerjanya.

Menggambar dan bercerita

Dua media ini sebenarnya merupakan media yang cukup efektif untuk membuka sifat ketertutupan anak-anak. Media ini juga dapat dijadikan bahan diskusi yang dalam dengan anak-anak, karena objek cerita maupun gambar memang bukan hal yang asing bagi anak-anak dan akan merangsang anak untuk meresponnya. Selain itu media menggambar dan

bercerita cukup efektif sebagai wahana penumpahan ekspresi dan *respon* anak-anak atas satu permasalahan.

Kunjungan antaranggota kelompok

Aktivitas ini lebih banyak didasari oleh tujuan untuk mensosialisasikan kepada keluarga buruh anak, tentang perlunya pemberian kesempatan bermain dan berkumpul bagi anak-anak.

Penerbitan Media Buletin

Sebagai salah satu media dokumentasi dan ekspresi anak-anak, dibuat satu media (buletin) yang dikhususkan untuk mereka. Pengkondisian makna tulisan dan prestis yang dapat diraih — secara psikologis — membuat beberapa anak cukup produktif mengisi buletin tersebut.

Terjaganya kontinuitas buletin tersebut memiliki beberapa makna bagi anak-anak antara lain, *pertama*, sebagai simbol pemersatu di antara buruh anak-anak dalam satu kelompok. *Kedua*, sebagai ukuran sederhana tentang niatan mereka untuk meraih pengetahuan yang lebih banyak, apalagi latar belakang anak-anak mayoritas tamat SD. Buletin juga dapat berfungsi sebagai media latihan menulis bagi mereka. *Ketiga*, sebagai sarana sosialisasi dan advokasi eksternal tentang masalah-masalah yang dihadapi anak-anak.

Tentunya aktifitas yang telah dipaparkan di muka merupakan aktifitas yang lebih mendasarkan pada *workplan* secara global jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh dinamika permasalahan anak-anak tidak dapat diprediksikan secara rinci sejak awal, namun paling tidak dapat mengetahui pada rentang waktu tertentu yang melingkupi beberapa persoalan mekanisme yang eksploitatif.

Kendati demikian ada beberapa aktifitas yang memang berorientasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau kasus-kasus jangka pendek, di antaranya:

Adanya pemaksaan bagi buruh untuk membeli beras yang disediakan oleh perusahaan.

Sebenarnya beras yang akan dijual bukan fasilitas dari perusahaan, tetapi lebih banyak dimungkinkan oleh demikian kuatnya posisi mandor. Sedangkan perusahaan cenderung pasif melihat masalah, ini cenderung menutup mata dan berpihak kepada mandor. Menghadapi situasi itu maka sejak tahap awal, secara bersama-sama anak-anak diajak untuk mencari jalan pemecahan yang paling memungkinkan.

Penyimpangan jam kerja

Beberapa penyimpangan kerja yang sudah demikian eksploitatif, seperti kerja sampai jam 21.00 WIB, masuk kerja pukul 02.00 WIB (dini hari), adanya pemaksaan pemotongan upah — iuran SPSI — yang cukup besar, maka anak-anak akan dikonsentrasikan untuk mengorganisasikan diri dan menginventarisasikan masalah yang muncul. Sementara itu pendamping akan berfungsi sebagai mediator untuk mengadakan dialog dengan beberapa instansi terkait.

Kawin Paksa

Beberapa kejadian kawin paksa membuat anak-anak lari mencari perlindungan. Kalau terjadi seperti itu pendamping akan mencoba untuk memanfaatkan tokoh masyarakat — informal maupun formal — untuk memberikan penjelasan kepada orang tua.

Kejadian-kejadian yang bersifat insidental/kasuistik tersebut kadang memberikan dampak yang cukup besar bagi dinamisasi kelompok. Namun yang sering terjadi adalah ketidaksiapan pendamping untuk memasuki suatu permasalahan yang berakar

pada budaya masyarakat setempat. Sebab posisi pendamping dalam mata masyarakat dianggap sebagai 'orang luar' yang tidak memiliki otoritas untuk campur tangan, apalagi jika sudah me-nyangkut permasalahan kewenangan orang tua terhadap anaknya. Kompleksitas permasalahan di atas yang selalu dihadapi pendamping, berpengaruh besar dalam interaksi di lapangan.

Meski demikian dalam proses pendampingan tersebut, telah memberikan kesadaran tentang arti pentingnya posisi orang tua dalam proses penyadaran dan penguatan buruh anak-anak. Dengan kesadaran ini program pendampingan juga diformat untuk memberikan intervensinya pada tingkat keluarga. Kerangka sederhana yang dipakai dalam rangka melibatkan orang tua adalah dengan merintis beberapa kegiatan yang bertujuan memberikan alternatif pemenuhan kebutuhan ekonomi jangka pendek. Selain itu program bagi orang tua dan masyarakat juga menekankan tentang makna seorang anak dalam kerangka agama maupun peraturan positif. Muatan program ini ditempuh dengan menggunakan beberapa media, di antaranya:

Pembentukan kelompok jamaah tradisional

Tahap ini dapat dilakukan dengan mengaktifkan jamaah-jamaah yang sudah ada, atau mengadakan jamaah baru dengan memanfaatkan tokoh masyarakat. Aktifitas ini diadakan sebagai media tukar pengalaman antarorang tua.

Demikian juga dengan peran tokoh masyarakat yang ternyata dalam hal ini berperan cukup vital. Beberapa kali terjadi kesalahpahaman antara pendamping dan tokoh masyarakat, sehingga menyebabkan turunnya gairah orang tua untuk datang dalam pertemuan rutin.

Pengembangan situasi dan kondisi yang dialogis antara orang tua dan anak serta tokoh masyarakat

Media yang dipakai adalah mengadakan kegiatan yang bertujuan memberikan tambahan bagi keluarga buruh anak, di antaranya beternak ayam, simpan pinjam. Dengan adanya aktifitas *income generating* ini orang tua diharapkan akan tahu makna kerja yang dilakukan oleh anaknya.

Dari berbagai program yang telah dilakukan di atas, ada beberapa perubahan yang dapat dikatakan sebagai salah satu hasil dari program pendampingan, yakni:

- a. Munculnya keberanian beberapa orang anak untuk mempertanyakan nasib dan posisi mereka selama ini. Indikasi minimal fenomena ini adalah keberanian mereka mempertanyakan beberapa hal yang dianggap 'tidak beres' kepada mandor maupun kepada Kepala Desa.
- b. Munculnya solidaritas di antara buruh tembakau. Indikasi yang cukup transparan adalah ketika tahap *recruitment*, baik di bagian warengan maupun di gudang pengolahan. Beberapa buruh mampu menanamkan makna kebersamaan di antara mereka, sehingga dengan memanfaatkan faktor kedekatan dengan mandor akhirnya seorang buruh anak dapat mempengaruhi mandor tersebut untuk menerima beberapa temannya.
- c. Beberapa anak telah berani menggugat beberapa nilai budaya dan sosial masyarakat yang dirasakan tidak memperlihatkan asas keadilan, di antaranya adalah dipertanyakannya realitas budaya yang berkembang, seperti **kawin paksa**.

Tentang Kendala

Aktifitas pendampingan yang dilakukan di desa Tutul dan Balungkulon secara umum merupakan satu terobosan bu-

daya bagi masyarakat setempat. Tak heran bila kendala-kendala yang sering muncul sering berakar pada norma dan nilai budaya setempat yang sebenarnya tidak menguntungkan anak-anak. Tapi karena adanya beberapa kepentingan dari beberapa pihak atas keberadaan buruh anak-anak, aktifitas pendampingan sering kali harus berhadapan dengan beberapa simbol budaya yang diwakili oleh figur masyarakat.

Namun bukan berarti kendala yang muncul hanya disebabkan oleh faktor internal masyarakat dampingan, melainkan pula kondisi internal lembaga (YPSM) dan juga masalah internal pendamping seringkali menjadi masalah tersendiri. Beberapa di antara kendala yang menonjol muncul adalah:

*Budaya kepatuhan dan fatalitas
yang cukup besar masyarakat desa*

Permasalahan yang muncul dianggap sebagai bagian dari ujian dari yang Maha Kuasa, sedang manusia hanya dapat menerima dengan ikhlas hati. Faktor kepatuhan demikian makin transparan ketika seorang figur masyarakat memberikan 'fatwa' tentang kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak maupun restu dari orang tua.

Jenuh terhadap masalah kemiskinan

Kondisi kemiskinan yang telah lama berlangsung akhirnya membuat masyarakat menanggapi kemampuan ekonomi adalah satu-satunya penyelesaian masalah. Kendala ini semakin nampak ketika program pendampingan dinilai tidak memberikan manfaat yang jelas dalam jangka pendek, sementara ukuran yang sering dipakai adalah ukuran kuantitas (ekonomi).

Dari sisi internal lembaga

Beragamnya latar belakang aktivis yang terlibat, membuat pula keragaman motivasi aktivis. Sedang bekal konsepsi, metode pendampingan, membuat pendamping sering kali justru terlibat dalam masalah-masalah antarmasyarakat. Dalam masalah internal lembaga ini yang juga cukup dominan muncul adalah kurangnya *reference of experience* tentang pendampingan sehingga yang selalu muncul adalah reaksi spontanitas yang cenderung emosional.

Penutup

Aktivitas pendampingan buruh anak di pedesaan secara ideal seharusnya berangkat dari pemahaman konsepsi intervensi di tingkat keluarga, sebab buruh anak-anak di pedesaan memiliki kondisi sosial masyarakat yang berbeda. Namun bukan berarti intervensi di tingkat keluarga harus selalu berorientasi *economic development*, tetapi segmen keluarga merupakan salah satu pintu masuk penyadaran yang cukup efektif.

Perlindungan dan Pemberdayaan Buruh Anak

Rostymaline Munthe
KOMPAK, Jakarta

Pendahuluan

Jumlah anak yang bekerja antara usia 10 sampai 14 tahun di Indonesia adalah 1,99 juta orang (Biro Pusat Statistik, 1994). Menurun drastis dibandingkan dengan data BPS tahun 1990 yang jumlahnya sebesar 2,68 juta. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa anak yang bekerja di sektor industri, justru terjadi peningkatan dari 7,9 persen menjadi 12,6 persen.

Hal demikian tentu perlu untuk dicermati, sebab mungkin saja terjadi peningkatan pada tahun-tahun mendatang, jika dihubungkan dengan perkembangan industri yang begitu cepat di Indonesia. Misalnya apakah pengurangan jumlah anak yang bekerja di sektor pertanian ada hubungannya dengan kecenderungan makin banyaknya anak-anak yang pergi ke kota menjadi buruh, atau apakah peningkatan anak yang bekerja di sektor industri ini juga ada hubungannya dengan banyaknya sekolah-sekolah SD yang terpaksa ditutup akibat tidak ada murid?

Adanya isu tentang keberadaan buruh anak di sektor formal sampai saat ini masih mengundang perdebatan yang sangat serius dan tak habis-habisnya. Menurut perkembangannya ada pendapat sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa keberadaan buruh anak harus diakui dan dilindungi. Sementara keberadaan buruh anak ini oleh pemerintah masih tidak diakui keberadaannya, bila dihubungkan dengan kepentingan politik negara. Pemerintah sendiri belum menentukan sikap yang jelas terhadap masalah ini. Dengan sikap yang tidak jelas ini pula justru ikut mendorong anak dalam proses marjinalisasi dan penindasan, utamanya terhadap keberadaan buruh anak.

Proses Marjinalisasi

Dalam rangka mengamankan modal yang telah ditanamkan para *investment*, kita dapat melihat kecenderungan bahwa pemilik modal melakukan berbagai upaya untuk mengamankan modalnya. Dari *trend* yang ada selama ini dan sampai sekarang, dapat dilihat dalam bentuk relokasi industri dari satu kawasan ke kawasan industri lain. Industri raksasa memberi subkontrak kepada perusahaan lain, kemudian dari subkontrak ke subkontrak, pemindahan proses produksi dari pabrik ke rumah-rumah (*home industri*). Di saat pemindahan proses produksi ke rumah-rumah ini, akhirnya memberi peluang bagi anak untuk melakukan pekerjaan sendiri maupun pekerjaan yang sifatnya membantu.

Upaya ini seringkali dilakukan dalam rangka mencari keuntungan yang lebih besar dengan menekan ongkos produksi sekecil mungkin. Dengan praktek ini pula buruh sudah tentu tidak mempunyai akses untuk menuntut perbaikan kesejahteraannya, kepentingan buruh tidak terakomodasi dan justru kerugianlah yang paling banyak dirasakan.

Strategi lokasi perusahaan seperti yang disebutkan di atas tadi, apapun alasannya adalah merupakan praktek memarjinalkan buruh. Perusahaan boleh saja mempunyai berbagai alasan untuk melakukan 'relokasi perusahaan' dalam rangka pengembangan industri dan efisiensi, tentunya bila tidak untuk tujuan keserakahan belaka. Namun kenyataannya bahwa dengan praktek 'relokasi' atau pemindahan proses produksi dari perusahaan induk ke usaha rumah, keuntungan perusahaan menjadi berkali lipat karena upah yang akan dibayar lebih murah, dan faktor pendukung seperti keamanan dan faktor-faktor lainnya tidak ditanggung oleh perusahaan.

Sebaliknya kerugian lain bagi buruh dan perjuangan buruh dalam menghadapi strategi 'relokasi' ke industri perumahan, telah menimbulkan masalah baru seperti pengangguran karena alasan efisiensi, juga terpotongnya dan tercerai-berainya akar perjuangan buruh yang telah dibangun bersama.

Praktek lain perusahaan untuk adalah melalui strategi pengsubkontrakan proses produksi, yakni memberikan subkontrak ke perusahaan lainnya. Subkontrak biasanya diberikan oleh perusahaan besar atau pemilik lisensi — merek dagang tertentu ke perusahaan lain di berbagai tempat, hal ini banyak dilakukan oleh pemilik modal besar (Multi National Corporation/Trans National Corporation, MNC/TRC) kepada perusahaan-perusahaan lokal.

Melalui strategi subkontrak ini di satu sisi pemilik modal dapat leluasa mengembangkan modalnya lewat perusahaan subkontrak, karena perusahaan-perusahaan subkontrak hanya mengerjakan satu bagian dari satu produk. Sedangkan di sisi lainnya perusahaan lokal bertugas menyiapkan tenaga kerja yang akan menyelesaikan sebagian proses produksi sesuai dengan kontrak kerja. Praktek ini dalam kenyataan merupakan satu strategi untuk menghindarkan pelaksanaan kode etik (hak-hak sosial buruh - konvensi ILO). Artinya perusahaan lebih berpeluang memberikan upah lebih murah, jaminan sosial rendah, tidak membentuk organisasi buruh, juga demi keuntungan yang berlipat ganda. Melalui praktek inilah pengusaha meredam gejolak buruh, karena bila buruh ingin memperbaiki kesejahteraannya, buruh tidak mengetahui siapa yang sesungguhnya sebagai pemilik perusahaan. Buruh pada umumnya hanya dihadapkan kepada manajemen yang tidak dapat mengambil keputusan apa-apa.

Pada umumnya perjanjian yang dibuat antara buruh dan majikan dilakukan dengan cara buruh bekerja seperti biasanya di perusahaan, sementara harga produksi yang dikerjakan ditentukan perusahaan menurut hasil borongan yang dikerjakan. Konsekuensi yang diterima buruh adalah hubungan kerja terputus, jam kerja dan jumlah produksi yang dikerjakan ditentukan oleh buruh sendiri. Dengan pola hubungan yang demikian maka pengusaha tidak lagi mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan hak-hak buruh. Sebaliknya pengusaha sangat diuntungkan juga dari segi administratif, karena dengan mekanisme demikian perusahaan dapat terhindar dari membayar pajak buruhnya kepada pemerintah.

Mempekerjakan Buruh Anak

Salah satu strategi modal dalam meraup keuntungan adalah dengan merekrut buruh anak. Anak-anak dipekerjakan karena tidak banyak menuntut dan cenderung menerima segala bentuk eksploitasi. Apalagi anak yang bekerja di perusahaan-perusahaan subkontrak, sangat memiliki potensi sehingga sangat menguntungkan untuk direkrut menjadi tenaga kerja.

Seperti yang telah diungkap di atas bahwa perusahaan-perusahaan penerima subkontrak pada umumnya hanya mengerjakan satu bagian dari satu proses produksi. Biasanya pula segala jenis pekerjaannya tidak memerlukan keterampilan khusus, sehingga dengan mempekerjakan anak atau orang dewasa tidak menjadi kendala dalam proses produksi. Dengan tidak memerlukan keterampilan khusus itu pula maka buruh dapat langsung terbiasa dan dalam waktu yang sangat singkat dapat mengerjakan target produksi yang diinginkan perusahaan.

Perusahaan dalam upaya melakukan pengamanan modalnya, juga mempunyai 'kekuatan' dan akses berorganisasi, sehingga buruh tidak berani menuntut, tidak melakukan mogok dan mau bekerja apa saja. Tentu hal ini sangat merugikan buruh anak itu sendiri, karena dengan posisi tawarnya yang memang sudah lemah akan semakin lemah lagi dengan kemampuan yang dimiliki pengusaha.

Pandangan Kompak Indonesia

Terhadap Pemerintah

Pemerintah melihat keberadaan buruh anak di sektor pekerja anak, sampai saat ini masih menunjukkan sikap acuh tak acuh dan sikap mendua. Praktek ini dapat dilihat dari berbagai rumusan pemerintah tentang definisi buruh anak, disebutkan bahwa buruh anak adalah anak yang 'terpaksa' bekerja. Dengan demikian pemerintah di satu sisi tidak mengakui keberadaan buruh anak, tetapi di satu sisi lagi mengakui tetapi dengan pe-

nambahan kata 'terpaksa' bekerja. Pemerintah terkesan 'malu-malu' terhadap kehadiran buruh anak dalam hubungan industrial. Hingga akhirnya dengan sikap pemerintah yang demikian, solusi yang ditawarkan pemerintah untuk merespon keberadaan buruh anak di dalam hubungan industrial selalu bersikap menunda. Akibatnya adalah justru merugikan buruh anak, karena peluang inilah yang sering dimanfaatkan oleh pengusaha untuk melakukan praktek-praktek eksploitasi. Akhirnya yang paling celaka adalah me-'legal'-kan anak-anak diperlakukan tidak adil dalam melakukan proses produksi.

Sikap pemerintah yang ambivalen itu makin tampak bila merujuk pada Undang-undang yang mengatur kehadiran buruh anak di Indonesia (UU No. 1/1951) dan konvensi ILO 138, kedua aturan tersebut sangat bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK) No. 1 Tahun 1987 yang dibuat pada masa Soedomo menjadi Menteri Tenaga Kerja. Peraturan itu muncul hanya untuk menjawab tekanan dari luar negeri terhadap keberadaan buruh pada industri ekspor, bukan atas dasar yang sungguh-sungguh untuk melihat kepentingan anak. Semakin nyata tidak ada pengakuan dari pemerintah tentang keberadaan buruh anak bila dikaitkan dengan catatan secara administratif yang dibuat pemerintah, dengan catatan bahwa pemerintah tidak pernah menemukan anak yang bekerja. Sikap ambivalensi ini mengakibatkan pada tidak ada satupun perusahaan melaksanakan ketentuan SK Menteri No. 1 Tahun 1987 ini, sehingga kesan yang tampak adalah bahwa PMTK hanya untuk kepentingan politik tertentu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini pemerintah belum menunjukkan kesungguhan dalam menangani permasalahan buruh anak. Pandangan ini dapat dikuatkan dengan pengalaman KOMPAK ketika berhadapan dengan Depnaker tahun 1993. Pada saat itu Yayasan KOMPAK beberapa kali diundang Depnaker untuk membahas rancangan peraturan pemerintah untuk perlindungan anak, namun ketika rancangan sudah mengarah pada persoalan teknis maka KOMPAK Indonesia tidak lagi dilibatkan. Bahkan sampai hari ini pun Konsep Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Buruh Anak belum dikeluarkan juga.

Hal lain yang dapat disoroti bahwa sekarang masih belum ada koordinasi antarinstansi terkait (interdepartemental) dalam menangani keberadaan buruh anak. Seperti Program Wajib Belajar 9 tahun yang gencar dilakukan kampanyenya oleh Depdikbud, tidak pernah terlihat kesungguhan dalam mengimplementasikan program tersebut. Program wajib belajar tersebut justru tidak dilakukan bekerjasama dengan departemen yang mengurus tenaga kerja, sehingga dapat sangat dimungkinkan bagi buruh anak untuk mendapatkan kesempatan belajar. Akhirnya kampanye Depdikbud tetap berjalan, sementara buruh anak semakin hari semakin berbondong-bondong memasuki pasar kerja.

Terhadap Organisasi Buruh

Mengingat Organisasi Buruh yang diakui pemerintah adalah SPSI dan *nota bene* mempunyai pandangan yang sama, maka pandangan SPSI terhadap buruh anak juga tidak jelas atau bersikap mendua. Celakanya dengan diberangusnya kebebasan berseikat bagi buruh dan juga banyaknya persoalan-persoalan yang menyangkut politik hubungan perburuhan, persoalan buruh anak semakin tenggelam dan terabaikan.

Kendati demikian harus diakui pula bahwa sejak dua tahun terakhir ini SPSI melalui lembaga Wanita dan Remaja, bekerjasama dengan Program Penghapusan Buruh anak ILO-IPEC telah mulai memikirkan keberadaan buruh anak di Bekasi. Namun sayangnya upaya yang telah dilakukan tersebut, belum membawa perubahan yang berarti bagi buruh anak.

Organisasi Buruh Internasional

Merujuk pada konvensi ILO 138 tentang penghapusan buruh anak pada usia wajib sekolah, ILO telah sejak lama memberikan perhatian kepada permasalahan buruh anak. Namun perhatian itu masih belum terakomodasi lewat program-program yang dilakukan. Seperti di Indonesia ada proyek penghapusan buruh anak yang diupayakan ILO-IPEC (*International Programme on the Elimination of Child Labor*). Program ILO-IPEC ini secara khusus

dimaksudkan untuk mengurus persoalan-persoalan buruh anak di Indonesia.

Program yang dilakukan ILO-IPEC ini adalah merupakan gagasan yang baik, namun idealnya adalah apabila tatanan ekonomi-politik di Indonesia betul-betul adil. Sementara kon-disinya sendiri untuk Indonesia masih belum memungkinkan, sehingga gagasan penghapusan terhadap keberadaan buruh anak dalam konteks Indonesia masih membutuhkan pemikiran yang lebih jauh lagi. Hal ini dapat dihubungkan dengan kondisi objektif Indonesia yang belum memungkinkan untuk melakukan program penghapusan keberadaan buruh anak. Tentu saja bila program ini terus dipaksakan dengan kondisi sekarang, maka hanya akan sia-sia saja.

Sebagai indikator terhadap pandangan di atas dapat dilihat dari alasan-alasan yang diungkapkan buruh anak. Buruh anak pada umumnya mengatakan bahwa mereka sangat menyukai pekerjaan. Di samping itu pada umumnya anak didorong bekerja oleh orangtua; ingin membantu ekonomi keluarga, mencari pengalaman, ingin punya uang sendiri dan ingin mandiri. Indikator lain adalah bahwa pada umumnya orangtua buruh anak juga telah bekerja dan menikah pada usia muda, sehingga para orangtua sangat berpotensi mendorong anaknya untuk bekerja daripada sekolah. Demikian pula dengan faktor-faktor budaya yang juga turut memperkuat indikator itu. Melalui indikator itu maka program penghapusan buruh anak adalah merupakan pekerjaan yang emosional, sementara kita tidak mampu menjawab apa yang menjadi penyebab kemiskinan dan praktek 'pemiskinan' yang ada di pedesaan (Data dikumpulkan Yayasan KOMPAK Indonesia, Tangerang, Maret 1991).

Jikalau kita menganalisis alasan-alasan yang diungkapkan buruh anak, maka persoalannya saling berkaitan yang pada akhirnya bermuara pada kemiskinan (ekonomi, intelektualitas, kesadaran politik) keluarga buruh anak. Di samping itu bila dikaitkan dengan kondisi objektif sistim politik dan perekonomian, maka argumentasi KOMPAK Indonesia untuk persoalan buruh anak bahwa yang sangat diperlukan adalah memberikan perlindungan dan pemberdayaan buruh anak.

Pemberdayaan Buruh Anak

Pengalaman lapangan Yayasan KOMPAK Indonesia yang telah dilakukan sejak 1989, utamanya di Kawasan Industri Tangerang, Bogor dan Bekasi, banyak menjumpai anak-anak usia 12-15 tahun bekerja pada industri manufaktur orientasi ekspor. Pada umumnya anak-anak bekerja pada sektor industri tekstil dan garmen, sepatu, rotan, biskuit, obat anti nyamuk, kosmetik, dan industri alat-alat rumah tangga.

Sebagian dari buruh anak ini datang dari desa (urban) dan tinggal di sekitar pabrik dengan cara menyewa kamar. Sebagian lagi datang dari desa sekitar kawasan industri — 10-15 kilometer dari desa — dan tinggal bersama orang tua.

Kondisi kerja buruh anak ini sangat memprihatinkan dan mengalami penghisapan yang luar biasa dari perusahaan, utamanya buruh anak yang aktif mengikuti kegiatan KOMPAK. Sekitar 50% dari anak-anak yang aktif mengikuti kegiatan KOMPAK bekerja antara 50 sampai 60 jam seminggu (6 hari kerja). Jam kerja yang demikian panjang tersebut juga tidak diimbangi dengan upah yang diterima oleh buruh anak. Hampir 75% dari mereka menerima bayaran sekitar Rp 18.000 s/d Rp 21.000 per minggu.

Dengan upah yang diterimanya itu buruh anak menerima penerapan jam kerja yang sama dengan orang dewasa. Bahkan yang lebih tragis lagi buruh anak sering dipaksa kerja lembur sampai malam, pemaksaan ini diperburuk lagi dengan tidak sesuainya penerimaan upah lembur dengan peraturan yang ada. Dari hasil upah yang tidak sesuai itu, kemudian 50 persennya diserahkan kepada orang tua untuk membantu keluarga dan sisanya digunakan anak untuk membeli barang konsumtif.

Kondisi buruh anak di tempat bekerja bukan hanya melulu pada persoalan jam kerja dan upah, melainkan pula menyangkut keterlibatan mereka dalam pekerjaan yang penuh risiko dan berbahaya, tanpa diberikan fasilitas kesehatan dan keselamatan yang memadai. Buruh anak biasanya ditempatkan pada bagian *pengeleman* pada industri sepatu; proses pembakaran anti nyamuk;

pada mesin *oven* — kontak langsung dengan bahan-bahan kimia — di perusahaan anti nyamuk; juga menyangkut beban berat dan aktivitas lainnya yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Posisi tawar buruh anak terhadap pekerjaan demikian lemahnya, tampak nyata lagi dengan mudahnya buruh anak direkrut bekerja dan diberhentikan sesuai dengan kebutuhan pabrik tanpa kompensasi apapun. Belum lagi pada persoalan yang sering terabaikan, yakni persoalan pelecehan seksual buruh anak oleh orang dewasa dan sangat rentan sekali persoalannya.

Dengan kondisi di atas maka model pemberdayaan buruh anak yang dilakukan KOMPAK selalu berbasis pada kebutuhan anak, dengan memperhatikan latar belakang keluarga dan dunia anak yang sebenarnya. Kita harus dapat melihat secara alamiah tentang yang sesungguhnya terjadi dalam diri buruh anak dan anak-anak yang lainnya. Sebagai contoh dapat kita lihat bahwa buruh anak lebih cepat ‘dewasa’ daripada anak yang tidak bekerja sebagai buruh. Hal ini disebabkan buruh anak telah ‘mampu’ mencari nafkah sendiri, bahkan telah dapat membantu ekonomi keluarga. ‘Kedewasaan’ ini dapat terwujud dalam penampilan sehari-hari yang sudah mulai berdandan layaknya orang dewasa. Selain itu buruh anak mempunyai rasa rendah diri, utamanya jika berhadapan dengan orang luar. Rasa rendah diri ini terwujud dalam sikap malu-malu, takut, bahkan curiga jika membicarakan tentang pekerjaan mereka. Kendati demikian mereka menyenangi pekerjaannya, ironisnya mereka menutup diri jika diungkit tentang pekerjaannya.

Melalui proses pendekatan itu maka dapat dilihat lebih jelas bahwa hak mereka sebagai anak yang seharusnya bebas bermain, bersekolah, ceria, tidak mempunyai beban — mencari nafkah — telah tercerabut. Berangkat dari hak yang tercerabut akibat rutinitas bekerja tersebutlah diwujudkan kepedulian KOMPAK secara konkret terhadap buruh anak, lewat program “Pemulihan Hak-Hak Sosial Buruh Anak” yang dalam aktivitasnya meletakkan strategi pelayanan dengan pendekatan perlindungan, pemberdayaan, melalui bentuk-bentuk program:

Pengembangan Kreativitas dan Kepribadian Anak

Program ini diimplementasikan dalam bentuk program Pendidikan Populer yang bernuansa alternatif, di dalamnya terdapat pendidikan hak-hak dasar anak, pendidikan baca-tulis dan bulletin alternatif, belajar berorganisasi lewat pembentukan kelompok minat (teater, tari, nyanyi, lukis). Ada juga Rekreasi dan Kemah Buruh Anak yang keseluruhan program dikemas sedemikian rupa, sehingga tidak membebani dan justru membebaskan buruh anak untuk berekspresi dan mengembangkan kepribadian-nya.

Advokasi dan Kampanye

Dalam program ini tercakup upaya-upaya mengangkat permasalahan buruh anak secara terus menerus, dengan menyadari bahwa tanpa kerja keras maka persoalan buruh anak tetap tidak ditangani secara serius bahkan dianggap tidak ada.

Untuk buruh anak sendiri KOMPAK melakukan pendampingan hukum (pengacara) apabila mereka mendapat permasalahan (perselisihan) dengan perusahaan. KOMPAK mendampingi buruh anak baik di tingkat perusahaan maupun ke Depnaker. Untuk mendukung perjuangan buruh anak, KOMPAK juga melakukan mobilisasi aksi bersama-sama dengan buruh anak.

Pada cakupan yang lebih luas KOMPAK melakukan kampanye, *lobby*, seminar, lokakarya, serta menjalin jaringan kerja nasional maupun internasional.

Pengorganisasian Drop-in Center

Ujung tombak dalam melakukan pemberdayaan buruh anak adalah dengan memaksimalkan fungsi-fungsi *open-house*, yaitu rumah persinggahan buruh anak sebagai tempat rekreasi yang dimiliki secara bersama-sama. *Field organizer* tinggal di tengah komunitas buruh dengan maksud supaya dekat dengan buruh anak. *Field organizer* bertugas di setiap *open-house* secara *full time*

yang bertugas sebagai penampung, pendamping buruh anak yang membutuhkan.

Dengan berbagai kegiatan yang telah dilakukan tersebut, KOMPAK sadar bahwa kegiatan tersebut masih sangat kecil. Kendati demikian dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan buruh anak, pemerintah diharapkan agar bersikap terbuka menerima kenyataan bahwa di Indonesia masih mempekerjakan anak-anak. Dengan telah diakuinya keberadaan buruh anak ini, diharapkan akan dibuat peraturan perundangan yang dapat mengakomodasikan kepentingan buruh anak. Bukan pada kebijakan pelarangan anak untuk bekerja yang telah nyata-nyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan yang muncul hanya manipulasi pemakaian tenaga anak sehingga mempersulit perlindungan buruh anak itu sendiri.

Kesimpulan dan Usulan Agenda Advokasi

Buruh anak masih tetap menjadi masalah sampai saat ini, sehingga masih sangat dibutuhkan perhatian serius dalam penanganannya. Upaya ini seiring dengan kecenderungan semakin banyaknya anak yang masuk ke sektor industri, dengan kecenderungan ini bisa jadi akan memperluas proses dehumanisasi anak-anak

Permasalahan buruh anak akan semakin penting jika dikaitkan dengan era pembangunan Indonesia sekarang ini, yakni seperti yang didengungkan oleh pemerintah bahwa sumber daya manusia (SDM) adalah keharusan. Namun dengan banyaknya kasus-kasus yang muncul di tengah masyarakat, utamanya dalam dunia ketenagakerjaan menjadi fakta bahwa masalah buruh anak masih merupakan masalah serius.

Buruh adalah bagian masyarakat yang mengalami masalah SDM, terlihat jelas dengan masih mendominasinya tenaga kerja yang tidak trampil daripada yang terampil. Dengan kata lain bahwa sampai saat ini 'buruh murah' masih merupakan andalan dalam rangka kompetisi penanaman modal di Indonesia. Semakin nyata dengan melihat fakta bahwa buruh juga masih terbagi

antara buruh dewasa dan buruh anak, kemudian jika dipilah lagi ternyata bahwa buruh perempuan lebih menderita dari laki-laki. Demikian juga buruh anak pada posisi paling bawah.

Melihat kenyataan demikian maka perlu dan sangat mendesak bagi kita untuk mengagendakan berbagai langkah-langkah advokasi bersama dengan:

1. Mendesak pemerintah untuk membuat peraturan perundangan yang melindungi anak.
2. Mempertanyakan kelanjutan hasil diskusi rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Buruh anak yang pernah dibicarakan dengan NGO pada tahun 1993.
3. Melakukan studi tentang *social clause* dalam rangkaantisipasi akan diberlakukannya *social clause* dalam perdagangan bebas.
4. Membentuk Forum NGO yang khusus menangani buruh anak sebagai wadah advokasi bersama.

Perundang-undangan yang Tegas dalam Perlindungan Buruh Anak

Oktoviana sp.
Yayasan Pondok Kreatif, Medan

Pengantar

Buruh anak adalah masalah yang tidak berdiri sendiri. Keterkaitannya dengan berbagai masalah seperti masalah ekonomi, sosial, dan budaya adalah aspek yang mendukung keberadaan buruh anak. Selama ini dari segi sosial-budaya, masyarakat memandang seorang anak yang bekerja adalah anak yang berbakti kepada orang tua, sehingga anak yang terjun ke dunia kerja tidak dipandang sebagai masalah serius.

Pembangunan di segala bidang yang menitikberatkan pada aspek ekonomi sebagai prioritas, segala daya upaya semua hal dicurahkan untuk nilai-nilai ekonomi. Tidak ketinggalan juga dengan soal anak-anak, pembangunan telah pula memperlihatkan keberingasannya terhadap dunia anak. Sebagai elemen dari pembangunan itu sendiri maka anak dari segi ekonomi sering dipandang sebagai aset yang dapat memberi keuntungan, sehingga segala sesuatunya selalu dihargai secara komersial.

Intervensi pembangunan telah merembes kepada keluarga sebagai unit kesatuan terkecil. Sebagai contoh adalah konsekuensi dari pembangunan yang telah menimbulkan peningkatan kebutuhan biaya hidup, hingga akhirnya menurunkan penghargaan terhadap anak dan anak akhirnya telah dipandang sebagai sumber ekonomi keluarga

Kehadiran anak-anak yang bekerja, baik di sektor formal maupun informal dapat dikatakan sebagai awal timbulnya permasalahan. Dalam usia dini mereka telah dieksploitasi demi kepentingan ekonomi belaka, sehingga kasus-kasus pemerkosaan, pelecehan, jam kerja yang berkepanjangan, serta gangguan

penyakit adalah merupakan situasi rawan yang selalu mengitari mereka.

Anak-anak yang telah terhantar memasuki dunia kerja, utamanya di sektor formal harus berproses mengikuti situasi di lingkungan tempat kerjanya. Jam kerja yang panjang telah mengakibatkan mereka tidak mempunyai kesempatan untuk bermain, mendapat kasih sayang, berkeaktivitas secara alamiah dan bergaul sesama anak. Masa kanak-kanak mereka yang tidak akan pernah berulang kembali pada akhirnya akan lenyap secara perlahan. Sementara itu usaha-usaha perlindungan selama ini yang tampaknya terlihat cukup baik, seperti telah banyak dilakukan oleh NGOs maupun pemerintah pada dasarnya belum menyentuh permasalahan.

Persoalan Anak Dalam Proses Pembangunan di Indonesia

Sebuah peristiwa, “Dua puluh orang buruh dewasa dan buruh anak dirawat dalam satu unit rumah sakit karena kecelakaan kerja”. Peristiwa ini ‘hanya’ merupakan sebuah kasus yang pernah ditemui di lapangan. Realitas ini juga merupakan potret buram buruh anak yang bekerja di sektor industri. Dengan resiko yang demikian itu, situasi apakah yang telah mengantar mereka bekerja menjadi buruh pabrik dalam usia dini?

Kita sadari bahwa anak adalah amanat penerus cita-cita bangsa, sehingga sebagai potensi penerus cita-cita bangsa maka anak harus dibiarkan tumbuh dan berkembang secara normal. Namun dalam realitasnya tidak semua anak dapat menjalani kehidupan yang layak, apalagi sebagai seorang anak yang tumbuh wajar sesuai dengan dunianya.

Masyarakat yang umumnya hidup dari sektor pertanian, tidak terlepas juga dari intervensi pembangunan. Pembangunan telah mengakibatkan terjadinya penggusuran-penggusuran, biaya hidup yang makin tinggi dan sebagainya, sehingga konsekuensi ini mau tidak mau harus diterima oleh masyarakat. Pembangunan ‘fisik’ yang melanda kota-kota besar telah

menimbulkan daya tarik tersendiri bagi masyarakat pedesaan, sehingga masyarakat pedesaan yang berharap dapat memperbaiki taraf hidup berbondong-bondong menuju perkotaan. Mereka berjuang mempertahankan hidup di kota dengan pengalaman dan pendidikan yang minim, dengan kondisi itu akhirnya mereka begitu mudah tergiring bekerja sebagai buruh-buruh kasar bangunan maupun buruh di sektor industri. Pertumbuhan angka migrasi di perkotaan ini pun kian pesat hingga akhirnya mengakibatkan surplus tenaga kerja di kota, sementara di pedesaan sendiri mengalami kekurangan tenaga kerja.

Sanggupkah mereka mengatasi biaya hidup di kota yang demikian tinggi? Dengan penghasilan yang minim di kota, sulit bagi migran dari pedesaan untuk dapat mempertahankan hidup dengan biaya hidup yang tinggi. Persoalan di atas biasanya diatasi dengan dipandangnya anak-anak yang ada di dalam keluarga sebagai sumber penghasilan.

Celaknya anak yang telah dijadikan tenaga kerja ini ternyata menimbulkan permasalahan serius, karena di dalam melakukan pekerjaannya itu anak tidak pernah mendapat perlakuan istimewa sebagai seorang anak yang mestinya dilindungi. Kondisi ditunjukkan oleh anak-anak yang bekerja di sektor formal seperti di pabrik, mereka seringkali diperlakukan tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai anak. Anak yang bekerja di pabrik telah dijadikan elemen-elemen produksi yang layak dieksploitasi demi kepentingan-kepentingan ekonomi.

Hasil pengumpulan data Yayasan Pondok Rakyat Kreatif (YPRK) terhadap anak yang bekerja di sektor formal pada tahun 1993, diketahui bahwa anak-anak tersebut berasal dari keluarga berpenghasilan rendah — Rp50.000,00 sampai Rp100.000,00 — dengan jumlah anggota keluarga lima sampai tujuh orang. Pada umumnya orang tua anak-anak tersebut bekerja sebagai buruh tani, buruh perkebunan, tukang beca, buruh pabrik, tukang cuci, sopir, pembantu, penggali parit, dan tukang sapu.

Anak-anak yang bekerja tersebut berumur antara 12 sampai 16 tahun, rata-rata putus sekolah ketika masih duduk di bangku

kelas lima Sekolah Dasar (SD). Sedangkan penghasilan anak-anak tersebut hampir 80 persennya diserahkan kepada ibunya dan sisanya digunakan untuk keperluan sendiri. Sementara sisa uang tersebut oleh anak-anak pada umumnya dibelanjakan untuk pakaian, jajan, perhiasan, dan alat-alat kecantikan lainnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masa kanak-kanaknya merupakan masa yang terpenting bagi pertumbuhan seorang anak. Pada masa tersebut anak mengalami sosialisasi dan proses pengembangan diri untuk menjadi dewasa. Masa kanak-kanak yang telah dilalui tentunya akan sangat berpengaruh besar pada pembentukan sikap hidup pada masa mendatang. Demikian pula bila anak kemudian dihadapkan pada persoalan kehidupan dalam dunia kerja, secara alami lingkungan kanak-kanaknya akan ikut pula mempengaruhi pembentukan sikap. Sementara itu di dalam dunia kerja seorang anak akan berproses dan belajar ide-ide, peraturan, norma-norma, gagasan maupun tindakan yang sesuai dengan lingkungan kerjanya. Pola pergaulan, situasi, cara kerja anak di pabrik pada gilirannya tentu mempengaruhi pula pembentukan jiwa anak dan watak anak.

Sungguh memprihatinkan sekali pembangunan yang telah menghasilkan manfaat, namun pada prosesnya ternyata tidak bersikap ramah terhadap dunia anak-anak yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Kasus-kasus buruh anak seperti tangan terpotong mesin, terlihat kalah oleh gaung kepentingan yang dianggap lebih besar.

Proses Marjinalisasi, Penindasan, dan Diskriminasi

Dalam setiap pembicaraan yang membahas buruh anak sering muncul pertanyaan, apa salahnya jika seorang anak bekerja? Bahkan sebagian masyarakat berpendapat bahwa anak yang bekerja adalah anak yang berbakti.

Secara umum dapat dikatakan bahwa buruh anak tumbuh dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Orang tua yang bekerja

sebagai buruh kasar dengan anggota keluarga yang terkadang berjumlah lima sampai delapan orang, setidaknya membutuhkan biaya hidup yang tinggi. Untuk menanggulangi lilitan kemiskinan yang melanda keluarga itu maka mau tidak mau anak-anak disertakan sebagai elemen pendukung.

Di satu pihak anak-anak yang dipekerjakan memang dapat meringankan beban orang tua, tetapi di pihak lain permasalahannya menjadi berbeda ketika seorang anak secara total disuruh bekerja untuk mencari nafkah. Sadar atau tidak sadar anak telah mengorbankan kenormalan pertumbuhannya, kesehatannya, dan hak-haknya sebagai anak.

Seperti nasib seorang buruh anak bernama Misnah, dia secara tidak sadar telah dirampas haknya sebagai anak. Sedangkan Misnah tidak mampu untuk melawannya, demikian pula dengan orang tuanya yang miskin dan bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan.

Misnah, berasal dari keluarga miskin, sudah sejak usia 11 tahun bekerja di pabrik udang. Setiap pagi sejak pukul enam tiga puluh pagi, Misnah bersama dengan teman-teman buruh anak lainnya selalu menunggu bis jemputan pabrik di pinggir jalan. Anak-anak tersebut kemudian diangkut ke Kawasan Industri Medan untuk dipekerjakan. Kemudian pada pukul enam sore, Misnah kembali diantar mobil pabrik pulang ke Tanjung Morawa, tempat tinggal Misnah.

Di akhir minggu dia memperoleh upah yang kemudian disetorkan kepada orang tua. Rutinitas itu berjalan setiap hari dan kini Misnah telah berusia 15 tahun, namun hingga kini dia masih tetap bekerja sebagai buruh.

Kisah Misnah di atas adalah contoh kasus yang begitu umum terjadi di kalangan buruh. Kisah-kisah sama banyak dialami juga oleh anak yang sebaya dengan Misnah, utamanya anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Tidak ada pilihan lain bagi anak seperti Misnah untuk menyokong ekonomi keluarganya kecuali dengan ikut bekerja.

Secara kultural masyarakat memandang anak adalah potensi keluarga yang wajib berbakti kepada orang tua. Anak yang bekerja justru dipandang sebagai anak yang berbakti. Dengan budaya-budaya itu pula maka posisi anak — sebagai seorang anak — yang mempunyai hak dan patut dilindungi menjadi terabaikan.

Demikian pula halnya dengan pembangunan yang berorientasikan pada pertumbuhan ekonomi semata, juga telah berperan besar dalam memarjinalisasikan anak. Demi kepentingan ekonomi belaka maka kecenderungan memilih buruh anak untuk dipekerjakan, merupakan pilihan-pilihan tersendiri untuk meminimalkan biaya produksi. Upah yang dapat dibayar murah, badan yang masih sehat, penurut, tidak banyak menuntut adalah andalan pertimbangan penting bagi pengusaha. Dengan pertimbangan ini anak dianggap memiliki potensi yang besar untuk dieksploitasi demi kepentingan ekonomi belaka. Sebaliknya anak-anak yang secara tidak sadar telah dikondisikan oleh budaya, berbagai kepentingan pengusaha dan juga kepentingan ekonomi yang lebih besar lainnya, justru mendorong anak untuk secara sukarela dimarjinalkan.

Seperti kisah Tari, seorang buruh anak dari PT. Bola Lampu, dengan bangga dia menceritakan pengalamannya ketika sedang melamar untuk bekerja sebagai buruh. Tari bercerita bahwa ia bersama empat orang temannya berhasil masuk kerja karena memalsukan umurnya yang baru 12 tahun menjadi 19 tahun. Tari sendiri menganggap ini merupakan suatu kemujuran, karena dengan demikian dia dapat bekerja dan dapat membantu ekonomi keluarganya.

Pengusaha yang memang sedang mengincar tenaga anak-anak, menganggap sah saja soal manipulasi umur tersebut, karena keinginan memalsukan umur justru datang dari anak-anak sendiri. Dengan kondisi ini maka pengusaha tinggal menutup mata, berbuat seolah-olah tidak tahu dengan umur sebenarnya. Utamanya bila ada inspeksi-inspeksi yang dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) terhadap pelanggaran peraturan tenaga kerja, akan dianggap sebagai persoalan sederhana oleh pengusaha. Inspeksi Depnaker ke pabrik, oleh peng-

usaha cukup dengan menunjukkan daftar nama dan umur yang dipalsukan itu. Cara lain yang biasa ditempuh — dan terkadang sangat keji — untuk menghindarkan inspeksi, adalah menyimpan buruh anak ke dalam gudang atau musholla untuk beberapa saat.

Dengan keadaan yang dilematis itu anak menjadi tidak mempunyai alternatif pilihan lain, di satu sisi anak dilarang bekerja sedangkan di sisi lain anak membutuhkan pekerjaan tersebut. Sebaliknya pengusaha mendapat keuntungan yang berlipat ganda dengan mempekerjakan anak tersebut, pengusaha pun mempunyai segudang alasan untuk menekan anak yang dalam posisi lemah tersebut. Anak selalu dalam posisi lemah jika ingin melakukan perlawanan, sedang bila memilih diam saja maka anak mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dalam bekerja.

Di antara gemuruhnya suara mesin-mesin besar, buruh anak tidak mendapat hasil dan perlakuan yang sebanding dengan tetesan keringatnya ketika sedang bekerja. Tidak ada jaminan Astek, tidak ada jaminan keselamatan diri kalau pulang malam hari, bahkan telah menjadi hal yang 'lumrah' bagi buruh anak. Belum lagi tidak adanya jaminan untuk masa depan, karena anak-anak tersebut hanya ditempatkan sebagai buruh harian atau buruh borongan.

Dari hasil kunjungan lapangan Yayasan Pondok Rakyat Kreatif dan keterangan dari buruh anak, diketahui bahwa buruh anak itu bekerja di ruangan panas, berdebu, kotor, dingin (bagian pengalangan), bising dan di bagian yang membutuhkan ketelitian mata. Lebih tragis lagi, dalam melakukan pekerjaannya itu buruh anak sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari pengusaha. Buruh anak begitu gampang dicaci, dihina, dipukul, dijambak bahkan dipecat. Di samping itu anak-anak yang bekerja di dalam pabrik selalu bergaul atau berinteraksi dengan buruh dewasa, akibatnya anak-anak lebih cepat 'dewasa' ketimbang dengan umur sebenarnya.

Secara umum, jika ditinjau dari segi perkembangan seorang anak, situasi kerja tersebut tentu akan berpengaruh terhadap per-

kembangan mental, fisik dan kepribadian anak. Buruh anak yang hanya sedikit mempunyai pendidikan dan pengalaman cenderung tidak mempunyai kesadaran akan hak-haknya.

Pengusaha dipandang sebagai sumber kebutuhan primer untuk gantungan hidup, sehingga mereka harus rela menjalankan peraturan-peraturannya. Hingga akhirnya anak takut kehilangan pekerjaan dan akibatnya mereka selalu tunduk pada penindasan yang dialaminya.

Undang-undang yang seharusnya melindungi kepentingan buruh anak, dalam kenyataannya masih bertentangan dan tidak berlaku tegas. Sanksi yang ditimpakan atas pelanggaran sistem kerja kepada buruh anak begitu ringan. Demikian juga kasus-kasus yang selama ini dibawa ke pihak yang berwenang, dapat dikatakan tidak pernah mendapat penanganan serius. Indikasi ini menunjukkan bahwa sektor industri yang berorientasi ke pertumbuhan ekonomi, ternyata lebih bernilai dan berharga ketimbang kepentingan seorang anak.

Pembelaan Hak Anak

Dalam mendampingi buruh anak, YPRK — sebagai salah satu Ornop — melakukan pendekatan yang bersifat dialog. Di dalam pendekatan tersebut turut dilibatkan pihak-pihak yang dekat dengan buruh anak, seperti orang tua, keluarga, saudara, tetangga, teman dan buruh dewasa. Cara-cara yang ditempuh dalam usaha pendekatan ini adalah dengan melakukan kunjungan ke tempat mereka secara rutin.

Di dalam kunjungan ke tempat mereka, biasanya aktivis YPRK melakukan dialog dengan orang tua buruh anak dan juga orang-orang yang dianggap dekat dengan buruh anak. Di samping itu pendekatan struktural juga dilakukan, baik di tingkat atas, menengah maupun bawah. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, sehingga dapat membawa satu perubahan terhadap keberadaan posisi buruh anak.

Sedangkan bentuk strategi yang dilakukan untuk memberdayakan buruh anak, selama ini ditujukan untuk memulihkan perampasan hak azasi anak dan eksploitasi terhadap buruh anak. Dalam pelaksanaannya, YPRK dengan buruh anak bersama-sama memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh buruh anak. Di dalam proses pendampingan itu diharapkan dapat membuka cakrawala baru bagi orang tua dan buruh anak itu sendiri. Dalam melakukan pendampingan tersebut, metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

Komunikatif

Mengadakan komunikasi aktif kepada semua pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat maupun kepada buruh-buruh anak itu sendiri. Pelaksanaannya dilakukan melalui penyebaran informasi, teater, video, buletin, kunjungan ke rumah-rumah buruh anak dan kunjungan ke badan pemerintahan.

Diskusi

Melalui diskusi-diskusi antara aktivis dengan buruh anak yang bersifat dialogis, dapat lebih dipahami secara mendalam permasalahan anak yang bekerja di sektor industri. Seperti, Apa yang menyebabkan mereka bekerja? Permasalahan apa yang terjadi di dalam pabrik? Apa yang mereka harapkan? dan Apa permasalahan yang selalu dihadapi di rumah? Dari situ muncul pengungkapan, tukar-menukar pikiran serta pemahaman baru, sehingga menjadi jembatan untuk kemudian secara bersama-sama mencari jalan keluar.

Diskusi mengenai permasalahan anak yang bekerja tidak melulu dilakukan hanya dengan buruh anak, namun juga kepada masyarakat, kalangan NGOs dan pemerintah turut serta dilibatkan. Tujuannya adalah agar permasalahan buruh anak dapat menjadi perhatian semua pihak, sehingga perlindungan terhadap buruh anak dapat terlaksana.

Pendidikan Alternatif

Pendidikan alternatif dilakukan dalam bentuk seni, seperti melukis, menari, permainan, bernyanyi dan berteater. Pendidikan melalui pendidikan alternatif diyakini dapat melepaskan anak dari rasa jenuh dan letih dari rutinitas selama bekerja di dalam pabrik. Melalui pendidikan alternatif ini anak juga akan lebih gampang memahami diri dan lingkungannya, selain itu anak dapat bermain dan sekaligus mengembangkan kreatifitasnya.

Kegiatan melukis misalnya, di dalam lukisannya anak akan bercerita mengenai situasi tempat dia bekerja, situasi di rumah dan termasuk perlakuan yang diterimanya. Seorang anak akan melukis bagaimana ketika dia sedang dimarahi mandor perusahaan, mulut mandor akan dilukiskan lebih besar dari anggota tubuh lainnya.

Selain melakukan pendidikan alternatif, YPRK juga mengadakan *counselling* dan penerbitan buletin, tujuannya untuk menjalin pemahaman, komunikasi antar buruh anak, orang tua dan *organizer*. Secara lebih jelas aktivitas program ini meliputi:

- Pengorganisasian, mengadakan pertemuan di perkumpulan buruh anak, diskusi masalah perburuhan serta tukar-menukar pengalaman sesama buruh anak dari berbagai pihak.
- Konseling, mengadakan kunjungan lapangan ke rumah-rumah buruh anak, ke lingkungan pabrik, pertemuan di sekretariat. Selama dalam pertemuan dan kunjungan tersebut, dilakukan pula penyebaran informasi mengenai masalah anak dan perburuhan (membagi klipings koran, buletin, majalah dan UU perburuhan).
- *Empowering*, bertujuan memperkuat posisi buruh anak .
- Pendidikan alternatif melalui media seni, tujuannya adalah untuk merangsang kreativitas dan bakat anak di samping menghilangkan rasa jenuh dan melatih buruh anak bermain sambil belajar Undang-undang melalui simulasi permainan.

Untuk mengangkat realitas buruh anak pada tingkat yang lebih luas maka publikasi dan jaringan kerja terus dilakukan, baik dilakukan melalui media massa, buletin, video, majalah, surat menyurat maupun tukar-menukar informasi. Diharapkan dengan cara ini masalah yang terjadi pada buruh anak akhirnya mendapat perhatian berbagai pihak.

Dalam beberapa hal pendekatan pemberdayaan di atas, telah kelihatan adanya perubahan yang cukup berarti. Indikator perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Cara berpikir buruh anak menjadi lebih kritis.
- Rasa solidaritas sesama buruh anak semakin meningkat.
- Media massa telah mengangkat masalah-masalah buruh, sehingga masyarakat luas mengetahuinya.
- Anak dapat terlepas dari rasa jenuh dan penat.
- Buruh anak telah terangsang untuk berkeaktivitas melalui tulisan-tulisan tentang diri dan keadaan.
- Pada hari Minggu buruh anak diliburkan.

Penghambat Pemberdayaan

Pendekatan terhadap buruh anak yang bekerja di sektor industri sangat berbeda dengan pendekatan terhadap buruh dewasa. Upaya-upaya pemberdayaan, perlindungan dan advokasi harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak. Orang tua dan buruh dewasa merupakan salah satu jalan utama untuk mengadakan pendekatan terhadap buruh anak.

Upaya di atas berkaitan dengan kebiasaan anak yang lebih sering bergaul dengan sesama buruh dan hari-hari kerja yang begitu panjang di pabrik, sehingga mereka terisolasi dalam pergaulan dan mengakibatkan buruh anak dihindangi oleh unsur kecurigaan yang begitu besar. Demikian pula terhadap orang tua buruh anak, *organizer* juga harus bersikap hati-hati menghadapi sikap orang tua yang merasa bersalah karena telah mempekerjakan anak-anaknya. Biasanya orang tua yang demikian itu tidak menyukai anaknya bergaul dengan orang lain.

Hal lain yang sering mengusik buruh anak dan keluarganya adalah isu-isu SARA dan penculikan, sehingga hal ini merupakan hambatan dan masalah utama dalam menjalankan berbagai aktivitas dan program. Di samping itu intimidasi dari pihak pengusaha juga terus menteror buruh anak, karena aktivitas buruh anak di luar jam kerja. Upaya-upaya intimidasi juga dialami oleh *organizer* yang mendampingi buruh anak, baik berupa pengiriman orang-orang yang tidak dikenal ke sekretariat maupun dengan cara-cara lain.

Dalam menghadapi kendala itu, maka memberi pemahaman tentang pekerjaan yang dilakukan NGOs kepada setiap orang sangat diperlukan. Demikian pula dengan upaya untuk melibatkan pemuka agama sangat diperlukan untuk menangkal isu yang menyerang buruh anak.

Strategi Advokasi Buruh Anak

Masalah buruh anak pada dasarnya bersumber pada dua arah, *pertama* yaitu masalah buruh anak di dalam pabrik dan *kedua* masalah buruh anak di rumah. Masalah-masalah tersebut dibicarakan, didiskusikan di YPRK sebagai NGO yang *committed* dengan masalah buruh anak. Masalah-masalah yang dibicarakan adalah hak-hak yang akan diperjuangkan di rumah dan di pabrik.

Untuk itu YPRK melakukan pendekatan berupa *monitoring*, baik di rumah maupun di pabrik. *Monitoring* ke rumah digunakan untuk berbicara dengan buruh anak secara kekeluargaan. Sedang *monitoring* ke pabrik dilakukan untuk mendata penindasan-penindasan yang terjadi. Selanjutnya dilakukan aksi berupa demonstrasi, perlindungan hukum ke Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI), menyurati pengusaha, lembaga regional, lembaga internasional dan mengadakan berbagai kampanye.

Monitoring Buruh Anak

Ke rumah → melakukan kunjungan dan berbicara dengan buruh anak secara kekeluargaan.

Ke pabrik → mendata penindasan-penindasan yang terjadi.

Masalah-Masalah Buruh Anak

Di Pabrik	Di Rumah
<ul style="list-style-type: none">• Kondisi kerja yang terus - menerus berdiri atau terus-menerus duduk• Tidak ada jaminan keselamatan kerja• Ruang kerja yang kotor, polusi, panas, dingin• Perlakuan semena-mena• Pelecehan seksual• Upah rendah• Kerja malam• Jam kerja yang panjang• Pemaksaan lembur• Tidak didaftar di Jamsostek	<ul style="list-style-type: none">• Mengerjakan aktivitas rumah tangga sehabis kerja, cuci piring, masak, menjaga adik, mengepel dll.• Dipaksa bekerja untuk membiayai orang tua• Tidak ada waktu bermain, membaca, rekreasi

Peran Pemerintah, SPSI, dan Lembaga Internasional

Peran pemerintah, SPSI dan, lembaga internasional sebenarnya perlu lebih ditingkatkan lagi guna mengatasi masalah anak di sektor industri ini. Sedangkan saat ini peran mereka masih dirasa kurang, hal ini dapat dilihat dari uraian tentang peran-peran mereka.

Pemerintah

Peran pemerintah terhadap masalah buruh anak dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang anak, jumlah yang diciptakan untuk perlindungan anak pun begitu banyak. Ada peraturan pemerintah, Undang-undang, Keputusan bersama. Namun sayangnya peraturan perundang-undangan untuk anak yang secara khusus bekerja di sektor industri belum ada ketentuan yang tegas, seperti UU no 1 tahun 1951 yang melarang anak bekerja, sangat bertolak belakang dengan Permen 01/78 yang mengizinkan seorang anak bekerja selama empat jam satu hari.

Namun kenyataannya seorang anak tidak pernah dipekerjakan selama empat jam sehari, malahan jam kerja buruh anak disamakan dengan jam kerja buruh dewasa. Sedangkan pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut, tidak pernah merasa perlu mengikuti perundang-undangan tersebut.

Di tingkat nasional masalah buruh anak masih belum menjadi prioritas utama, karena masalah-masalah buruh anak tenggelam oleh gaung kepentingan ekonomi. Pengusaha dalam hal ini dianggap mitra yang tepat diajak bekerjasama, sehingga pada puncaknya pengusaha merasa memiliki kebebasan melakukan eksploitasi terhadap buruh anak.

Kurangnya perhatian dan peran pemerintah untuk mengatasi masalah pekerja anak dapat dilihat dari diterapkannya undang-undang tentang anak. Tidak adanya tindakan tegas berupa sanksi oleh pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan, jelas-jelas menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap perusahaan. Hal tersebut ditambah lagi dengan mulai besarnya perhatian dunia internasional terhadap masalah buruh anak, sehingga membuat berbagai pihak harus hati-hati dalam menyikapi masalah anak dan buruh anak.

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI, tugas utamanya adalah membela dan memperjuangkan nasib anggotanya. Sayangnya SPSI belum mempunyai perhatian khusus terhadap masalah buruh anak. SPSI pun makin kehilangan tenaganya, karena banyak pengurus-pengurus SPSI di tingkat pabrik umumnya dipilih dan diangkat oleh pengusaha. Dengan kondisi ini akhirnya kepentingan pengusahalah yang akan diutamakan. Sedangkan tentang SPSI, yang diketahui buruh adalah setiap bulan gaji mereka dipotong sebesar Rp 1000,00 untuk SPSI.

Lembaga Internasional

Masalah anak dan buruh anak di tingkat internasional telah menjadi agenda penting. Permasalahan anak telah mendapat sorotan yang luas, seperti pelecehan seks, buruh anak, kesehatan dan pemerkosaan. Perhatian lembaga-lembaga internasional terhadap buruh anak juga mendapat porsi yang cukup besar. Lembaga internasional seperti ILO dianggap kehadirannya cukup penting di setiap negara, utamanya di negara-negara yang sedang berkembang walau program-program kerjanya masih terbatas sebatas kerja sama dengan NGOs dan pemerintah untuk perlindungan buruh anak dan anak. Hadirnya lembaga-lembaga internasional di dalam suatu negara sedikit banyak akan mempengaruhi perlindungan terhadap anak.

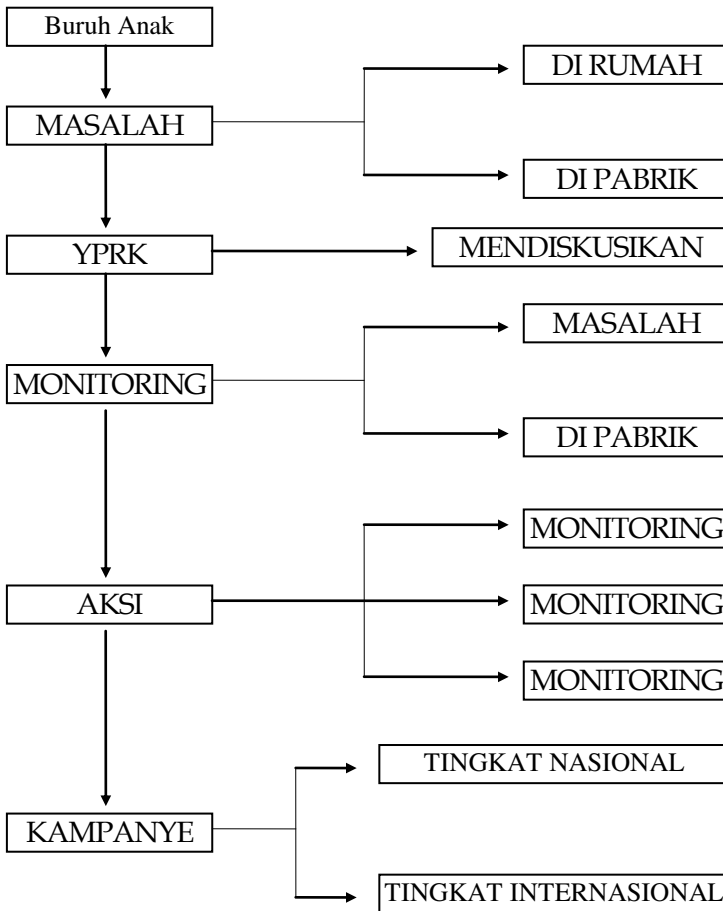
Gencarnya kampanye-kampanye lembaga internasional terhadap masalah anak merupakan bukti kepedulian yang lebih besar. Isu buruh anak yang sekarang telah diangkat oleh negara-negara berkembang juga adalah hasil peran lembaga-lembaga internasional tersebut.

Usulan Agenda Advokasi

- Membentuk *team* inventarisasi masalah buruh anak.
- Membentuk *team* melakukan investigasi pada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan buruh anak.

- Mendesak pemerintah membuat perundangan buruh anak.
- Mempercepat pengawasan terhadap pabrik yang mempekerjakan buruh anak.
- Mengadakan kampanye secara nasional dan internasional.
- Kampanye boikot dalam negeri.

Perumusan Kegiatan Advokasi Buruh Anak di Sektor Industri



Pendampingan Pekerja Anak Perempuan

Anny Simandjuntak
LWRA-DPP SPSI

Latar belakang

Menjamurnya industri di kota-kota besar maupun di pedesaan, telah mengakibatkan terserapnya tenaga kerja dari daerah setempat ke tempat tempat lain. Tenaga kerja yang terserap bukan hanya kaum laki-laki saja, namun juga banyak perempuannya. Bahkan banyak di antaranya pekerja anak di bawah umur, yakni berusia antara 10 sampai 14 tahun dan mayoritas perempuan.

Fenomena pekerja anak ini merupakan bagian dari dunia perburuhan yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Akibat keterpaksaan mereka untuk bekerja, sehingga mengakibatkan terampasnya hak dan kewajiban mereka sebagai anak. Sebagai aset generasi penerus keluarga maupun bangsa dan negara, di usianya yang dini mereka harus kehilangan kesempatan untuk bersekolah, bermain dan sebagainya.

Pekerja anak hadir baik di sektor formal maupun sektor informal. Masalah pekerja anak ini sesungguhnya sangat kompleks dan sangat terkait dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, hukum dan politik yang kita hadapi saat ini. Dengan kenyataan yang ada ini kita tidak bisa tinggal diam begitu saja, melakukan sesuatu bagi anak-anak yang terpaksa bekerja adalah jauh lebih penting. Tujuannya agar mereka mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum secara universal, baik haknya sebagai anak maupun haknya sebagai pekerja.

Didasarkan pada hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa:

- Pada umumnya pekerja anak bekerja lebih dari 40 jam per minggu, kelebihan jam kerjanya seringkali tidak dihitung sebagai lembur. Lebih celaka lagi, mereka diharuskan bekerja di waktu libur resmi, seringkali upahnya dipotong bila mereka tetap tidak mau bekerja pada saat itu libur resmi. Dengan fakta ini jelas tidak sesuai dengan Kep.Menaker No. 11/1987, pasal 4 yang bunyinya; "Pekerja Anak tidak boleh dipekerjakan lebih dari 4 jam sehari dan pada malam hari, serta berhak menerima upah sesuai dengan peraturan yang berlaku".
- Pekerja anak umumnya mempunyai latar belakang pendidikan rendah atau *drop-out* SD dan SMP, bahkan juga ditemukan buta huruf. Akibat miskinnya pengetahuan serta ketrampilan yang dimiliki pekerja anak, mereka menjadi sangat mudah untuk dieksploitasi. Eksploitasi ini ditandai dengan memberikan upah yang sangat minim, yaitu berkisar Rp1.570,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Sistem pengupahan ini jelas bertentangan dengan kebijakan Upah Minimum Regional Jawa Barat (UMR-JABAR) yang sejak Januari 1995 sudah mencapai Rp4.600,00 (empat ribu enam ratus rupiah).
- Dari segi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (*Occupational Safety and Health*), pengamatan menunjukkan bahwa kebanyakan di antara mereka bekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri. Gizi dan kesehatan mereka kurang mendapat perhatian sehingga banyak ditemukan penyakit-penyakit anemia, penyakit kulit, batuk, pusing, sesak nafas, flu, kelelahan dll.
- Sebagian besar perusahaan belum melaksanakan Program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).

Gambaran permasalahan di atas merupakan fenomena yang kontradiktif dengan upaya pemerintah dalam rangka me-

tingkatkan sumber daya manusia. Apalagi bila dikaitkan dengan penerapan UU No. 4 /1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa anak berhak dijamin kesejahteraan untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, serta intelegensi. Apalagi Indonesia sebagai negara yang mempunyai tujuan mencerdaskan bangsa, adanya masalah di atas akan menjadi ancaman yang sangat serius dan memerlukan alternatif yang tepat.

Konvensi hak anak yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia, mencakup antara lain; hak untuk memelihara jati diri; hak atas pendidikan; hak untuk bermain dan berekreasi; hak untuk memperoleh perlindungan; serta hak dasar anak yang merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan konvensi hak anak di atas, pemerintah pun menggulirkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dengan sasaran utamanya anak berusia antara 12-15 tahun. Pekerja anak pun tidak luput dari program tersebut, karena mereka sangat memerlukan pelayanan pendidikan yang layak dan ketrampilan yang memadai untuk menunjang masa depannya. Dari sisi itulah yang sekarang dapat kita lakukan bersama. Keberhasilan menumbuhkan keberdayaan pekerja anak sangat ditentukan oleh kepedulian dan sikap mental para orang dewasa, utamanya yang terkait langsung dalam dunia ketenagakerjaan, seperti pemerintah (Depnaker), Pengusaha, Serikat Pekerja, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerhati dan masyarakat lainnya.

Sadar akan tanggung jawab tersebut maka SPSI melalui Lembaga Wanita, Remaja dan Anak DPP SPSI, bekerja sama dengan **International Programme for the Elimination of Child Labour International Labour Organization** (Program Internasional Penghapusan Buruh Anak, IPEC-ILO), melakukan aksi dengan mendirikan Pondok Pekerja Anak. Pada bulan Juli 1993 Pondok Pekerja Anak Pertama hadir di daerah Bantar Gebang Bekasi, lalu pada bulan Desember

1994 Pondok Pekerja Anak II hadir pula di Majalaya Kabupaten Bandung.

Pondok Pekerja Anak

Maksud dari Pondok Pekerja Anak adalah suatu tempat kegiatan disertai dengan pekerja sosial, sekaligus merupakan tempat bagi pekerja anak untuk berkumpul dan melakukan kegiatan bersama; mulai dari menonton TV dan bermain, berbagai penyuluhan, keterampilan menjahit, Kejar Paket A, Kejar Paket B, pelayanan kesehatan, gizi, taman bacaan, pengajian, kesenian, olah raga serta pembinaan maupun bimbingan kepada pekerja anak agar mereka mempunyai kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai pekerja anak dan sebagai anak. Pondok Pekerja Anak ini merupakan salah satu model atau cara penanganan masalah yang dihadapi oleh Pekerja Anak, utamanya di sektor Industri. Sedangkan tujuan Pondok Pekerja Anak sebagai berikut:

1. Mengembangkan kemampuan berpikir dan kreatifitas Pekerja Anak melalui penyediaan sarana dan prasarana bermain dan rekreasi;
2. Meningkatkan kesadaran bagi pekerja anak, orangtua atau keluarga dan masyarakat tentang hak-hak anak/pekerja anak, seperti hak untuk menikmati masa kanak-kanak, hak mendapatkan pendidikan formal maupun non formal, hak normatif pekerja dan lain-lain;
3. Meningkatkan pengetahuan pekerja anak dan keluarganya tentang gizi, kesehatan, hukum ketenagakerjaan dan lain-lain, melalui penyuluhan dan pelayanan;
4. Mempersiapkan kemampuan pekerja anak untuk hidup mandiri di masa mendatang, melalui pendidikan non formal dan kursus-kursus ketrampilan.

Jadi tujuan dari Pondok Pekerja Anak ini adalah untuk membantu para pekerja anak dengan mendirikan Pondok Pekerja Anak di kota dan dekat lokasi-lokasi industri,

seperti di industri makanan dan minuman, rokok, tekstil, sepatu, farmasi dan lain-lain.

Kondisi Pekerja Anak di Pondok Pekerja Anak

Anggota Pondok Pekerja Anak LWRA DPP SPSI kini sudah tercatat 426 Pekerja Anak, mayoritas adalah pekerja anak perempuan¹. Menurut data yang dikumpulkan Pondok Pekerja Anak LWRA- DPP SPSI, usia pekerja anak berkisar antara 10-15 tahun dengan masa kerja antara enam bulan sampai dua tahun. Penyebab mereka terpaksa bekerja atas beberapa dorongan, seperti disuruh orang tua, ingin membantu orang tua, mencari pengalaman, ingin mempunyai uang sendiri, daripada menganggur dan juga ingin hidup sendiri. Namun alasan yang paling menonjol adalah karena anak ingin mencari pengalaman dan ingin memiliki uang sendiri.

Jenis-Jenis Kegiatan

Beragam jenis kegiatan dilakukan di Pondok Pekerja Anak, di antaranya adalah:

1. Menyelenggarakan penyuluhan tentang UU Ketenagakerjaan, Hubungan Antara Manusia serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pendidikan, usaha dan hak anak.
2. Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan di luar pabrik, misalnya dengan memberikan pendidikan non formal atau memberikan ketrampilan sesuai dengan minat.
3. Penyuluhan gizi dan kesehatan anak, biasanya dilakukan dengan menyediakan pelayanan kesehatan dan juga menjauhkan pekerja anak dari kerja yang mengandung bahaya.

¹ Kami belum mengkaji lebih mendalam, apakah ada kaitannya dengan nilai masyarakat "anak perempuan tidak usah sekolah tinggi anak laki-laki saja yang sekolah tinggi".

4. Membantu pondok menyediakan tempat-tempat pendidikan bagi Pekerja Anak di lingkungannya (untuk memperpendek jarak), seperti balai desa, ruangan milik organisasi kemasyarakatan, rumah penduduk dan lain-lain.
5. Memberikan kesempatan bermain dan berekreasi kepada anak dengan menyediakan sarana maupun prasarana bermain dan berekreasi baik di Pondok maupun di luar Pondok, menyediakan fasilitas taman bacaan, menyediakan televisi/audio visual
6. Menyebarluaskan informasi kepada pengusaha maupun masyarakat tentang larangan kerja bagi anak, melalui penyuluhan-penyuluhan, penyebaran brosur-brosur, buletin, media cetak, dan lain-lain.
7. Memobilisasi guru, guru agama, pekerja sosial, PKK untuk melakukan kelompok-kelompok kegiatan, misalnya untuk menyebarluaskan mengenai peraturan pembatasan pekerja anak dan wajib belajar 9 tahun lewat kegiatan teater.
8. Menggerakkan Program Orangtua Asuh
9. Melakukan pendekatan kepada pengusaha dalam rangka untuk mengurangi jam kerja bagi Pekerja Anak sehingga memungkinkan mereka berpartisipasi dalam program.

Hambatan di Pondok Pekerja Anak

Memasuki tahun kedua berdirinya Pondok Pekerja Anak, LWRA DPP SPSI telah banyak menghadapi berbagai kendala. Seperti ketika di tahun pertama berdirinya pondok, papan nama Pondok Pekerja Anak sempat diturunkan. Penurunan papan nama ini karena waktu itu surat ijin dari Depdagri belum juga keluar, sementara proses pengurusannya berjalan lambat. Tapi untungnya pada tanggal 18 November 1993, rekomendasi dari Departemen Tenaga Kerja RI, yang bernomor 1075/BW/NK/93 dikeluarkan, disusul dengan rekomendasi dari Departemen Dalam Negeri tertanggal 11 November 1993 No. 250/2977, serta

surat ijin dari Kantor Sosial Politik Pemerintah Daerah Tk. II Bekasi tanggal 31 Desember 1993 no. 200/826/Binum. Walaupun mengalami keterlambatan ijin, berbagai aktifitas di pondok tidak ikut berpengaruh.

Dalam sehari pondok mengadakan pelayanan untuk pekerja anak, keluarga maupun masyarakat selama 8 jam, yakni dari pagi pukul 08.00 hingga pukul 16.00 sore. Adakalanya pekerja harus meninggalkan kegiatan pada waktu yang telah mereka sepakati, banyak terjadi di saat anak diharuskan lembur oleh perusahaan karena pesanan begitu banyak. Sebenarnya upaya dari Pondok Pekerja Anak sudah dilakukan, yakni dengan memohon izin kepada perusahaan tempat anak bekerja agar bisa mengikuti kegiatan yang ada. Tapi sayangnya banyak pengusaha memperlakukan mereka seperti layaknya orang dewasa, sehingga kapan mereka mendapat kesempatan untuk bermain? Atau belajar dan menikmati masa kanak-kanaknya? Nampaknya ketidaktahuan dan ketidak-mengertian pekerja anak tentang hak dan kewajibannya, telah dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pengusaha. Sementara itu pemerintah sebenarnya sudah menetapkan peraturan-peraturan mengenai anak bekerja (Permenaker No. 1/1987 Pasal 4).

Jelaslah bahwa peraturan pemerintah tersebut hanyalah sebuah peraturan belaka, karena dengan seenaknya saja peraturan tersebut dilanggar oleh pengusaha. Seperti jam kerja yang lebih dari empat jam sehari, malah ada yang bekerja sampai larut malam tanpa memikirkan keselamatan dan kesehatan kerja dan dengan sistem pengupahan yang di bawah standar. Sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tersebut ada ancumannya, seperti diatur dalam PerMenaker No. 1/1987 Pasal 5. Meski demikian ancaman hukuman itu telah dianggap angin lalu saja, pengusaha tampaknya tidak merasa gentar dan mereka tetap tidak peduli.

Keberadaan pabrik yang jauh dari rumah pekerja anak dan harus ditempuh dengan berjalan kaki, telah pula menjadi penghambat mereka untuk ke 'pondok'. Perjalanan dengan

jalan kaki kira-kira biasa ditempuh antara satu setengah sampai dua jam dari pabrik ke rumah, setelah pulang ke rumah mereka biasanya sudah lelah dan tidak kuat lagi untuk mengikuti aktivitas di 'pondok'.

Hambatan yang kerap ditemui adalah tidak terakomodasinya minat sebagian pekerja anak di 'pondok', utamanya bagi mereka yang buta huruf. Padahal keinginan mereka untuk ikut kegiatan di 'pondok' sangat besar, namun karena tidak bisa berhitung dan membaca akhirnya mereka tidak dapat mengikuti keterampilan seperti menjahit.

Aparat setempat dan tokoh masyarakat pada umumnya mendukung program Pondok Pekerja Anak ini, namun kesungguhannya untuk lebih peduli masih belum terlihat. Hal ini bisa dilihat dari jarangnyanya aparat setempat mengunjungi Pondok Pekerja Anak. Padahal upaya dari Pondok Pekerja Anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan terus dilakukan guna meningkatkan kepedulian masyarakat sekitar terhadap 'pondok'.

Masalah umum yang selama ini menjadi fenomena adalah semakin meningkatnya angkatan kerja yang ingin memasuki lapangan kerja, sementara kondisi lapangan kerjanya sendiri sangat terbatas. Persaingan yang tajam ini akhirnya telah menuntut persyaratan-persyaratan tertentu untuk menjaring tenaga kerja. Fenomena umum demikian ternyata tidak terjadi di perusahaan/pabrik yang berlokasi di pedesaan, seperti di daerah Bantar Gebang Bekasi yang justru membawa angin segar bagi kehidupan ekonomi masyarakat sekitar. Lemahnya manajemen perusahaan dalam menilai persyaratan bagi calon tenaga kerja, telah mendorong tenaga kerja untuk mengisi lowongan kerja tanpa perhitungan yang matang. Keberadaan pabrik di desa-desa ini tanpa disadari telah membentuk budaya kerja bagi masyarakat, sehingga berdampak langsung kepada anak-anak di bawah umur yang kemudian berbondong-bondong memasuki lapangan kerja di pabrik-pabrik. Baik anak-anak yang

putus sekolah maupun yang sedang sekolah, terkadang mereka memilih berhenti sekolah. Bahkan kerja merupakan kebanggaan tersendiri bagi mereka, sehingga masalah-masalah seperti pendidikan, kesehatan dan keluarga kurang diperhatikan.

Hasil-Hasil Pondok Pekerja Anak

Ada beberapa hasil yang positif dari kegiatan Pondok Pekerja Anak, di antaranya adalah mulai terjalinnya hubungan kerja sama dengan instansi terkait misalnya:

- Dengan Dikmas kecamatan mengadakan Kejar Paket A. sehingga lima orang pekerja anak bisa mengikuti ujian persamaan setara dengan SD.
- Dalam rangka ulang tahun Pemda Bekasi, ada tiga kelompok pekerja anak yang mendapat juara pertama dan ketiga pada perlombaan daur ulang.
- Dalam rangka ulang tahun Kemerdekaan RI ke-50, di tingkat kecamatan mengikuti cerdas-cermat kelompok Kejar Paket B dengan predikat juara I.
- Dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dua orang pekerja anak telah lulus tingkat dasar kursus menjahit.
- Kerjasama dengan FKPPPI mengadakan penyuluhan hukum
- Kerjasama dengan DPC SPSI Bekasi mengadakan penyuluhan UU Ketenagakerjaan, serta mengagendakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pekerja anak yang ada di sekitar tempat mereka bekerja.
- Berpartisipasi dengan kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkaitan dengan anak, baik berupa seminar, diskusi, rekreasi maupun kunjungan yang bersifat silaturahmi.

Kesimpulan

Kompleksnya masalah yang dihadapi oleh pekerja anak kini jelas membutuhkan perhatian yang sangat serius, baik pemikiran maupun pelaksanaan untuk meningkatkan harkat dan martabat sehingga mereka dapat menjadi harapan bangsa. Selain itu penyadaran perlu juga dilakukan oleh berbagai pihak untuk peduli dan meningkatkan partisipasinya mereka terhadap fenomena pekerja anak.

Dengan adanya Program Pondok Pekerja anak yang memberikan pendidikan ketrampilan, penyuluhan UU Ketenagakerjaan dan kesehatan, pelayanan kesehatan, penyebaran informasi melalui *leaflet*, brosur serta buku-buku yang tersedia akan meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan berpikir bagi pekerja anak.

Model Pelatihan Prakejuruan Pekerja Anak

MT. Heru Purwanto

Balai Keterampilan Muhammadiyah

Weleri, JATENG

Pendahuluan

Fenomena pekerja anak memang bukan masalah baru. Keberadaannya telah ada berabad-abad lalu, baik di negara-negara industri di belahan Eropa maupun negara berkembang. Data penelitian menunjukkan bahwa di negara berkembang tercatat lebih banyak. Demikian juga di Indonesia, menurut data yang dipandang komprehensif (Susenas 1993), jumlah pekerja anak usia 10 - 14 tahun tercatat 2,60 juta. Angka ini kurang lebih 11 persen dari jumlah keseluruhan populasi pada usia tersebut yang seluruhnya berjumlah 23,96 juta. Diperkirakan jumlah yang sesungguhnya lebih besar lagi mengingat data pendidikan menunjukkan jumlah anak usia 10-15 tahun yang tidak bersekolah lebih kurang 10 juta. Angka-angka ini tentunya menjadi keprihatinan kita bersama.

Data di atas menunjukkan bahwa ada sebagian anak yang kurang beruntung dan tidak menikmati masa kanak-kanaknya dengan baik. Mereka yang seharusnya di bangku sekolah terpaksa harus bekerja.

Kondisi ini jelas tidak menguntungkan buat masa depan mereka, mengingat bahwa anak adalah aset masa depan bangsa. Untuk itu keberadaannya harus diberi kemampuan lahiriah, baik fisik, mental, spiritual, moral maupun sosialnya, agar menjadi sumber daya manusia yang handal dan berkualitas.

Permasalahan

Data statistik menunjukkan jumlah anak usia 10-14 tahun di kabupaten tercatat 91.691 anak (Kendal Dalam Angka, 1994). Dari jumlah itu yang berdomisili di kecamatan Weleri, Gemuh dan Rowosari — daerah binaan program aksi IPEC Muhammadiyah Weleri — sebanyak 19.478 anak. Perkiraan resmi menyebutkan, jumlah pekerja anak di tiga kecamatan tersebut lebih kurang 1.600-an, sebagian besar dari mereka adalah pekerja sektor informal di industri primer (perikanan atau pertanian) sebagai pemiang (*traditional deep sea fishing*), pemindang (*salty fish industry*), buruh tani (*farm labour*) dan pemecah batu (*stone cutters*).

Pemiang tersebut adalah anak laki-laki berusia antara 11-15 tahun. Dalam melakukan pekerjaannya, anak-anak tersebut memang menghadapi bahaya dan dapat mengancam jiwanya. Pekerjaan yang dilakukan mereka adalah memasang jaring di waktu malam tanpa peralatan pengaman apapun. Beberapa resiko yang sering dilaporkan termasuk digigit binatang laut beracun; serangan angin dan ombak; tersangkut jaring; dan ditinggal awak kapal tanpa pengawasan.

Berbeda dengan pemiang, pemindang umumnya adalah gadis-gadis kecil berusia antara 10 sampai 15 tahun. Kebanyakan dari mereka menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (SD) tapi tidak melanjutkan sekolah, sebagian di antaranya *drop-out* SD. Dalam melakukan pekerjaannya mereka harus duduk di atas lantai dan memegang garam tanpa perlindungan selama lebih dari delapan jam per hari. Untuk mendapatkan penghasilan mereka harus menggarami kurang lebih 1.000 ikan dengan upah Rp1,00 per ekornya. Karena mereka menggarami ikan sepanjang hari tanpa pelindung tangan, bukan hal yang aneh bila banyak gadis-gadis kecil itu didapati dengan tangan *teritisi*.

Sedangkan pemecah batu biasanya dilakukan anak laki-laki berusia antara 11-15 tahun, sebagian di antara mereka lulus SD tapi tidak melanjutkan dan beberapa anak lainnya masih sekolah. Pekerjaan mereka termasuk menyelam di sungai untuk

mengambil batu-batu, mengangkatnya ke keranjang karet dan mengentaskannya, kemudian memecahnya menjadi keping-kepingan kecil tanpa menggunakan pelindung tangan dan mata.

Pemiang mempunyai masalah yang lebih kompleks lagi dibandingkan dengan profesi yang lain. Seperti di saat memasang *payang* (jaring besar), pemiang terjun ke laut hampir 30 menit ketika melakukan pekerjaan memegang ujung jaring. Mereka harus berendam di air laut selama itu dengan hanya berbekal pelampung sepotong bambu, ini cukup mengancam jiwa dan kesehatannya. Dari hasil penelitian terungkap bahwa sebagian besar dari mereka mengalami gangguan pendengaran dan penyakit kulit.

Kenyataan lain menunjukkan, karena kondisi di lingkungan bekerjanya hampir 90 persen adalah orang dewasa, maka perilaku-perilaku dewasa atau kebiasaan buruk yang dilakukannya para nelayan telah menurun kepada mereka. Banyak di antara mereka sudah melakukan kebiasaan merokok, minum-minuman keras, berjudi dan bahkan beberapa anak ada yang sudah mengenal prostitusi. Jumlah jam kerja yang tidak tentu dan kadang sampai berhari-hari menyebabkan berkurangnya/hilangnya kesempatan waktu belajar dan bermain dengan teman sebayanya.

Pemiang bukan pekerja lepasan, mereka terlibat secara struktural dan mendapat bagian tetap (lihat paparan struktur pembagian tugas dan pembagian hasil).

Penanganan Masalah

Profil Lembaga Pelaksana Program Aksi

Sebelum membicarakan lebih lanjut mengenai penanganan permasalahan yang menjadi program intervensi penanggulangan pekerja anak yang dilakukan Muhammadiyah Weleri, ada baiknya mendapatkan dulu gambaran yang lebih

luas situasinya dan ada baiknya sedikit diuraikan mengenai profil lembaga pengelola program aksi tersebut.

Struktur Pembagian Tugas dan Hasil Usaha Perikanan di Weleri

STRUKTUR	TUGAS	PEMBAGIAN HASIL
Majikan	Menyiapkan akomodasi awal	50% (50% sisanya dibagi sesuai bagiannya)
Juru Mudi	Memimpin dan Mengendalikan perahu	5 bagian
Juru Gidang	Mengumpulkan ABK	2 bagian
Juru Batu	Menyiapkan <i>payang</i> dan mengontrol pemberat jaring	2 bagian
Juru Tangguh	Menunjukkan sasaran ikan	2 bagian
Pemiang	Seperti dideskripsikan	1,5 bagian
Pandega	Pembantu umum	1 bagian

Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'rif Nahi Munkar yang ber-*aqidah* Islam. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta tanggal 18 November 1912. Muhammadiyah cabang Weleri telah berusia 58 ta-hun (sejak 1838). Dalam usianya yang lebih dari setengah abad itu, Muhammadiyah Weleri — pusat kegiatan Muhammadiyah di Kendal — telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan di berbagai bidang. Sebagai gambaran komitmennya, di bidang pendidikan organisasi ini se-karang memiliki satu institut, 8 SLTA, 12 SLTP, 24 SD dan 30 TK. Dalam bidang kesehatan aset yang telah dimiliki antara lain; satu buah rumah sakit dan tiga buah klinik kesehatan (rumah bersalin). Di bidang ekonomi dan sosial Muhammadiyah berhasil dalam memobilisasi pengumpulan zakat *amwal* yang jumlahnya mencapai Rp80 juta per tahun — jumlah ter-besar dari perolehan zakat *amwal* di seluruh kabupaten di Indonesia yang dikelola

Muhammadiyah — di samping itu juga tercatat 10 lembaga keuangan masyarakat, empat buah panti asuhan dan satu buah balai keterampilan yang menjadi binaan PKU Muhammadiyah Weleri. Lembaga yang disebut paling akhir itulah yang mendapat kepercayaan sebagai pelaksana teknis program aksi IPEC/ILO.

Pengelompokan Staf Pendukung Program Aksi Balai Keterampilan Muhammadiyah

STATUS	JABATAN	JUMLAH
<i>Full timer</i>	Koordinator Proyek	1
	Wakil ketua	2
	Sekretaris/akuntan	2
	Petugas administrasi	1
<i>Part timer</i>	Tutor nonformal	9
	Instruktur / asisten	12
	<i>toolman</i>	3
<i>Volunteer</i>	Litbang	3
	Logistik	1
	Keamanan	1

Model Kegiatan Program Aksi

Paket Pelatihan Pra Kejuruan

Kegiatan program aksi ini dibagi dalam dua model pendekatan, yakni program intervensi langsung dan tidak langsung ke kelompok sasaran. Dalam model program intervensi langsung ke kelompok sasaran dilakukan dua kegiatan, yakni “Paket Pelatihan Prakejuruan” dan “Paket Pendidikan Nonformal”.

Pada paket pelatihan pra kejuruan diberikan dengan melihat kebutuhan setempat, dengan pertimbangan pada pilihan yang aman. Diharapkan dari pelatihan yang diberikan selama 200 jam ini dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Pada program

aksi 1992/1993 telah diberikan beberapa jenis pendidikan keterampilan, seperti elektronika, menjahit, otomotif (khusus sepeda motor). Kemudian pada tahun 1994/1995 diberikan pendidikan keterampilan pertukangan, menjahit dan mesin perahu tempel. Sedang paket pendidikan nonformal yang diberikan adalah kelompok belajar (Kejar) Paket B.

Pada program intervensi tak langsung dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi:

1. Isu dan kampanye aksi yang meliputi: penyebaran *leaflet*, pemberitaan di harian lokal, radio dan TV.
2. Memprakarsai kerjasama dengan instansi terkait dan sektor swasta
3. Menyenggarakan acara khusus seperti pembukaan dan penutupan program yang mengundang pejabat setempat.

Hasil-Hasil yang Dicapai

Kegiatan pelatihan prakejuruan dan nonformal selama periode tahun 1992-1993 yang diikuti oleh pekerja anak, beberapa anak telah mengikuti ujian yang diadakan oleh Kanwil Departemen Tenaga Kerja setempat. Sekitar 90 anak berhasil mendapatkan sertifikat, di antaranya 20 anak dari pra kejuruan elektronika, 55 anak menjahit dan otomotif sebanyak 15 anak. Bahkan di antara anak-anak itu ada yang berhasil lulus dan mendapat sertifikat Kejar Paket B jilid satu.

Sedang dari hasil program intervensi tak langsung ke sasaran dalam periode 1992-1993, telah membuahkan hasil yang cukup baik. Hasilnya adalah semakin dikenalnya program aksi yang telah dilakukan, selain itu kesadaran masyarakat juga meningkat dalam masalah pekerja anak ini. Di samping itu dukungan juga mulai datang dari berbagai instansi terkait, bahkan PT. ASTRA juga turut memberikan tambahan peralatan praktek dan buku-buku.

Paket Pelatihan Pra Kejuruan

Program	Materi	Waktu
•Elektronika	Pengenalan komponen	50 jam
	Pengenalan. alat dan penggunaan.	50 jam
	Merakit proyek sederhana	40 jam
	Dasar-2 pesawat elektronik	60 jam
	Kunjungan industri	-
•Menjahit	Pengenalan. alat dan penggunaan.	30 jam
	Teknik mengukur & membuat pola	40 jam
	Membuat pakaian	130 jam
•Otomotif (sepeda motor)	Pengenalan alat	30 jam
	Dasar-2 sepeda motor	60 jam
	Sistem transmisi	60 jam
	Kelistrikan	50 jam
	Kunjungan industri	-
•Pertukangan Kayu	Pengenalan alat dan bahan	20 jam
	Pengenalan. alat pertukangan & ukur	80 jam
	Membuat perabot dari kayu	40 jam
	Penyelesaian pekerjaan	60 jam
	Kunjungan industri	-
•Mesin Perahu Tempel	Pengenalan bahan/alat	20 jam
	<i>Engine Mechanical</i>	80 jam
	Diesel	40 jam
	<i>Trouble shooting</i>	60 jam
	Kunjungan industri	-

Paket Pendidikan Non Formal (Kejar Paket-B)

MATERI WAJIB	MATERI TAMBAHAN
<ul style="list-style-type: none">• Matematika• Pendidikan. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN)• Bahasa Indonesia• Bahasa Inggris• Ilmu Pengetahuan Sosial• Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	<ul style="list-style-type: none">• Bimbingan Mental (Bintal)• Olah raga dan Kesehatan (Orkes)

Sementara itu hasil-hasil sementara periode 1994-1995 dalam waktu satu semester, telah berhasilnya direkrut 100 anak un-tuk ikut program dari 150 anak yang menjadi target selama satu tahun periode. Sebagian menunjukkan ketertarikannya untuk mengikuti pelatihan pra kejuruan dan pendidikan non formal, sehingga dengan ketertarikan mereka ini telah pula memberikan bias kepada teman-teman yang lainnya. Beberapa anak belakangan malah datang sendiri untuk dicatat sebagai siswa dalam program aksi. Kemajuan juga dicapai dengan semakin meningkatnya perhatian dari orang tua anak-anak, hal ini ditunjukkan dengan cukup tingginya prosentase kehadiran pembinaan mereka.

Peran Pemerintah dan Lembaga Lain

Pemerintah sangat menyadari situasi pekerja anak. Prakarsa pelaksanaan program aksi yang cukup intensif dan masih tergolong langka ini telah mendapat tanggapan yang sangat positif dari pemerintah. Sumbangan konkret telah diberikan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program, seperti disisihkannya sebagian dana pelaksanaan pendidikan non formal dari proyek wajar 9 tahun Depdikbud kabupaten Kendal. Pemerintah Daerah (Bupati) juga memberi dukungan yang sangat besar, demikian pula Depnaker dan Dinas Perindustrian

yang membantu dalam menyiapkan silabus program latihan dan sebagainya.

Keberadaan ILO yang menjadi input utama pelaksanaan program aksi IPEC ini telah memberikan sumbangan yang sangat besar. Dukungan yang berwujud material dan manajemen sangat membantu untuk melaksanakan program secara profesional.

Temuan, Kendala dan Saran-saran

Dilihat dari situasi bekerja anak-anak, tidak salah kalau diprediksikan bahwa bahaya-bahaya yang akan menimpa para pemiang tersebut cukup besar. Menurut catatan, dalam kurun waktu hampir 10 tahun terakhir, terjadi dua kali kecelakaan yang menimpa anak-anak (satu meninggal terkena kipas mesin perahu dan satu luka parah digigit ikan).

Keterlibatan mereka dalam situasi kerja demikian bukan semata-mata karena alasan ekonomi, melainkan menyangkut masalah tradisi budaya yang sudah dilaksanakan turun-temurun kultural. Di sini pengaruh orangtua dan lingkungan sangat kuat, sehingga masih sulit bagi mereka untuk meninggalkan profesinya. Lebih-lebih lagi pada musim-musim tertentu ketika mereka mendapat perolehan yang cukup, telah membuat mereka semakin sulit melepaskan budaya itu. Dalam hal ini penangan program aksi harus dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh dan melibatkan daya-daya yang ada, mengingat permasalahan yang muncul tidak bisa lepas dari konteks makronya.

Program aksi yang dilakukan bukan berarti tidak menghadapi kendala, berbagai kendala juga dihadapi selama program aksi berlangsung. Jarak lokasi pelatihan dengan lokasi binaan yang cukup jauh (8 km), cukup membenarkan alasan kurangnya frekuensi kehadiran anak untuk mengikuti program aksi. Untuk itu kini sedang dipertimbangkan untuk menyediakan tempat yang dekat dengan lokasi binaan.

Meski dengan adanya kendala demikian, telah cukup dirasakan bahwa pelatihan pra kejuruan telah memberikan dimensi belajar dan bermain, utamanya untuk menggantikan paruh waktu anak yang hilang karena digunakan selama bekerja. Dengan demikian kegiatan ini sangat baik bila dijadikan sebagai salah satu model, karena cukup efektif untuk program in-tervensi untuk pekerja anak.

Selain dengan program tersebut, pendekatan melalui hukum diperlukan pula dalam memperbaiki kondisi pekerja anak ini. Seperti dalam hal struktur dan pembagian hasil dalam usaha perikanan ini yang terkesan sudah cukup jelas, tetapi itu baru kesepakatan secara moral yang aturan hukumnya tidak jelas. Undang-undang dengan cakupan aspek yang lebih luas sangat diperlukan. Sementara saat ini UU hanya mencakup pekerja anak di sektor formal saja, padahal sebagian pekerja anak di pedesaan tergolong pekerja sektor informal yang tidak jelas hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja.

Advokasi Atas Penindasan dan Pemiskinan Anak-Anak Miskin Perkotaan

Azas Tigor,
Institut Sosial Jakarta

Pembangunan fisik yang hanya terpusat di kota-kota besar seperti di Jakarta, selain tidak tepat juga tidak adil. Akibatnya banyak penduduk desa yang lari ke kota besar untuk mempertahankan hidupnya. Banyak pilihan yang mereka rasakan dapat dilakukan setibanya di kota besar, tetapi kenyataan yang cukup berat menghadang mereka setibanya di kota.

Jakarta sebagai kota terbesar di Indonesia, merupakan kota yang menggoda banyak orang desa untuk menyentuhnya. Namun kenyataannya mereka tersisih di Jakarta, namun dengan kondisi ini tidak membuat mereka jera dan kembali ke desa. Bertahan, merupakan tekad yang dijalankan ketimbang malu tanpa hasil setelah merantau ke Jakarta, karena bila kembali pun ke desa tidak juga menjamin tersedianya lapangan pekerjaan.

Keberadaan mereka sebagai kaum miskin urban, oleh penguasa serta kaum mapan kota dianggap sebagai sumber kriminalitas, pengotor kota dan pengacau pembangunan. Penilaian ini membuat kaum miskin harus terus berjuang dan berpindah-pindah agar mereka tetap bisa bertahan hidup. Pekerjaan apapun dilakukan, mereka tidak pernah berpikir apakah pekerjaan tersebut sejalan dengan tuntutan rencana pembangunan kota atau tidak. Bagi mereka yang terpenting adalah bagaimana mereka dan keluarga, hari ini bisa makan dan hidup.

Pilihan pekerjaan apapun akan mereka lakukan asal bisa bertahan hidup. Hingga akhirnya mereka banyak kita temui berprofesi sebagai buruh pabrik, penarik becak, wanita penghibur, pembantu rumah tangga, calo, tukang parkir, asongan, pedagang kaki lima, sopir kendaraan umum, peminta-minta

atau anak jalanan dan lain-lainnya. Mereka ini selama di Jakarta terjebak dan terjerat dalam kemiskinan. Bila mendengar istilah kemiskinan, maka yang terbayang dalam pikiran kita adalah suasana sesak dan bau, gubuk-gubuk yang terbuat dari bahan bekas dan mudah sekali dirubuhkan, orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, anak-anak kecil dengan *ingus* dan bau badan tak sedap berlarian di tepi jalan atau di tempat-tempat umum lainnya meminta-minta pada setiap orang yang ditemui, atau bayangan lain yang mengerikan dalam benak kita. Gambaran tentang kemiskinan tersebut secara mudah dapat kita katakan sungguh-sungguh mewakili istilah 'kemiskinan' atau 'orang miskin'.

Selama ini kita telah terjebak dan menyederhanakan konsep. Istilah dan fakta tentang kemiskinan hanya bertolak pada tolok ukur ekonomi. Padahal di sekitar kita banyak orang yang mengalami *stress*, bekerja pada lingkungan buruk, tidak memiliki rasa aman, tidak memiliki akses terhadap sumber informasi, tidak mampu mengatur hidup secara mandiri karena terlampau banyaknya intervensi pihak luar. Mereka yang mengalami hal ini seharusnya masuk juga dalam kelompok 'orang miskin'. Penyebutan kategori-kategori kemiskinan ini, bukan berarti bermaksud membahasnya satu per satu. Tetapi dari kategori-kategori tersebut kita disadarkan betapa luasnya dimensi kemiskinan, sehingga tidak bisa hanya diukur dari dimensi ekonomi. Hal ini dapat kita rasakan dan lihat di setiap sudut-sudut kota besar, seperti halnya di Jakarta. Juga demikian bagi anak-anak miskin perkotaan, konsep kemiskinan yang dialami oleh mereka tidak sekedar ekonomi saja, tetapi juga mengalami kemiskinan dalam bentuk penekanan dan penindasan yang tidak memberi rasa aman.

Nasib Anak-anak

Secara khusus kita sering menjumpai anak-anak, baik laki-laki atau perempuan, anak masih balita ataupun sudah remaja, bekerja untuk membantu orang tua atau untuk menghidupi diri sendiri. Anak-anak itu ada yang bekerja pada sektor formal sebagai buruh pabrik dan sektor informal sebagai pedagang asongan atau pedagang kaki lima, kuli panggul, pengamen, penyemir sepatu, pemulung, pembantu, calo kendaraan umum, tukang parkir, pekerja prostitusi dan peminta-minta. Terlihat memang kemiskinan ekonomi menyebabkan mereka harus mencari uang dan merelakan diri untuk kehilangan masa kanak-kanak yang seharusnya diisi dengan belajar dan bermain, bukan bekerja membanting tulang. Juga pengalaman mendapat perlakuan kasar dan kejam yang mereka alami di lapangan ketika bekerja (nant) akan menunjukkan bahwa mereka mengalami juga dimensi kemiskinan yang lain. Begitu pula dengan masalah anak-anak miskin perkotaan yang merupakan salah satu bagian dari kehidupan kaum urban yang miskin di Jakarta. Berdasarkan pengalaman, anak-anak miskin (berumur antara 5 sampai 18 tahun) perkotaan ini dapat kita bagi menjadi tiga bentuk, yakni:

1. Anak-anak miskin pemukiman kumuh;
mereka ini adalah anak-anak para kaum urban yang tinggal bersama orang tuanya di pemukiman-pemukiman kumuh. Kelompok anak-anak ini ada juga yang bersekolah dan banyak juga yang tidak mampu mengenyam pendidikan formal. Penghasilan mereka berperanan penting dalam menopang perekonomian keluarga. Tidak jarang juga karena kemiskinan keluarga, para orang tua terpaksa memilih tidak lagi menyekolahkan anak-anaknya dan mempekerjakan mereka.
2. Pekerja anak-anak perkotaan;
mereka hidup di Jakarta, tidak tinggal bersama keluarga atau orang tua, melainkan menyewa ruangan secara bersama-sama dan dekat dengan tempat mereka berusaha atau bekerja. Mereka bekerja untuk menghidupi kebutuhan

sendiri, namun apabila ada sisa uang ditabung untuk dikirim ke desa, banyak dari mereka yang tetap melanjutkan sekolah, tentunya dengan biaya sendiri. Pola hidup mereka mengelompok atau menyewa ruangan bersama rekan seprofesi atau daerah asal. Orang tua atau keluarga mereka tetap berada di desa, secara berkala mereka pulang ke desa atau mengirimkan uang hasil berdagang ke desa.

3. Anak-anak jalanan;

kelompok anak-anak ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan dua kelompok anak-anak di atas. Mereka ini tidak memiliki tempat tinggal seperti dua kelompok sebelumnya, tempat tinggal mereka adalah 'alam terbuka', tidak berhubungan dengan keluarga batih dan menyewa ruang, melainkan di emperan perkotaan, stasiun, terminal, kolong jembatan atau taman-taman kota. Latar belakang mereka turun ke jalan pun agaknya memiliki alasan yang berbeda. Mereka banyak yang lari dari keluarga, sehingga jarang yang masih memiliki atau memelihara hubungan dengan tempat asal atau keluarga. Dapat dikatakan waktu atau hidup sehari-hari — mungkin 'dilahirkan di jalanan', tumbuh dan berkembang di jalanan — lebih banyak dihabiskan di jalanan atau jauh dan 'terputus'; memutuskan hubungan dengan keluarga batih.

Banyak dari anak-anak tersebut bekerja memang karena diminta atau dipaksa oleh orang tua mereka sendiri untuk menambah penghasilan keluarga. Seringkali bukan kasih sayang atau penghargaan yang diterima anak-anak sepulang bekerja, melainkan pukulan dan tinju dari pihak orang tua apabila pulang ke rumah tanpa pendapatan. Pengalaman ISJ (Institut Sosial Jakarta) menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak jalanan yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Mereka sebelumnya memang tidak (perlu) bekerja tetapi sering menjadi sasaran kekerasan dari orang dewasa. Kehidupan di keluarga demikian mendorong anak-anak untuk memutuskan hubungan dengan keluarga dan memilih hidup di jalanan. Kondisi di tempat mereka bekerja seperti di jalanan dan di tempat umum, sebagai asongan, kaki lima, pengamen, calo,

peminta-minta atau penyemir senantiasa ditindas, menjadi objek kekerasan, ditangkap, disiksa atau dianiaya oleh petugas keamanan, petugas Tibum (ketertiban umum) pemda dan orang-orang dewasa lainnya. Barang-barang dagangan mereka dirampas oleh para petugas dan tidak pernah dikembalikan. Banyak di antara mereka disiksa entah dengan disiram air panas, dilempari batu, disudut rokok, disilet maupun dipukul. Banyak pula yang diperkosa (melalui duburnya) dan mengalami pelecehan seksual lainnya, seperti dipaksa bersenggama, berciuman, melakukan *oral sex* maupun bertelanjang di tempat umum. Ketika ISJ bersama dengan Jaringan LSM untuk Anak Jalanan mengadakan advokasi bersama (Juli 1995), didapatkan data bahwa peristiwa seperti ini dialami oleh anak-anak jalanan di Jakarta, Bandung, Medan, dan Yogyakarta. Pada bulan Januari 1993, lebih dari 10 anak jalanan/pedagang asongan ditangkap ketika menjual surat kabar dan minuman botol di Stasiun Kereta Api Jatinegara, Jakarta Timur. Seluruh barang dagangan disita, mereka disiksa dan dipaksa membersihkan lantai stasiun dengan lidahnya. Seorang rekan kami pengasong yang mengalami hal itu, bernama Iwan menceritakan;

" ... saya dipaksa berbaring; aparat keamanan kemudian membawa setrika listrik. Ketika setrika itu digosokkan pada kulit saya, saya menangis karena sakit sekali. Kulit saya melepuh. Saya kemudian dipaksa menjilati lantai stasiun. Ketika saya menolak salah satu dari mereka menampar wajah saya. Rasanya saya hina sekali..."

Hingga saat ini, rekan-rekan pengasong tersebut sudah tidak bisa lagi masuk ke stasiun Jatinegara untuk berjualan. Untuk bekerja atau berjualan di tempat lain pun anak-anak itu harus berhadapan dengan petugas keamanan, apabila tidak ingin ditangkap. Alasan yang selalu digunakan oleh pihak pemda (pemerintah daerah) adalah kebijakan otorita kota, seperti di Jakarta, Perda no. 11 tahun 1988. Sumbernya adalah kebijakan pembangunan perkotaan — seperti yang tercermin pada pemberian piala Adipura — yang justru menyingkirkan anak dari kesempatan mereka untuk bekerja di sektor informal.

Di Jakarta, sejak keluarnya kebijakan Operasi Esok Penuh Harapan (10 Februari 1990), kemudian dilanjutkan persiapan kota untuk Konferensi Gerakan Non Blok dan konferensi APEC, ruang gerak para pengasong untuk berdagang semakin sempit. Mereka dikejar-kejar, ditangkapi dan begitu saja dirampas dagangannya. Keluar dari pos-pos keamanan, barang dagangan tak kembali utuh, kepala atau bagian tubuh lainnya penuh luka bocor, lecutan atau sembab mata.

Begitu pula sejak awal Agustus 1995, ratusan pedagang asongan ditangkap dari lima wilayah Jakarta. Penangkapan ini dilakukan oleh aparat pemda dan Kepolisian dalam rangka mensukseskan program Gerakan Disiplin Nasional yang diperkuat oleh Perda No. 11 tahun 1988. Salah seorang pengasong yang tertangkap adalah rekan kami yang sehari-hari tinggal pada sebuah *open house*. Anak tersebut tertangkap oleh petugas Tibum Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur ketika hendak menjual hasil kerajinan tangan yang dibuat bersama anak-anak jalanan di *open house*. Ketika kami menemani anak tersebut mengambil barang dagangannya di Kecamatan Jatinegara, diminta oleh seorang petugas di sana sebesar 10 ribu rupiah sebagai uang 'tebusan'. Petugas tersebut mengatakan pada kami berdua bahwa membayar uang tebusan itu lebih mudah dan murah, ketimbang harus mengikuti jalur resmi yakni melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri.

Memang berdasarkan pengalaman kami, para pedagang yang disita dagangannya tetap akan dihukum denda, karena dianggap telah melanggar Perda No. 11 tahun 1988. Mengikuti proses pengadilan ini akan membutuhkan waktu lama, juga barang-barang yang disita belum tentu masih utuh jumlah dan keadaannya. Kondisi penindasan ini meminta anak-anak miskin perkotaan di Jakarta dan sekitarnya, yang bekerja di sektor informal harus berjuang keras untuk dapat hidup dan mendapatkan pengakuan atas keberadaannya.

Perda No.11 tahun 1988 yang dibuat oleh pemda DKI Jakarta tentang pengaturan ketertiban pemanfaatan ruang-ruang publik, ternyata memang senjata ampuh para aparat untuk melindas anak-anak pekerja di sektor informal kota. Pengejar-an seperti

telah diuraikan pada bagian sebelumnya, kerap kali berbuntut penangkapan yang disertai penyiksaan terhadap anak-anak. Tindakan penyiksaan ini jelas telah melanggar hak asasi anak-anak, tanpa ada usaha dari pihak pelaku untuk menghentikannya. Justru cenderung meningkat kualitasnya dari hari ke hari, walaupun masyarakat dan dunia inter-nasional telah banyak menekan agar penyiksaan tersebut dihentikan. Usaha tersebut misalnya melalui penulisan kasus-kasus, protes-protes dan pembuatan pelarangan melalui deklarasi internasional oleh PBB terhadap penyiksaan yang dialami anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan.

Pada tanggal 10 Desember 1984 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah mengesahkan sebuah konvensi bagi perlindungan hak-hak asasi manusia, yaitu konvensi untuk **Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia**. Melalui konvensi tersebut masyarakat internasional, utamanya negara-negara anggota PBB secara bersama-sama diajak untuk mencegah dan mengakhiri berbagai tindakan penyiksaan, perlakuan dan pemberian hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang acap dilakukan oleh pejabat-pejabat publik atau aparat pemerintah dari banyak negara di dunia; perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara atau orang lain atas seijin atau sepengetahuan pejabat negara tersebut, dilakukan terhadap para tersangka atau rakyat yang tak berdaya dan tak berdosa. Ditambah lagi bahwa sejak 1990 Indonesia juga telah meratifikasi deklarasi PBB tentang hak asasi anak-anak. Namun penyiksaan terhadap anak-anak terutama anak-anak miskin di perkotaan masih sering dilakukan oleh aparat pemda dan militer.

Advokasi Penindasan dan Kemiskinan

Di Jakarta, sebagai kota yang masih terus dikembangkan menjadi kota megapolitan, keberadaan anak-anak miskin perkotaan semakin hari semakin sangat terancam. Jakarta dalam rencana strategis (Restra) 1992-1997 yang disusun Pemerintah Daerah, sebenarnya menyebutkan bahwa sebagian program pemda adalah menangani pemukiman kumuh, membina sektor informal dan angkutan umum.

Melihat rencana ini, awalnya banyak orang, utamanya kaum urban miskin dan tertindas mengharapkan kehidupan mereka akan terangkat oleh program pemda. Namun apa yang terjadi kemudian? Justru semakin banyak penangkapan pedagang asongan dan kaki lima serta penggusuran pemukiman kumuh di Jakarta. Keberadaan mereka di jalanan, di pemukiman kumuh tempat tinggal mereka, dianggap tidak layak dan tidak menguntungkan bagi perkembangan kota Jakarta. Jadi semakin

lengkaplah penderitaan anak-anak itu, tidak dapat bersekolah, terpaksa dieksploitasi oleh keluarga, kehilangan kesempatan berkembang sebagaimana anak-anak seusia mereka dan di jalanan mereka di kejar-kejar, ditangkap serta disiksa tanpa perikemanusiaan. Oleh masyarakat mereka ditolak dan diberi cap negatif seperti tunakarya, tunawisma, sumber kriminal atau lainnya yang merendahkan martabat. Kondisi inilah yang membuat lembaga kami (ISJ) memilih gaya pendampingan anak-anak miskin perkotaan dengan menekan-kannya pada advokasi terhadap penindasan dan kemiskinan yang dialami oleh anak-anak tersebut. Advokasi yang kami lakukan bertujuan untuk melakukan pembelaan dan penyadaran baik intern (ke dalam anak-anak itu sendiri) dan ekstern (keluar, masyarakat pada umumnya).

Langkah advokasi dilakukan melalui berbagai bentuk model keterlibatan bersama anak-anak, utamanya dalam program pendampingan keseharian. Misalnya saja pada kasus larangan berjualan atau bekerja di tempat-tempat umum oleh pihak pemda DKI Jakarta melalui Perda No. 11 tahun 1988, tentang Ketertiban Umum. Melalui keterlibatan bersama, mengajak anak-anak melihat penindasan dan pemiskinan yang mereka alami adalah dikarenakan adanya pandangan salah atas keberadaan mereka. Pandangan salah tersebut dipaparkan melalui usaha penolakan atau penyingkiran mereka yang secara jelas dimuat dalam Perda tentang ketertiban umum. Secara jelas anak-anak diajak melihat dan menganalisa proses penyingkiran mereka tersebut melalui pengalaman sehari-hari, yakni pengalaman ketika mereka dikejar-kejar dan ditangkapi oleh para petugas ketika bekerja, juga pengalaman mereka di *open house* yang belum diterima masyarakat setempat karena tidak memiliki KTP dianggap anak liar, gelandangan, sumber kekumuhan dan sumber kriminal.

Melalui pengalaman melihat secara bersama-sama ini sangat membantu upaya untuk melakukan penyadaran pada anak-anak. Mereka akan semakin sadar atas perlakuan secara kejam, terdampar di jalanan, dan kehilangan masa kanak-kanaknya. Proses ini selanjutnya akan sangat membantu ketika kita ber-

sama mereka hendak membuat perencanaan lebih lanjut dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Merencanakan advokasi yang sifatnya keluar, seperti upaya perubahan kebijaksanaan pada pihak pemerintah dan kesadaran terhadap masyarakat umum. Upaya tersebut bisa berupa aksi menekan dan pendekatan pada pihak legislatif atau pemerintah untuk mencabut peraturan yang menindas mereka.

Dalam melakukan advokasi seperti di atas kita tidak dapat menggantungkan pada satu bentuk saja, sehingga diperlukan bentuk-bentuk lain. Apabila kita hanya mengandalkan satu bentuk saja, bisa berakibat malah semakin kerasnya tekanan yang akan mereka terima di tempat bekerja. Kesadaran ini pula yang harus kita jalankan bersama anak-anak, sehingga mereka mampu bertahan dalam advokasi yang memerlukan waktu panjang.

Bentuk lain sebagai pendukung dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan dan kesadaran terhadap masyarakat umum. Misalnya saja kita dapat memanfaatkan bentuk lain, seperti pembuatan media cetak berupa tabloid, brosur-brosur atau buku dan pementasan teater anak-anak yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Tentunya isi dari bentuk pendukung ini adalah tentang bagaimana latar belakang dan keseharian anak-anak tersebut. Ini dilakukan dengan harapan agar dapat merubah pandangan negatif terhadap anak-anak miskin perkotaan yang diberikan oleh masyarakat.

Namun ini bukan berarti bentuk-bentuk kesadaran di atas dapat berjalan dengan lancar. Kita tahu betapa sulitnya menggelar sebuah pementasan teater atau bentuk lainnya di negeri ini yang mengungkap fakta penindasan dan banyak terjadi pada kaum miskin. Kondisi tersebut meminta kita agar lebih kreatif dalam merangkai pengalaman-pengalaman anak-anak agar layak 'jual' melalui media cetak atau pementasan teater yang dimainkan oleh mereka sendiri. Juga dibutuhkan kejelian kita membaca kesempatan agar tujuan yang sesungguhnya tercapai, agar rencana tidak *dibredel* oleh pihak keamanan seperti yang sudah terjadi.

Bersama Anak-anak

Untuk mendukung advokasi ini, ISJ dalam keseharian mencoba melalui program pendampingan langsung bersama mereka. Pendampingan tersebut dapat dilakukan dengan cara masuk ke dalam dunia mereka sehari-hari. Upaya masuk tersebut juga untuk menunjukkan keberpihakan kita atas ketertindasan mereka selama ini. Visi keberpihakan — bukan sekedar kasihan — ini akan sangat menolong kita untuk lebih memahami masalah mereka yang sebenarnya dan juga mengurangi penolakan keberadaan kita dari mereka.

Banyak cara dapat dilakukan agar kita bisa mengenal dan masuk ke komunitas anak-anak itu. Biasanya ada tiga cara untuk masuk ke dalam komunitas anak-anak. *Pertama*, kita dapat masuk melalui kasus mereka. Sebagai pekerja di sektor informal — seperti diuraikan sebelumnya — anak-anak tentunya sering mendapat perlakuan tidak adil atau tidak dipenuhinya hak-hak mereka. Ketika mereka datang dan mengadukan kasusnya serta meminta kita mendampingi mereka, di sinilah saat yang tepat untuk membina hubungan awal. Dengan masuk melalui penanganan kasus ini juga bisa lebih mengetahui atau mendapatkan masukan keadaan dan komunitas mereka.

Kedua, melakukan pengenalan langsung kepada mereka di lokasi kerja. Namun cara ini agak berat dan riskan sekali apabila hendak dilakukan. Banyak waktu yang diperlukan atau hal yang harus disediakan, karena mereka dan kita sama-sama belum saling kenal. Dengan cara ini seringkali anak-anak memiliki kecurigaan dari mereka ketika melakukan pendekatan awal. Kecurigaan ini karena pengalaman mereka sehari-hari yang sering dieksploitasi oleh banyak pihak, entah itu oleh pihak yang berhubungan dengan tempat mereka bekerja atau lembaga-lembaga lain yang sering mengatasnamakan perjuangan hak mereka. Jadi sah-sah saja kalau mereka akan bersikap curiga atau pasif ketika kita dekati.

Ketiga, yakni melalui rekan atau '*local leader*' yang sudah lebih dulu dikenal. Hal yang wajar apabila mereka juga memperanyakan apa yang bisa mereka dapatkan dari perkenalan itu. Kedekatan hubungan kita dengan orang lain dari kalangan mereka sendiri akan sangat membantu, apalagi jika mereka sedang membutuhkan bantuan. Pertemanan bersama dengan kita memang diawali ketika mereka sedang terkena masalah, tetapi tidak berarti kemudian berhenti sampai di situ saja. Teman yang telah mengenal kita itu oleh mereka dianggap sebagai '*asuransi*' bagi persahabatan selanjutnya, asuransi bahwa kita dapat membantunya seperti yang telah dialami temannya (*local leader/contact person*) sebelumnya.

Setelah kita dapat diterima masuk dan mulai kenal, mungkin selanjutnya anak-anak sudah dapat diajak pada kegiatan-kegiatan alternatif seperti:

1. Mengadakan kelompok pendidikan atau kelompok bermain pada kelompok lokal. Biasanya pembentukan kegiatan dilakukan pada anak-anak yang berada di pemukiman kumuh. Proses biasanya diawali dengan perkenalan warga pada komunitas yang bersangkutan. Sehingga terbentuknya kelompok belajar dan bermain di tingkat lokal yang bersangkutan. Artinya kegiatan tersebut bukanlah semata-mata kemauan dari kita dari pihak LSM atau pendamping, tetapi sungguh-sungguh permintaan serta kebutuhan kelompok. Misalnya anak-anak di sana tidak mendapatkan kesempatan menikmati pelajaran pada sekolah-sekolah formal, sehingga pendidikan tersebut dilakukan di kelompok basis sifatnya alternatif bagi kebutuhan pendidikan anak-anak yang belum bersekolah, putus sekolah karena miskin dan anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar di sekolah formal pada komunitas yang bersangkutan.
2. Mengadakan Rumah Terbuka; pembuatan kegiatan ini bisa merupakan tempat tinggal, tempat kelompok belajar dan bermain serta perpustakaan umum kecil dengan ada pekerja sosial menjadi pendamping yang tinggal di sana. Pengadaan rumah terbuka ini mungkin sekali dilakukan dengan menyewa sebuah rumah khusus, langsung di lokasi anak-

anak pemukiman kumuh atau pekerja perkotaan. Bagi anak-anak jalanan, keberadaan rumah terbuka tidak langsung begitu saja menarik perhatian atau minat anak untuk tinggal di sana. Biasanya melalui proses pengenalan dan penumbuhan kepercayaan bahwa rumah tersebut bukan penjara atau semacam panti asuhan dan panti rehabilitasi sosial seperti yang pernah mereka alami atau kenal. Hal ini karena mereka sudah lama sekali hidup bebas dan tanpa ikatan yang mengekang. Setelah proses pengenalan terlampaui, satu persatu mereka akan datang dan tinggal bersama pendamping. Barulah secara perlahan, bersama-sama dengan mereka membicarakan tentang kelanjutan 'keluarga' di rumah terbuka itu dengan pen-damping. Misalnya saja akan diisi apa, kegiatannya, perawatannya serta aturan mainnya. Meski demikian untuk rumah terbuka yang khusus disewa, mungkin selanjutnya akan ada masalah sosialisasi dengan lingkungan sekitar.

3. Pendampingan atau kunjungan ke lapangan; kehadiran kita di lapangan atau kunjungan ke tempat-tempat mereka bekerja sangatlah berguna dalam membina hubungan kedekatan dengan anak-anak. Kunjungan kita ke lapangan akan membantu kita untuk lebih mengetahui, mengenal serta memahami dunia keseharian mereka. Ini sangat diperlukan agar kita sebagai pendamping sungguh menangkap nuansa-nuansa kehidupan yang mereka geluti dan ingin dicapai. Kedekatan yang dihasilkan dari pendampingan di lapangan akan semakin menumbuhkan kepercayaan anak-anak bahwa kita sungguh menjadi sahabat, kakak sekaligus orang tua.

Agar bisa masuk pada kegiatan tersebut, beberapa langkah pendukung diperlukan, beberapa langkah di bawah ini sebaiknya tidak dilihat secara baku dan hirarkis. Kita dapat melakukan atau menambahkannya apabila memang itu dibutuhkan, demi terlaksananya tujuan kita bersama si anak. Kita juga tidak bisa mematokkan target waktu secara mutlak pada setiap langkahnya. Proses kebersamaan dan evaluasi di setiap langkah akan sangat membantu. Meski demikian pada beberapa hal, dirasa perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Perkenalan

Melalui langkah ini kita dapat mencoba untuk lebih mengetahui serta mengenal pada tahap awal, utamanya latar belakang keluarga, latar belakang mereka sendiri, kebutuhan, keprihatinan mereka, masalah yang ada di lingkungan sekitar mereka serta masalah sosial lainnya yang mempengaruhi kehidupan mereka. Langkah ini bisa kita lakukan secara informal lewat pengamatan serta dialog yang intensif dan penuh rasa kekeluargaan baik pada si anak atau keluarganya.

Memilih materi

Setelah kita dapat mengenal satu per satu, utamanya tentang usia, pengalaman hidup mereka, serta masalah sosial yang mempengaruhi hidup mereka, barulah kita dapat menentukan secara awal — artinya dikembangkan terus oleh kita bersama si anak— materi pelayanan. Materi inilah yang akan dilakukan atau dibawakan ketika kita melakukan bentuk pendampingan di lapangan atau di rumah terbuka. Dengan pengetahuan inilah kita nantinya akan mengisi pertemanan kita bersama mereka selama program berlangsung. Materi ini tentunya harus kita waspadai dan kritisi agar tetap sesuai dengan kebutuhan si anak. Kita refleksikan terus, apakah sungguh dapat menjawab kebutuhan dan memberikan kesadaran baru bagi anak-anak.

Penyusunan Program

Selanjutnya kita dapat menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan lokasi, situasi dan kondisi anak-anak setempat. Sebaiknya lagi penyusunan program ini, disusun sesuai dengan memperhatikan hasil-hasil yang telah kita dapat pada langkah perkenalan dan pemilihan materi. Diharapkan sebelum program dilaksanakan lebih dulu didiskusikan bersama anak dan

orang tua, dengan mempertimbangkan pula sumber daya yang dimiliki lembaga pendamping atau pelaksana.

Pelaksanaan Program

Pada tahap pelaksanaan program terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar dapat menjawab kebutuhan, yakni:

Kegiatan sebaiknya berlangsung sesuai kebutuhan dan kesempatan warga setempat atau anak-anak, misalnya saja mengenai jadwal kelompok belajar. Kita tidak bisa memaksakan jadwal hanya mempertimbangkan waktu sendiri. Begitu juga dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan bersama.

Tidak terbatas pada jadwal atau waktu yang telah disusun. Ini lebih ditempatkan pada model keterlibatan pendamping yang tidak hanya datang ke lokasi pada jadwal tertentu dari si pendamping. Seringkali masalah si anak akan lebih terungkap atau terpecahkan ketika kita berdialog di lapangan, di sela-sela waktu bermain atau ketika si anak sedang bekerja.

Apabila mungkin, akomodasi serta pemeliharaan sarana kelompok atau rumah terbuka itu lebih dikerjakan oleh anak-anak serta warga lainnya. Untuk rumah terbuka di pemukiman kumuh mungkin sekali rumah terbuka merupakan sarana yang diberikan atau diadakan oleh warga secara swadaya. Ini berguna sekali untuk kelanjutan program, sehingga penyediaan sarana lebih merupakan kebutuhan program dan kondisi anak atau warga setempat, bukan karena selera pendamping semata.

Materi disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan setempat. Adakalanya secara tidak sadar kita ingin menerapkan konsep yang ada di belakang kepala kita semata. Padahal belum tentu itu baik dan dibutuhkan dalam pendampingan.

Evaluasi Program dan Kegiatan

Langkah ini perlu selalu dilakukan terhadap semua kegiatan, dengan mempertanyakan keberadaan program dan hasil yang ada. Caranya dilakukan dengan mengadakan catatan rekaman pendampingan dan perkembangan yang dicapai oleh setiap anak maupun juga secara kelompok. Selain itu kita dapat juga melakukan evaluasi melalui dialog dengan anak atau dengan keluarganya. Bisa juga dengan mengadakan sebuah kegiatan bersama dengan kelompok lain dalam bentuk rekreasi bersama, guna mengatur perjalanan pendampingan selama ini.

Pengakuan dan Perlindungan Anak-anak Miskin Perkotaan

Bentuk kegiatan pendampingan pada pola pendidikan alternatif dirumuskan berdasarkan kebutuhan yang ada pada kelompok lokal. Pada dasarnya masing-masing kelompok lokal mengalami proses kemiskinan yang sama, juga dalam hal memperoleh pendidikan atau pengembangan diri. Dari pengalaman selama ini bentuk pendampingan seperti di atas dapat berguna, seperti meningkatkan solidaritas anak-anak. Dengan bentuk ini anak-anak semakin yakin akan pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam menghadapi masalah yang terjadi atau yang akan timbul.

Kegiatan seperti ini juga dapat menumbuhkan kesadaran baru. Dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, ternyata mampu membuka cakrawala anak terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Mereka tidak lagi curiga, percaya akan kemampuan sendiri, berani, kreatif serta kritis terhadap lingkungan sekitar, menumbuhkan kebebasan, penghargaan serta suasana saling berdialog dalam setiap pertemuan, menumbuhkan dan mengembangkan daya kreatifitas sesuai dengan zamannya.

Mereka juga sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai anak dan warga negara yang selama ini belum pernah mereka nikmati. Anak-anak mampu dengan bebas mengungkapkan

tentang sesuatu yang menjadi masalah, kebutuhan, serta memahami keterbatasan secara rasional.

Melalui beberapa catatan di atas kiranya memberi gambaran pada kita bagaimana situasi anak-anak miskin di kota, bagaimana sikap masyarakat dan pemerintah daerah. Hingga akhirnya dapat membantu kita untuk menyusun beberapa agenda penting guna melakukan advokasi sebagai langkah pembelaan dan penyadaran. Pembelaan ini dilakukan agar mereka diperlakukan aman oleh pihak pemerintah dan masyarakat umum. Ini baru dapat kita lakukan jika dibarengi dengan langkah penyadaran terhadap si anak sendiri, pada masyarakat dan pihak pemerintah. Anak diajak dan dibuka kesadarannya bahwa hak-hak mereka sebagai anak atau warga negara telah dihancurkan oleh orang-orang sekitarnya. Untuk itulah mereka diajak memperjuangkannya agar dapat mereka raih kembali. Proses perjuangan itu juga memberikan kesadaran anak bahwa selama ini sistem yang dibuat oleh penguasalah penyebabnya. Sistem tersebut juga telah merasuk ke dalam masyarakat, sehingga masyarakat ikut memperlakukan mereka secara tidak manusiawi.

Guna mendukung advokasi di atas, patut dibarengi pula dengan langkah-langkah membangun kesadaran baru pada pihak penguasa dan masyarakat umum. Agar kedua pihak tersebut memberikan pengakuan serta (perlakuan) perlindungan bagi anak-anak miskin perkotaan. Misalnya saja agar pemerintah daerah mau mencabut peraturan-peraturan, seperti Perda No. 11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum atau yang sejenis yang selama ini menindas dan merampas kesempatan mereka sebagai warga kota, utamanya dialami oleh anak-anak miskin perkotaan agar dapat bekerja dengan aman.

Menghadapi masalah anak-anak miskin perkotaan, hendaknya pihak 'penguasa' mau pula membangun atau mengadakan Komisi Nasional Anak-anak, semacam Komisi Nasional Hak Azasi Manusia. Melalui Komisi Nasional Anak-anak ini dapat dilakukan secara khusus penanganan dan monitoring urusan anak-anak, sehingga pemerintah secara sadar turut merubah

pandangan dan pendekatan dalam penanganan anak-anak miskin perkotaan melalui pendekatan kesejahteraan dan bukan lagi dengan pendekatan ketertiban. Dengan demikian anak-anak mendapat kesempatan memperbaiki kehidupan di tengah-tengah masyarakat.

Pada kenyataannya memang cita-cita ini tidak bisa tercapai dengan mudah dan cepat, banyak sekali kendala yang akan dihadapi karena telah mapannya masyarakat dan penguasa kita akan kenikmatan hasil fisik dari pembangunan yang telah dicapai selama ini. Untuk itu diperlukan kesabaran serta kesetiaan dalam melakukan advokasi tersebut.

Sulit sekali kita untuk tidak mengakui atau hendak menghapus sumbangan dan jasa anak-anak miskin perkotaan terhadap penghasilan keluarga atau ekonomi nasional. Kehadiran mereka telah begitu banyak memberikan jasa, sulit bagi kita memungkiri bahwa anak-anak miskin perkotaan adalah pemeran penting dalam pengurangan biaya hidup keluarga.

Pandangan yang melarang anak-anak miskin bekerja atau menjauhkan mereka dari kegiatan ekonomi justru telah mempermiskin kehidupan anak dan keluarga. Larangan itu justru telah menyesatkan kita sehingga masuk pada solusi sederhana, yakni menarik anak-anak miskin dari dunia pekerjaan agar lepas dari bayangan ancaman penindasan. Hendaknya kita mencermati lebih kritis lagi pelarangan bekerja bagi anak-anak miskin, karena ini justru cenderung menjadi sumber potensial bagi pendalaman kemiskinan, sekali pun itu dilandasi oleh itikad mulia. Ada kesan dengan pendekatan pelarangan anak-anak bekerja ini tidak akan memberikan ruang bagi sebagian besar anak-anak miskin yang bekerja lepas dari bayangan kemiskinan.

Pelarangan itu sekaligus juga menunjukkan bahwa kita lupa, kemiskinanlah yang menjadi salah satu faktor yang mendo-rong anak-anak miskin bekerja. Dengan bekerja itulah yang menjadi sumbangan anak-anak miskin terhadap keluarganya, meski ukuran sumbangannya kepada keluarga relatif kecil. Namun yang kita tidak bisa disangkal lagi adalah bahwa ada arti khusus

anak-anak sebagai faktor penting dalam me-ngurangi sebagian biaya yang mesti dikeluarkan orang tuanya.

Hal yang terasa lebih menggelisahkan juga adalah pasar tenaga kerja yang memberikan peluang besar bagi mereka untuk terlibat dalam proses produksi. Kita tentu tidak bisa menutup mata bahwa tenaga kerja anak-anak dihargai lebih murah dan mudah dikendalikan ketimbang tenaga kerja dewasa.

Sikap yang selalu dicoba dengan advokasi ISJ adalah mencoba agar anak-anak miskin perkotaan yang bekerja agar tetap diberi peluang — mungkin ini cukup menggelisahkan banyak orang. Sambil mendukung keberadaan anak-anak miskin bekerja, ada kehendak yang kuat untuk melindungi anak dari ancaman kekerasan dan memberikan peluang bagi mereka untuk menikmati hak-hak sebagai anak. Juga ada kehendak kuat lain untuk terus mempertanyakan diri sendiri tentang sikap yang perlu kita ambil terhadap gejala yang menggelisahkan itu. Siapakah kita sebenarnya yang ingin menutup mata dan membiarkan anak-anak miskin yang keluar dari 'buaya' kemiskinan, kemudian masuk ke dalam mulut 'harimau' kemiskinan? Siapakah kita sebenarnya yang membiarkan kepalan jari-jari tangan kecil yang lemah berhadapan dengan situasi buruk yang bersama-sama kita ciptakan?

Perlindungan Anak Marjinal dari Ancaman HIV/AIDS

Cecep Junaedi

Yayasan Mitra Indonesia, Jakarta

Pendahuluan

Sebagai suatu pandemi, HIV atau virus penyebab AIDS telah menyebar ke seluruh dunia. Dampak penularannya yang sebagian besar melalui hubungan seksual bukan hanya mengancam orang-orang dewasa, tetapi juga turut mengancam anak-anak. Ancaman terhadap anak-anak inilah yang menyebabkan sebagian besar negara-negara di dunia ini telah menjadikan HIV/AIDS sebagai masalah utama, karena baik secara langsung ataupun tidak akan mempengaruhi perkembangan anak-anak yang kelak akan menjadi harapan dan masa depan suatu negara atau bangsa.

Wabah HIV/AIDS mulai muncul pada pertengahan tahun 70-an, kemudian pada tahun 1980 sekitar 100.000 orang di seluruh dunia telah terjangkiti virus yang hingga kini belum ditemukan penangkalnya. Maka sejak saat itulah wabah ini menyebar luas dengan cepat dan menjangkau ke berbagai negara dan seluruh dunia. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), pada tahun 1993 telah ada sekitar 19,5 juta orang di seluruh dunia telah terinfeksi HIV dan kurang lebih 1,2 juta di antaranya adalah anak-anak. WHO memperkirakan juga bahwa pada 3 tahun berikutnya, yakni pada tahun 1996 jumlah anak yang terinfeksi akan menjadi dua kali lipat atau sekitar 2,3 juta anak. Ini kenyataan bahwa penyebaran HIV/AIDS juga merupakan ancaman bagi anak-anak di seluruh dunia dan termasuk juga anak-anak di Indonesia.

Ada dua macam ancaman HIV/AIDS bagi anak-anak, yakni ancaman tidak langsung dan langsung. *Pertama*, yakni ancaman tidak langsung melalui penularan dari ibu yang telah terinfeksi

HIV kepada bayinya, baik selama mengandung, pada saat melahirkan maupun di saat bayi disusui. Anak-anak yang terinfeksi HIV yang kemudian menjadi AIDS dari ibunya ini akan meninggal paling lama pada usia 5 tahun.

Sementara itu bagi orangtua yang terjangkiti AIDS dan meninggal, anak-anak akan turut pula terancam kehidupannya di masa depan. Anak-anak yang tanpa orang tua ini tentunya akan terlantar sehingga akan rentan terhadap penyakit, kekurangan gizi dan akan ikut mengganggu perkembangan jiwa anak. Hingga akhirnya anak-anak terlantar dan tentunya akan membawa mereka ke jalan-jalan untuk mempertahankan hidupnya. Mereka akan bergabung dengan teman-teman senasibnya di jalanan. Ini berarti akan menambah beban masalah sosial dan perlu diperhatikan oleh semua pihak yang berkompeten terhadap masalah ini.

Kedua, yakni ancaman HIV/AIDS yang bersifat langsung kepada anak-anak. Ancaman ini lebih ditujukan terhadap anak-anak yang kehidupannya dituntut untuk dekat dengan perilaku seksual dan beresiko tinggi seperti seks bebas, prostitusi, seks tanpa pengaman dan sebagainya. Utamanya anak-anak marjinal yang hidup di jalan dan terlantar.

Sama halnya dengan anak-anak lain yang sebaya dengan mereka, anak-anak marjinal juga memerlukan kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang. Apalagi dalam usia tersebut anak-anak yang dalam masa pertumbuhan itu mulai muncul dorongan seksualitas, biasanya pula mereka mempunyai keinginan untuk mencoba-coba sesuatu yang baru dan termasuk juga mencoba-coba melakukan hubungan seks.

Kendati demikian ada juga anak-anak yang terancam karena ketidakberdayaan dan ketiadaan perlindungan terhadap anak-anak. Kerap kali mereka tidak mampu melindungi diri dari ancaman, bujukan maupun pemaksaan seksual orang-orang dewasa yang memanfaatkan kelemahan dan ketidakberdayaan mereka. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi ancaman dan bujukan yang datang kepada anak-anak itu adalah karena tidak ada yang melindungi diri mereka.

Program

Upaya perlindungan dan pemberdayaan anak marjinal terhadap risiko penularan HIV/AIDS, juga didasarkan pada salah satu prinsip yang tertuang dalam Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS. Dalam prinsip tersebut dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat informasi yang benar, sehingga mereka dapat melindungi diri sendiri dan orang lain terhadap penularan HIV/AIDS.

Sementara itu kurangnya akses informasi yang dihadapi mereka terhadap pencegahan penyakit maupun pelayanan kesehatan, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kemiskinan. Kebutuhan dasar dan esensial untuk bertahan — makan, minum dan tempat tinggal— adalah yang lebih diutamakan, ketimbang kepentingan masalah kesehatan.

Yayasan Mitra Indonesia (YMI) sebagai salah satu yayasan non profit yang bergerak dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, salah satu program kegiatannya adalah Program Penjangkauan Masyarakat (*Community Outreach*) yang dimulai sejak awal tahun 1995. Di samping itu program YMI yang dilakukan antara lain seperti *hotline*, pelatihan dan advokasi.

Program Penjangkauan Masyarakat YMI dirancang untuk membantu kelompok-kelompok masyarakat yang sulit dijangkau oleh program pemerintah, baik pada masalah akses informasi maupun pelayanan kesehatan. Kelompok sasaran program ini adalah kaum muda jalanan dan kaum muda di daerah pemukiman miskin. Pada kedua kelompok sasaran tersebut masalah yang dihadapinya tidak jauh berbeda, baik kaum muda jalanan maupun anak marjinal sama-sama menghadapi masalah waktu hidup yang lebih banyak berada di jalanan. Keduanya juga sama-sama menghadapi permasalahan kemiskinan, kerawanan sosial, kurang akses informasi dan kurang pelayanan kesehatan.

Sedang pengertian pemukiman miskin di perkotaan menurut Bianpoen (1991) adalah pemukiman dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Anggota keluarga terdiri dari lima orang atau lebih.
- b. Tingkat pendidikan kepala keluarga hanya lulus SD atau lebih rendah.
- c. Pendapatan bulanan rata-rata antara Rp132.000,00 sampai Rp254.000,00
- d. Kondisi rumah di bawah standar yang dapat di terima.
- e. Tidak memiliki jamban keluarga.

Dalam pengertian kaum jalanan pada program penjangkauan di sini adalah laki-laki maupun perempuan antara usia 15 sampai dengan 30 tahun yang sebagian besar waktunya ber-ada di jalan, gang-gang, terminal bus, stasiun KA dan tempat-tempat umum tanpa suatu aktivitas yang jelas. Sedangkan pengertian kaum muda daerah miskin atau kumuh adalah kaum muda baik laki-laki atau perempuan antara usia 15 sampai dengan 30 tahun yang mendiami pemukiman miskin di daerah perkotaan seperti halnya Jakarta.

Tujuan penjangkauan itu sendiri adalah meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian kelompok sasaran yang dalam hal ini adalah kaum muda jalanan akan bahaya AIDS. Diharapkan mereka juga dapat memperoleh informasi yang benar tentang HIV/AIDS, baik penularan maupun pencegahannya agar mereka dapat melindungi diri sendiri dan teman-teman sesama kelompoknya.

Daerah sasaran program penjangkauan program YMI adalah daerah pasar Senen dan sekitarnya. Dipilihnya daerah Senen sebagai daerah penjangkauan karena daerah ini begitu kompleks dengan berbagai permasalahan sosial, selain itu daerah Senen dipertimbangkan sebagai salah satu pusat perdagangan dan hiburan. Suatu karakteristik yang erat hubungannya dengan permasalahan anak marjinal di daerah perkotaan.

Teknik Pendekatan

Sebelum melakukan pendekatan terhadap kelompok sasaran, kami melakukan suatu survei atau observasi yang disebut *Need Assessment Study*. Tujuan survei ini adalah untuk menggali informasi tentang berbagai hal yang menyangkut demografi dan psikografi kelompok sasaran dari wilayah yang akan dijangkau.

Secara garis besar survei ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran wilayah penjangkauan dengan mengumpulkan berbagai informasi yang mencakup:

1. Gambaran demografi (kependudukan) daerah penjangkauan yang meliputi: umur, pendapatan, suku bangsa, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan dan lain-lain, termasuk pengaruh persebaran pengaruh suatu kelompok.
2. Besaran masalah, terutama yang menyangkut perilaku seks kelompok sasaran.
3. Studi Pengetahuan, Sikap dan Perilaku (PSP) kelompok sasaran terhadap seks, Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS.
4. Potensi tenaga relawan di daerah penjangkauan.
5. Akses terhadap media informasi, baik media cetak, elektronik maupun tradisional.

Informasi-informasi tersebut di atas bisa diperoleh dengan langsung turun ke daerah penjangkauan maupun dengan melakukan studi literatur mengenai penelitian terhadap kelompok sasaran. Dalam pengumpulan informasi dari lapangan dilakukan pendekatan melalui dua macam metode, yaitu:

1. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*), yaitu dengan melakukan tanya-jawab dengan satu orang informan dengan maksud menggali informasi sikap, perilaku dan pengetahuan.
2. Metode *Focused Group Discussion* (FGD) yaitu pengumpulan informasi dari suatu kelompok diskusi. Metode ini cukup efektif untuk menggali kebiasaan, kepercayaan maupun bahasa atau istilah yang biasa dipakai oleh kelompok sasaran.

Metode ini juga bermanfaat untuk penyusunan untuk materi KIE yang akan diberikan kepada kelompok sasaran.

Manajemen Lapangan

Untuk memudahkan pelaksanaan program penjangkauan masyarakat di lapangan, secara garis besar ditentukan komponen penunjang yang fungsinya adalah untuk menunjang penyampaian informasi yang akan diberikan. Komponen tersebut terbagi dua yaitu:

Komponen Lapangan

Komponen ini menunjang penyebaran informasi di lapangan. Dalam penyebarannya komponen ini ditunjang dengan:

- a. Petugas *Outreach* (PO) yaitu orang dari organisasi dalam hal ini YMI yang bertugas sebagai penghubung yayasan dengan kelompok sasaran.
- b. Penyuluh Sebaya (*Peer Educators*), yaitu anak muda jalanan yang telah diberikan pelatihan untuk menyuluh sesama temannya secara sukarela.
- c. Perantara, yaitu individu-individu atau orang-orang yang mau membantu pelaksanaan program secara sukarela. Perantara ini bisa tukang rokok, tukang koran, tukang semir atau orang-orang di kelompok sasaran yang tersedia dititipi brosur, stiker, buklet atau yang media komunikasi lainnya.
- d. Pos Lapangan, dari pengamatan dan pengalaman lapangan, setiap kelompok punya tempat-tempat tertentu sebagai titik pertemuan kelompok. Tempat ini bisa warung di pinggir jalan, kios rokok atau tempat-tempat yang disepakati secara tidak tertulis sebagai tempat berkumpul. Tempat-tempat seperti ini berfungsi sebagai tempat pertemuan informal, pemberian materi KIE dan sebagai media.

Komponen Program

Komponen ini terdiri atas sejumlah PO yang bertugas menjawab dan memenuhi kebutuhan lapangan. Seperti media, komunikasi, informasi dan alat edukasi, bantuan hukum, Pelatihan dan ceramah serta membantu mengatasi hambatan teknis di lapangan. Komponen program juga bertugas membantu mendesain program lapangan yang sesuai untuk diterapkan di daerah penjangkauan.

Teknik Pengjangkauan Masyarakat ini dinilai cukup efektif digunakan untuk menyebarluaskan informasi mengenai HIV atau AIDS, utamanya untuk menjangkau kelompok-kelompok perilaku seksual berisiko tinggi, seperti pekerja seks, kaum homoseksual, waria dan termasuk anak muda jalanan. Melalui teknik ini diharapkan bukan hanya meningkatnya pengetahuan mengenai bahaya HIV/AIDS dan kesadaran akan perilaku seksual berisiko tinggi, tetapi memungkinkan juga terjadinya perubahan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Hal ini disebabkan oleh program yang bukan hanya untuk perubahan per individu.

Pelaksanaan Program Penjangkauan Masyarakat

Secara garis besar ada beberapa tahap yang dilakukan dalam Program Penjangkauan Masyarakat YMI, yakni antara lain:

Perencanaan Program

Perencanaan program penjangkauan YMI dilakukan selama kurang lebih tiga bulan. Perencanaan ini menyangkut penentuan tujuan, kelompok sasaran, daerah sasaran dan metode pendekatan yang digunakan dalam program penjangkauan.

Perekrutan dan Pelatihan Penjangkauan

Dalam pelaksanaan program penjangkauan masyarakat membutuhkan beberapa petugas penjangkauan masyarakat atau petugas *outreach* (PO) yang bekerja di lapangan untuk menjangkau kelompok sasaran yang sudah direncanakan. Para PO

yang telah direkrut kemudian diberikan pelatihan mengenai dasar-dasar penjangkauan masyarakat selama empat hari.

Survei atau Observasi Lapangan

Survei untuk tujuan *Need Assessment Study* ini dilakukan oleh para PO yang telah mendapat pelatihan. PO mengadakan pendekatan terhadap kelompok-kelompok sasaran dengan maksud untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran daerah yang akan dijangkau, seperti mengenai pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap HIV/AIDS kelompok sasaran, serta informasi lainnya yang dibutuhkan.

Perekrutan dan Pelatihan Penyuluh Sebaya

Petugas Outreach juga dapat mengetahui potensi kelompok sasaran ketika di lapangan, juga akan dapat menentukan siapa-siapa *informal leader* atau yang berpengaruh dalam kelompok sasaran. Penyeleksian ini cukup beralasan karena pada saatnya nanti mereka akan mendapat dilatih dan dibekali pengetahuan mengenai HIV/AIDS setelah itu mereka akan menjadi penyuluh bagi kelompok sesamanya (*peer educators*).

Setelah mendapatkan bekal informasi mengenai HIV/AIDS dari pelatihan mereka akan menyampaikannya lagi kepada teman-teman sebaya mereka.

Monitoring

Dalam tahap ini PO di lapangan akan bertugas memonitor perkembangan dan hambatan-hambatannya yang dihadapi *informal leader* dalam penyampaian informasi kepada teman-temannya. Peranan PO di sini adalah sebagai jembatan antara kepentingan yayasan atau lembaga dengan kepentingan kelompok sasaran, karena mereka bekerja sebagai pekerja sosial dan juga sebagai wakil dari lembaga atau yayasan yang bekerja di lapangan.

Evaluasi

Sampai pada tahap ini biasanya secara periodik setiap enam bulan atau satu tahun akan dilihat perkembangan pelaksanaan program yang telah dicapai, hambatan-hambatan, serta masalah-

masalah yang dihadapi, sehingga pada tahap pelaksanaan berikutnya dapat ditentukan strateginya.

Kendala dan Hasil Kerja

Melalui pendekatan program penjangkauan YMI pada kelompok sasaran kaum muda jalanan di daerah Senen, diperoleh informasi bahwa pengetahuan mengenai HIV/AIDS ternyata masih kurang. Hal ini disimpulkan dari pertanyaan yang telah dilontarkan kepada beberapa orang di antara mereka melalui wawancara mendalam. Jawaban mereka bervariasi ketika ditanyakan Apa itu AIDS? Di antaranya, yaitu tidak tahu dan belum pernah mendengar, tidak tahu tapi sudah pernah mendengar — dari media cetak atau elektronik atau sumber lain, sudah tahu tapi hanya sedikit.

Kurangnya pengetahuan mengenai HIV/AIDS ada hubungannya dengan rendahnya akses informasi, baik melalui media cetak, media elektronik, maupun penyuluhan. Kehidupan sehari-hari mereka di jalan telah menyebabkan mereka kurang memiliki waktu untuk memperoleh akses informasi tersebut. Kondisi ini diperburuk dengan kehidupan anak muda jalanan yang sudah tidak asing lagi dengan perilaku seksual berisiko tinggi. Permasalahan yang sering dihadapi anak muda jalanan di daerah Senen dalam perilaku seksual berisiko tinggi seperti:

- seks bebas dengan berganti pasangan
- seks bebas dengan pekerja seks
- melayani seks *om-om*¹
- seks tanpa pelindung
- seks anal, dan lain-lain

Penyebaran informasi HIV/AIDS kepada anak jalanan dilakukan melalui program pelatihan penyuluh sebaya, pelatihan ini telah menghasilkan lima orang penyuluh sebaya untuk

¹ Orang dewasa yang bukan berasal dari kelompok mereka, biasanya mereka mencari kepuasan seks dari anak-anak jalanan dan anak-anak ini kemudian mendapat imbalan.

menerangkan informasi mengenai HIV/AIDS kepada teman-teman di kelompok mereka. Penyuluh sebaya ini terdiri dari tukang rokok, tukang semir, kuli panggul dan tukang parkir di daerah Pasar Senen.

Materi Pelatihan Penyuluh Sebaya
√ Dasar-dasar pengetahuan mengenai HIV/AIDS √ Pengetahuan umum mengenai Penyakit Menular Seksual (PHS) √ Dasar-dasar komunikasi

Setelah mereka mendapatkan pelatihan tentang materi HIV/AIDS, di saat kembali ke kelompoknya mereka diharapkan dapat membagikan pengetahuannya kepada teman-teman di kelompoknya. Ketika menyuluh teman-temannya, mereka selalu dipantau oleh petugas *outreach*, utamanya untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi mereka dan apa yang dibutuhkan dalam hal penyampaian informasi tersebut.

Pertemuan antara petugas *Outreach* dengan penyuluh sebaya biasanya teratur tiap seminggu sekali. Dari hasil pertemuan ini bisa dilihat adanya perubahan pada mereka. Seperti meningkatnya pengetahuan HIV/AIDS (tidak tahu menjadi tahu), serta adanya kesadaran tentang perilaku yang beresiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS.

Program penjangkauan yang baru berjalan ini juga menghadapi kendala-kendala. Selain keterbatasan biaya yang dimiliki, adanya keterbatasan jumlah PO di lapangan telah mengakibatkan pula sempitnya waktu PO untuk turun ke lapangan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi lebih banyak berasal dari faktor intern YMI, karena YMI hanya memiliki kekuatan 5 orang petugas *outreach*, sehingga untuk menjangkau sasaran di beberapa tempat yang berbeda hanya dapat melakukan kunjungan minimal satu minggu sekali. Tenaga PO untuk program ini harus pula diambil dari relawan program yang lain,

sedangkan mereka juga memiliki kegiatan di luar kegiatan YMI yang lain seperti *Hotline AIDS*, pelatihan maupun penyuluhan.

Namun hambatan yang dihadapi ini bukan menjadi suatu permasalahan utama untuk memberikan informasi kepada anak muda jalanan, karena program penjangkauan ini lebih dititik-beratkan pada aktivitas lapangan dengan membentuk dan melatih tenaga penyuluh relawan di lapangan. Kendala YMI ini dengan demikian dapat diatasi lewat program penyampaian informasi dari mereka untuk mereka, sehingga YMI berfungsi sebagai pelatih, fasilitator, motivator, serta narasumber penyuluh sebaya.

Sistem Rujukan

Sering permasalahan yang ditemukan di lapangan terkadang di luar kemampuan Petugas *Outreach* (PO), serta bukan pula tanggung-jawab mereka sepenuhnya. Keterbatasan kemampuan tugas PO di lapangan menuntut pula adanya dukungan dari pihak lain, sehingga memudahkan tugas yang dilakukan oleh PO dan juga dapat membantu kelompok sasaran atas permasalahan yang ditemukan. Dukungan yang dimaksud di sini adalah adanya "sistem rujukan".

Dasar-dasar pengetahuan mengenai PMS, seperti gejala-gejala penyakit, pencegahan maupun pengobatannya diberikan kepada setiap PO. Demikian pula untuk permasalahan yang bersifat umum, dengan pengetahuan dasar yang dimiliki oleh seorang PO akan dapat diterapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai PMS. Namun kalau permasalahannya sudah menyangkut hal khusus dan pelayanan klinis sudah bukan menjadi tugas seorang PO lagi. Mereka memerlukan pelayanan medis dari seorang dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi tugas seorang PO dalam hal ini adalah memberikan informasi atau 'rujukan' agar mereka dapat memperoleh pelayanan medis dan tempat berobat ke klinik dokter terdekat dengan ongkos pengobatan yang murah kalau tidak bisa cuma-cuma.

Sistem rujukan seperti ini akan sangat berguna bagi perlindungan anak marjinal terhadap ancaman HIV/AIDS dan lebih efektif lagi bila sistem rujukan tersebut mencakup pemberian informasi dan *konseling* mengenai HIV/AIDS, sehingga mereka sadar akan bahaya HIV/AIDS dan mampu untuk melindungi diri sendiri dan kelompoknya dari ancaman penularan HIV/AIDS.

Upaya Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak Marjinal

Sama halnya dengan permasalahan lain yang menyangkut kesejahteraan anak marjinal, seringkali anak-anak marjinal mendapatkan penindasan, diskriminasi, pemaksaan seksual dari orang-orang dewasa yang memanfaatkan kelemahan dan ketidakberdayaan mereka. Untuk itu maka dukungan atau advokasi sederhana namun kami rasa sangat efektif apabila dengan suatu jaringan kerja atau *network* yang baik terbentuk dari organisasi-organisasi baik pemerintah maupun nonpemerintah yang memiliki kepedulian terhadap masa depan anak marjinal.

Salah satu wujud upaya dari perhatian pemerintah terhadap permasalahan anak adalah diberlakukannya Undang-Undang Kesejahteraan Anak pada tahun 1979 yang menjamin hak-hak anak. Kemudian yang terpenting lagi adalah dikeluarkannya Keppres No. 4 Tahun 1984 yang menetapkan tanggal 23 Juli 1984 sebagai hari Anak Nasional. Melalui Keppres inilah kemudian terbentuk organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap masalah anak. Namun karena kompleksnya permasalahan anak dalam pembangunan nasional, baik yang menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, sosial-ekonomi maupun kebudayaan membawa konsekuensi logis bahwa semakin banyak permasalahan yang sulit dijangkau pemerintah. Apalagi masalah anak-anak marjinal yang sebagian besar waktunya berada di jalan, kondisi seperti inilah yang membuat program-program pemerintah terhadap kesejahteraan anak lewat berbagai media informasi baik cetak

maupun elektronik belum cukup untuk dapat menyentuh mereka.

Dalam hubungannya dengan masalah HIV/AIDS pemerintah juga telah menunjukkan tanggungjawabnya dengan membentuk suatu Komisi Penanggulangan AIDS, dengan diketuai oleh Menko Kesra Ir. Azwar Anas telah pula menghasilkan suatu keputusan yang penting, yaitu lahirnya Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS. Kepedulian pemerintah juga memancing timbulnya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi nonpemerintah yang peduli terhadap masalah HIV/AIDS. Kontribusi pemerintah juga diikuti dengan perangkat-perangkat berupa keputusan, undang-undang dan peraturan lainnya untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan LSM-LSM yang peduli terhadap masalah anak dan AIDS/HIV.

Saran dan Penutup

Dalam hal bentuk perlindungan anak-anak marjinal, utamanya terhadap HIV/AIDS, saran yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

Kepada pemerintah atau para pengambil keputusan

1. Sebaiknya dibuat lagi suatu peraturan/undang-undang/ surat keputusan yang khusus, dalam upaya perlindungan anak-anak marjinal terhadap ancaman HIV/AIDS.
2. Sebaiknya upaya yang menyangkut perlindungan perlu didukung oleh suatu sistem rujukan yang dapat menjamin konsistensi penanganan anak marjinal oleh suatu organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah.
3. Pemerintah sebaiknya mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi anak marjinal, utamanya terhadap ancaman HIV/AIDS.

Kepada masyarakat atau organisasi-organisasi non pemerintah (Ornop)

1. Upaya yang dilakukan ornop terhadap perlindungan anak marjinal perlu terus menerus dan secara berkesinambungan.
2. Perlu dibentuk forum kerjasama antarOrnop dan antara Ornop dengan pemerintah dengan pemerintah dalam penanganan masalah perlindungan anak marjinal terhadap HIV/AIDS.

Sebagai penutup perlu ditekankan beberapa hal penting bahwa upaya perlindungan dan pemberdayaan anak marjinal, utamanya terhadap ancaman HIV/AIDS perlu adanya suatu kebersamaan berupa suatu wadah antara pemerintah dan organisasi non pemerintah yang serasi. Untuk itu maka dalam penanganan masalah HIV/AIDS, apalagi terhadap anak-anak di mana pun dia dan siapapun dia perlu mendapat perlindungan dari wabah ini.

Potret Buram Anak Jalanan

Nusa Putra
Yayasan Nanda Dian Nusantara, Jakarta

Latar

Di masa lalu anak muda Indonesia pernah memilih anak jalanan sebagai idola, namanya ALI TOPAN. Ali Topan adalah simbol dari banyak fenomena, mulai dari perubahan nilai dalam keluarga, sampai perlawanan pada kemapanan dan pengejawantahan kebebasan. Jalanan adalah tempat yang paling cocok untuk mewujudkan semuanya, seperti yang diungkap SWAMI dalam lagu BONGKAR.

Jika saja semua anak jalanan seperti Ali Topan, mungkin kita tidak perlu membicarakan masalah anak untuk ikut serta memikirkan-kannya. Mungkin juga tidak pernah ada Yayasan Nanda Dian Nusantara yang mengurus mereka. Sebagai gantinya mungkin akan didirikan 'Yayasan Bunda Pelita Nusantara' yang akan membina para ibu untuk mencegah munculnya Ali Topan-Ali Topan yang lain.

Persoalannya, anak jalanan yang kini dibicarakan adalah anak-anak yang terpaksa dan dipaksa ke jalanan oleh orang tuanya atau oleh keadaan, utamanya karena masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan. Karena itu masalah yang kemudian muncul berbeda sama sekali dengan anak jalanan model Ali Topan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah titik tolak bagi program konkret untuk meningkatkan kualitas hidup anak jalanan.

Anak Jalanan: Siapakah Mereka?

Penjelasan siapa anak jalanan itu, tidak didasarkan pada pendapat para pakar berbagai organisasi dan departemen

yang sampai saat ini belum memiliki kesamaan pendapat dan definisi tentang anak jalanan itu. Penjelasan akan diuraikan berdasarkan pengalaman lapangan mengurus anak jalanan di lokasi-lokasi yang pernah ditangani, seperti di Grogol dan Tanjung Priok, serta yang masih dikelola di (1) Pasar Induk Kramat Jati, (2) Pasar Kebayoran Lama, (3) Pasar Burung Rawa Bunga, (4) Pasar Ikan Muara Angke, (5) Pasar Ikan Kota, (6) Pemukiman Kumuh Pasar Mangga Dua dan (7) Perkampungan Nelayan Kenjeran Surabaya, serta daerah-daerah yang akan digarap yaitu (1) Pasar Ular Rawasari Jakarta, (2) Pasar Turi, (3) Pasar Wonokromo dan (4) Kompleks Dolly di Surabaya.

Secara umum beberapa ciri anak jalanan itu adalah:

1. berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3 - 24 jam sehari
2. berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, sedikit sekali yang tamat SD)
3. berasal dari keluarga-keluarga tidak mampu (kebanyakan kaum urban, beberapa di antaranya tidak jelas keluarganya)
4. melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal¹)

Adanya ciri umum yang dikedepankan di atas tidak berarti bahwa fenomena anak jalanan merupakan fenomena yang tunggal. Penelusuran yang lebih empatik dan intensif ke dalam kehidupan mereka menunjukkan adanya keberagaman. Keberagaman itu antara lain disebabkan oleh latar belakang keluarga, lamanya berada di jalanan, lingkungan tempat tinggal, pilihan pekerjaan, pergaulan dan pola pengasuhan. Tidak mengherankan terdapat keberagaman dalam pola tingkah laku, kebiasaan dan tampilan anak-anak jalanan itu.

Anak-anak jalanan yang tinggal bersama orang tua, masih sekolah dan berada di jalanan sekedar mencari tambahan bagi

¹ Tentu tidak termasuk dalam kategori ini para ABG — Anak Baru Gede — yang 'nongkrong' di pusat-pusat pertokoan atau yang kini dikenal dengan Remaja Mall. Mereka lebih tepat disebut anak jalanan.

nafkah keluarga, biasanya masih memiliki banyak persamaan dengan anak-anak lain. Hanya saja ada di antara mereka yang berperilaku agak bebas, liar, dan berani. Ada pula anak jalanan yang tinggal bersama orang tua, tidak lagi bersekolah atau tidak bersekolah sama sekali, lebih lama berada di jalanan dan memiliki beban yang lebih berat untuk menafkahi diri dan keluarganya. Anak-anak seperti ini biasanya memiliki teman sebaya untuk berkumpul dan berbagi. Pada umumnya kelompok teman sebaya dapat menjadi pesaing orang tua dalam hal pengaruh. Anak-anak jenis ini sikapnya sudah banyak berbeda dengan anak-anak lain yang bukan anak jalanan. Terdapat pula anak jalanan yang tinggal bersama orang tua dan menjadi tulang-punggung keluarga dalam mencari nafkah. Mereka biasanya bekerja lebih keras karena keluarganya secara ekonomis sangat tergantung pada penghasilan mereka. Anak-anak seperti ini pada umumnya sering konflik dengan orang tuanya.

Ada juga anak-anak jalanan yang tinggal bersama-sama teman sebaya dan orang yang lebih tua, sementara orang tuanya di kampung. Kelompok-kelompok itu ada yang memiliki 'bos' yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti loper koran atau pengasong rokok, ada pula yang memiliki 'bos' berdasarkan kebersamaan tempat tinggal dan masing-masing bekerja pada bidang yang berbeda. Juga ada yang terpaksa memiliki 'bos' dan menyeter sejumlah upeti untuk kelangsungan pekerjaan atau jaminan keamanan. Di antara anak-anak itu ada yang masih rajin pulang ke kampung menjenguk orang tua dan menyerahkan sebagian jerih payahnya, ada yang sesekali saja pulang kampung, setahun sekali di waktu lebaran, bahkan ada yang sama sekali telah hampir putus hubungannya dengan keluarga di kampung.

Anak-anak dari jenis ini biasanya sangat tergantung dan dipengaruhi oleh kelompok. Hidup dan perilaku mereka relatif sangat bebas, praktek seks bebas, sodomi, dan kebiasaan menenggak minuman keras tumbuh berkembang dengan sangat cepat dalam kelompok ini. Biasanya mereka juga suka berpindah-pindah tempat tinggal. Ada yang ikatan

kelompoknya sangat kuat, baik karena kesamaan daerah asal, jenis pekerjaan maupun karena telah hidup bersama dalam jangka waktu lama.

Terdapat juga anak jalanan yang masih memiliki orang tua, tetapi memberontak dan sepenuhnya melepas diri dari orang tua. Kebanyakan mereka yang tinggal sekota dengan orang tuanya memilih tempat tinggal yang jauh dari orang tuanya. Pemberontakan itu ada yang dilakukan sendirian, juga ada yang melakukannya bersama-sama dengan saudaranya yang lain. Ada yang tetap menjaga hubungan baik dengan adik atau kakaknya, tetapi ada pula yang sama sekali tidak menjalin hubungan dengan seluruh anggota keluarganya. Anak-anak yang memberontak ini pada umumnya anak-anak yang sangat berani mengambil risiko dan tidak terlalu tergantung pada orang lain.

Keadaan yang paling ekstrem adalah anak jalanan yang tidak jelas siapa orang tuanya dan di mana keluarganya. Anak-anak ini sejak bayi sudah dipersewakan atau diperjualbelikan untuk pelengkap meminta sedekah. Pada umur tertentu oleh orang tua yang 'kesekian' mereka dilepas begitu saja dan sepenuhnya menjadi anak jalanan. Dibanding yang lain, anak-anak jenis ini memang tampak lain sama sekali, tingkat kebebasan, keliaran, dan pelanggaran norma paling tinggi ada pada kalangan ini.

Apapun latar belakang keluarga anak-anak jalanan adalah karena terpaksa melakukan pekerjaan untuk menghidupi diri dan keluar-ganya. Oleh karena pada umumnya pendidikan dan ketrampilan mereka rendah, maka pilihan pekerjaan yang paling mudah adalah pekerjaan dalam sektor informal. Sedangkan dalam sektor ini dibutuhkan waktu kerja yang panjang untuk mendapatkan penghasilan yang memadai. Itu yang menyebabkan keberadaan mereka dalam jangka waktu yang sangat panjang di jalanan menjadi tak terelakkan. Sebagai akibatnya dalam jangka panjang akan muncul masalah-masalah sosial yang akut. Akibat-akibat tersebut adalah *pertama*, banyak anak yang terpaksa meninggalkan sekolah atau tidak sekolah sama sekali. Keadaan ini diper-parah oleh sikap orang tua yang

lebih cenderung mendorong anaknya bekerja dan menghasilkan uang, daripada bersekolah yang dirasa hanya menghabiskan uang dan tidak menjanjikan apa-apa. Ini yang mengakibatkan terbentuknya pola hubungan yang eksploitatif antara orang tua dan anak. Dalam perjalanan waktu, pola ini akan membawa akibat-akibat yang destruktif bagi anak-anak. Munculnya pola eksploitatif di rumah dengan keharusan-keharusan menghasilkan jumlah uang tertentu yang dibawa pulang, memaksa anak-anak itu harus bekerja keras dan menghabiskan waktu di jalanan. Melewati waktu yang panjang, anak-anak itu cenderung lebih lama dan lebih betah di jalanan daripada di tempat tinggalnya. Kondisi tempat tinggal yang tidak layak makin memperkuat pilihan ini.

Kedua, perlahan secara bertahap anak-anak ini mengalami perubahan perilaku ke arah pelecehan dan pelanggaran norma dan hukum. Mereka mulai liar, *cuek*, seenaknya, tidak mau peduli pada orang lain, melakukan pelanggaran hukum dan norma, sehingga akhirnya membangun norma dan hukum *ala* mereka. Perubahan perilaku ini tampak dari ucapan-ucapan dan tindakan, kata-kata kotor, makian yang berkaitan dengan binatang, perkelaminan, perilaku senggama menjadi bahasa sehari-hari mereka, bahkan kata-kata ancaman menjadi kosakata utama. Sementara itu ada yang mulai melakukan pencurian kecil-kecilan, ikut mengedarkan dan menggunakan minuman keras dan obat terlarang. Ada yang melakukan hubungan kelamin secara bebas dan perilaku asusila lainnya.

Ketiga, terbentuknya komunitas-komunitas anak jalanan yang merupakan *peer group* — berfungsi sebagai keluarga kedua — yang dimanfaatkan oleh anak-anak itu sendiri atau oleh orang lain untuk tujuan-tujuan kriminal dan asusila. Jika pada mulanya perubahan perilaku terjadi begitu saja dalam jalinan interaksi antara individu dengan individu, dan individu dengan kelompok, maka lama kelamaan terbentuk pola-pola tertentu yang secara sistematis dikelola dalam komunitas-komunitas anak jalanan. Ada komunitas yang mengadakan semacam 'arisan teler', pada mulanya para pendatang baru diberi minuman gratis sampai pada waktu tertentu, ketika mulai

ketagihan ia harus ikut serta memberikan sumbangan dalam arisan itu. Biasanya arisan itu diteruskan dengan bersama-sama mencuri kaca *spion* mobil dan kegiatan kriminal lainnya yang mendatangkan uang.

Di beberapa tempat ada pola-pola transaksi seks. Awal pemunculannya sangat beragam, ada yang dimulai oleh penyerahan gadis belia — belum pernah menstruasi — oleh orang tua si anak kepada preman sebagai ganti membayar upeti yang harus dibayar tiap hari. Si preman akan 'memakai' gadis itu sampai ia merasa harus mencari yang baru, kemudian si wanita mulai menjajakan cinta kepada orang lain. Ada pula yang dengan sengaja memilih profesi itu. Pada mulanya transaksi terbatas dalam komunitas sendiri, tetapi biasanya terus berkembang melintasi batas-batas komunitas. Di lokasi-lokasi tertentu para wanita itu bahkan menemukan ramuan sendiri untuk mengasamkan rahim agar tidak hamil.

Keempat, perluasan wilayah konflik. Keberadaan anak-anak di jalanan, di tempat-tempat yang ramai dan menjadi pekerja sektor informal bukan saja belum dilindungi hukum, tetapi bahkan dianggap melanggar hukum, sehingga anak-anak tersebut mengalami beragam konflik dengan banyak pihak. Baik pihak-pihak resmi seperti polisi, kamtib dan satpam maupun pihak-pihak tidak resmi seperti para *jegger*. Konflik-konflik ini menambah runyam nasib anak-anak itu.

Konflik dan Eksploitasi yang Berlapis

Terjadinya konflik dengan banyak pihak di berbagai tempat menjadikan anak-anak itu mengalami konflik dan eksploitasi yang berlapis dan tak terelakkan. Anak jalanan yang masih memiliki dan tinggal bersama keluarga mengalami konflik dan eksploitasi di dalam keluarga sendiri. Tingkatan konflik dan eksploitasi itu sangat beragam, mulai dari secara halus dengan mendorong anak bekerja untuk sekedar membantu nafkah keluarga, melakukan penyiksaan fisik sampai melakukan perkosaan pada anak perempuan sendiri. Di salah satu tempat

pembinaan kami ada tiga orang anak binaan yang lahir dari tiga kakak yang diperkosa oleh ayah mereka. Itu berarti bapak anak-anak tersebut sekaligus kakeknya. Terdapat pula anak yang menyebut orang tuanya sebagai setan, karena sudah dipaksa kerja, dipukuli, uang tabungan anak masih diambil untuk berjudi.

Konflik dan eksploitasi di dalam keluarga ini paling sulit untuk diatasi. Campur-tangan pihak luar dengan mudah akan dituding mencampuri urusan rumah tangga orang. Anak-anak yang mengalaminya pun berada dalam situasi yang dilematis, sementara jika konflik dan eksploitasi itu dibiarkan akan menjadi tindakan penganiayaan dan penindasan yang terus berlanjut dan sering tidak berujung. Namun apabila dilawan, berarti harus berseteru dengan orang tua sendiri. Lari dari rumah tampaknya merupakan jalan keluar yang paling banyak dipilih anak-anak itu.

Di luar rumah tidak berarti mereka terbebas dari konflik, eksploitasi dan penindasan. Konflik pertama yang umumnya mereka alami adalah dengan teman sebaya atau dengan orang yang lebih tua untuk memperebutkan rejeki, tidak jarang konflik seperti ini meruncing menjadi konflik fisik dan biasanya melibatkan lebih banyak orang. Ujung-ujungnya mereka harus berhadapan dengan *jegger* yang kemudian dengan cara beragam mengeksploitasi mereka.

Konflik, eksploitasi dan penindasan yang dialami oleh anak-anak lebih terbuka sifatnya. Seperti yang lebih banyak menarik perhatian orang untuk mempersoalkan adalah konflik dengan para petugas keamanan, kamtib dan penegak hukum. Ini terjadi karena keberadaan anak-anak itu di jalanan ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan mereka pada sektor informal bukan saja tidak dilindungi hukum, bahkan dinyatakan melanggar hukum.

Tidak sedikit pula anak-anak itu yang masih harus mengalami konflik dan eksploitasi dengan bos-bos mereka yang mengelola dan memodali usaha pada sektor informal. Bentuknya dapat berupa penetapan upah atau keuntungan yang sepihak, serta

perlakuan yang tidak adil lainnya. Kesemuanya ini terjadi karena pekerjaan sektor informal yang dilakoni anak jalanan ini lebih banyak diatur dengan apa yang apa yang disebut 'hukum jalanan'.

Jika dibuat hirarki posisi, anak-anak jalanan itu berada paling bawah dalam jaringan konflik, eksploitasi dan penindasan tersebut. Mereka adalah korbannya korban.

YNDN: Preventif - Edukatif Sebuah Upaya

Dalam jaringan konflik-eksploitasi itu posisi anak-anak jalanan seperti "telur di ujung pistol", karena itu sangat sulit untuk menetasakan jaring-jaring tersebut dan membebaskan mereka. Salah bertindak kondisi mereka akan makin sulit dan tersudut.

Sadar akan peliknya masalah, YNDN mencoba mengupayakan pemberdayaan anak-anak jalanan dengan pendekatan preventif-edukatif, dengan memberikan tekanan dan perhatian pada usaha mencegah munculnya masalah baru atau masalah yang lebih akut melalui jalur pendidikan. Tentu saja disadari bahwa pemberdayaan kaum lemah melalui jalur pendidikan dalam suatu struktur sosial yang didominasi oleh praktek-praktek eksploitasi, tanpa terlebih dulu mengubah kenyataan-kenyataan struktur sosial merupakan upaya penuh tantangan yang lebih membuka peluang bagi kegagalan daripada keberhasilan. Namun paling tidak pada tahap yang paling awal, pendidikan yang menekankan proses penyadaran dapat menjadi modal perbaikan-perbaikan menuju masa depan.

Dengan pendekatan preventif-edukatif, sasaran utama langsung ditujukan kepada si anak. Ini dilakukan dengan pertimbangan jika si anak telah memiliki kesadaran akan keberadaan dirinya, arti penting keberadaan dirinya bagi diri sendiri dan orang lain, serta faham akan bentuk hubungan yang seharusnya dengan orang tua dan orang-orang yang berada dalam lingkungan terdekatnya, maka diharapkan si anak memiliki motivasi untuk ikut serta mengubah keadaannya yang sekarang.

Oleh karena itu dalam proses pendidikan yang mendapat perhatian utama adalah dengan apa yang disebut **humanisasi**, sebuah proses panjang untuk memanusiakan si anak. Menyusul kemudian pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan. (Gambaran agak lengkap lihat di bagian tulisan: **Pendidikan Tidak Berarti Persekolahan** - Analisis Kegiatan 1993).

Tindakan selanjutnya adalah memperbaiki hubungan anak dengan orangtua, utamanya bagi anak-anak yang memiliki persoalan serius dengan orang tuanya. Upaya ini biasanya dilanjutkan dengan pemberian bantuan ekonomi produktif kepada para orang tua. Mereka juga sering diajak berbincang tentang anaknya dan diikutsertakan pada beberapa kegiatan tanpa mengganggu pekerjaannya. Jika orang tua sulit diajak kerja sama atau jika si anak tidak memiliki orang tua, biasanya orang yang paling dekat dengan si anak yang dilibatkan. Proses penyadaran orang tua ini biasanya lebih sulit, utamanya di kalangan orang tua yang beranggapan bahwa apapun boleh dilakukan pada anaknya. Pekerjaan akan semakin sulit jika orang tua memiliki kebiasaan berjudi dan meminum minuman keras. Untuk mengatasi ini diusahakan melibatkan anggota keluarga lain yang bisa diajak bekerja sama.

YNDN sangat menekankan perlunya mengatasi konflik dan eksploitasi yang terjadi di dalam keluarga, ini karena sumber dari berbagai persoalan yang dihadapi anak jalanan sangat sulit memberlakukan hukum positif untuk mengatasinya. Selain itu konflik dan eksploitasi di dalam keluarga bukan saja sulit dihindari oleh si anak, tetapi juga dapat lebih mengerikan dan berjangka panjang, hingga sampai-sampai dapat mengubah perilaku anak menjadi menyimpang dan sangat tidak terkendali.

Bersamaan dengan upaya untuk mengatasi konflik dan eksploitasi di dalam keluarga, dilakukan pula usaha mengatasi konflik dan eksploitasi di lingkungan terdekat di luar keluarga. Upaya ini biasanya dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan para *jegger* yang menguasai tempat-tempat anak-anak itu bekerja. Pada umumnya setelah melalui dialog-dialog yang panjang dan sulit, para *jegger* itu baru dapat diajak kerjasama. Kalau mereka

tidak aktif membantu, minimal mereka rela membiarkan anak-anak itu ikut serta dalam proses pendidikan. Di beberapa tempat ada *jegger* yang bersedia mengawasi anak-anak itu, sehingga anak-anak tidak lagi terlibat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah terlanjur pernah mereka — *jegger* — lakukan. Para *jegger* juga bisa diminta bantuannya untuk membangun dialog dengan para orang tua yang dikategorikan bermasalah. Melihat itu YNDN tidak pernah mau bersikap konfrontatif terhadap para *jegger*, sebab konfrontasi dengan mereka justru merugikan anak-anak.

Untuk melindungi anak-anak di lingkungan terdekatnya maka diusahakan agar teman sebaya mereka diikutsertakan sebanyak mungkin dalam pembinaan. Jika hal ini tidak dapat dilakukan maka diupayakan agar semua anak yang ikut pembinaan dijadikan kelompok teman sebaya tandingan untuk mengimbangi pengaruh buruk kelompok teman sebaya lainnya.

Upaya berikutnya yang dilakukan adalah melindungi si anak dari para penegak hukum, petugas Kamtib dan penjaga keamanan. Upaya ini tidak kalah sulitnya, karena sampai sekarang kita terus menerus dihadapkan pada penerapan hukum yang kaku tanpa melihat persoalannya secara menyeluruh dan proporsional. Upaya perlindungan pada tahap ini makin sulit, karena sampai sekarang dinyatakan apa yang dilakukan anak-anak untuk bertahan hidup sebagai pekerja sektor informal adalah melanggar hukum.

Untuk mengatasi itu maka upaya yang dilakukan biasanya melakukan dialog-dialog dengan petugas keamanan dan penegak hukum, utamanya di tempat anak-anak itu bekerja. Dengan cara ini diharapkan ada saling pengertian, yakni antara anak jalanan dengan petugas keamanan. Di Kramat Jati misalnya, kami melibatkan lurah sebagai seorang guru. Perjumpaan lurah dengan anak-anak itu dalam proses pendidikan membuat ia lebih memahami persoalan dan ikut serta membantu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan ketertiban.

Disadari sepenuhnya bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan dengan cara sekedar mendekati orang per orang, harus ada perlindungan hukum positif yang menjamin keberadaan anak-anak itu. Walaupun juga disadari undang-undang dan hukum positif lainnya di Indonesia ini lebih merupakan aturan tertulis yang tidak 'bertaji'. Upaya pendekatan personal dan perbaikan sistem memanfaatkan media massa dilakukan secara sekaligus, utamanya lagi melalui pendekatan dengan anggota perwakilan rakyat, aparat keamanan dan orang-orang dari pemerintahan.

Sedangkan kepada anak-anak sendiri sebagai upaya pemberdayaan dilakukan melalui penyuluhan hukum — bekerja sama dengan PACT — agar anak-anak paham hak-hak dan kewajibannya.

Menghadapi begitu banyak problema dan ancaman kegagalan, kadang-kadang terasa bahwa kita berjalan dari satu absurditas yang lain. Upaya secara bersama untuk memecahkan masalah diharapkan dapat terus memperkuat tekad dan keyakinan kita, karena banyak masalah yang memang harus kita hadapi.

Pendidikan Tidak Berarti Persekolahan Analisis Kegiatan YNDN 1993

Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) didirikan pada tanggal 17 September 1990. YNDN didirikan sebagai perwujudan rasa kepedulian terhadap munculnya masalah-masalah sosial yang muncul di Jakarta dan tidak dapat dipisahkan dari persoalan yang lebih besar dalam skala nasional, seperti masih terdapatnya 27,2 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di Jakarta saja menurut data terakhir Dinas Sosial DKI Jakarta, terdapat 30.000 anak yang belum mampu mengikuti wajib belajar dan di antaranya tercatat 2.500.000 penganggur dari 8.500.000 penduduk Jakarta.

Untuk mewujudkan kepedulian sosial itu maka YNDN menetapkan tiga tujuan yang melandasi program-programnya. Ketiga

tujuan itu adalah *pertama*, mencegah secara dini permasalahan sosial dengan pendekatan preventif edukatif. *Kedua*, mendukung pemerintah dalam upaya pembinaan masyarakat secara lintas regional di pedesaan. *Ketiga*, mencerdaskan bangsa dengan meningkatkan minat baca melalui taman bacaan anak pedesaan dan desa kota.

Program-program yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah: “taman bacaan anak pedesaan dan desa kota”, “taman pembina penyemir sepatu”, serta “taman pembina anak dan keluarga tak mampu di lingkungan pasar tradisioal”. Program “taman bacaan” dalam pelaksanaannya berbentuk taman bacaan pedesaan dan kota yang bersifat sosial edukatif, sekaligus sebagai embrio pengembangan perpustakaan. Taman bacaan diharapkan mampu meningkatkan minat baca dan merupakan ajang kreativitas anak dan remaja untuk kreatif membuat karya-karya yang sesuai dengan lingkungan masing-masing. Selain itu dilakukan juga berbagai kegiatan yang menunjang keberlangsungan taman bacaan.

YNDN dalam rangka pengembangan taman bacaan ini telah melakukan pendirian taman bacaan anak desa-kota (daerah kumuh) DKI Jakarta sebanyak 10 lokasi, antara lain dengan membuka taman bacaan di 15 lokasi pemulung wilayah DKI Jakarta yang melibatkan 1500 anak. Di samping itu mengirimkan pula buku-buku untuk seluruh Taman Bacaan Anak Pedesaan di 27 propinsi dan memberi beasiswa 50 anak anggota taman bacaan anak pedesaan.

Apa perbedaan yang istimewa dari taman bacaan ini dengan perpustakaan yang ada dan bagaimana kaitannya dengan peningkatan mutu hidup masyarakat kumuh, utamanya yang masih kanak-kanak dan remaja. Kegiatannya tidak hanya membaca buku, tetapi ditambah juga dengan kegiatan lain yang mendorong agar anak-anak memahami isi buku yang dibacanya dan mengembangkan kreativitasnya. Kegiatan itu dilakukan dengan cara menceritakan kembali isi bacaan kepada teman-teman, kemudian mereka membuat tulisan berdasarkan bacaan. Di taman bacaan itu kemudian secara teratur diadakan berbagai

lom-ba, utamanya pada peringatan hari-hari nasional untuk berbagai ketrampilan yang telah diajarkan sebelumnya. Lebih lanjut hasil-hasil lomba itu secara tetap dipamerkan di museum anak Taman Mini Indonesia Indah dan dalam berbagai pameran lain.

Dalam pelaksanaannya di taman bacaan para pengelolanya tidak hanya bersibuk dengan mengelola buku dan pemahaman anak-anak, tetapi sebagian besar waktu dipergunakan untuk berdialog dengan anak-anak tentang apa saja yang mereka rasakan dan inginkan, mendengarkan keluhan-keluhan mereka dan memberikan perhatian pada mereka. Ini dilakukan karena anak-anak yang datang ke tempat itu adalah anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Sebab dimaklumi sebagian besar orang tua mereka menghabiskan waktu untuk "mengais rejeki sebagai pekerja-pekerja kasar, kuli-kuli angkut dan pedagang-pedagang kecil. Beberapa di antaranya malah tidak memiliki orang tua. Jadi dapatlah dikatakan bahwa perhatian utama program ini adalah pada manusianya, yakni dengan memenuhi kebutuhannya untuk diperhatikan dan juga mengaktualisasikan dirinya. Hal ini tentu saja sesuatu yang tidak mereka dapatkan dimanapun dan bahkan di dalam keluarganya. Bersama dengan dua kebutuhan fundamental itu maka anak-anak diberi pengetahuan dan ketrampilan dasar agar dapat dikembangkan untuk mandiri di kemudian hari. Pengetahuan dasar itu adalah baca, tulis dan hitung, sedangkan ketrampilannya adalah berbagai kerajinan tangan, seperti membuat kerajinan tangan dari bambu, membuat kaligrafi dari ubin, menyablon dan lainnya.

Adapun kegiatan utama yang dilakukan di "Taman Pembina Penyemir Sepatu" adalah meningkatkan ketrampilan, etika dan etos kerja. Selain itu dengan membantu dan menyalurkan anak-anak ke perkantoran, melengkapi peralatan kerjanya, program beasiswa, serta membiasakan anak-anak untuk menabung. Pada saat bersamaan juga diadakan penyuluhan hukum.

Pengadaan "Taman Pembina Penyemir Sepatu" tidaklah dimaksudkan untuk melestarikan profesi sebagai penyemir

sepatu,. tetapi maksudnya untuk menanamkan etos dan etika kerja, membiasakan anak-anak menabung dan mengolah uangnya secara baik. Juga dimaksudkan untuk memberikan keterampilan-keterampilan tambahan agar seiring dengan semakin besarnya anak, maka ia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih layak. Bagi anak-anak yang masih sekolah dibiarkan tetap sekolah, tetapi mereka dapat berkumpul untuk membicarakan masalah-masalahnya dan mendapatkan perhatian dari para relawan yang mengelola taman itu. Bagi yang putus sekolah dan memang tidak berkeinginan untuk melanjutkan sekolah, taman ini dapat berfungsi sebagai tempat mereka menambah ketrampilan dan pengetahuan agar di masa depan dapat dimanfaatkan.

Kendati demikian yang paling penting di taman ini, fungsi utamanya adalah menjaga agar anak-anak itu tidak terpengaruh oleh teman-teman sebayanya yang memiliki berbagai perilaku dapat merusak mereka, seperti meminum-minuman keras, berjudi, berkelahi dan mencuri. Pembinaan yang dilakukan tidak hanya sekedar penyuluhan-penyuluhan hukum, tetapi yang lebih penting adalah memberikan perhatian yang penuh empati. Dengan demikian mereka merasa bahwa dirinya dan juga dengan pekerjaannya memiliki makna untuk dirinya sendiri dan juga orang lain.

Kegiatan YNDN yang juga dapat dianggap sebagai sebuah model bagi yang tidak bersekolah dan putus sekolah adalah "Taman Pembinaan Anak dan Keluarga Tak Mampu di Lingkungan Pasar Tradisional". Taman ini telah berjalan di tempat-tempat seperti Pasar Induk, Pasar Kramat Jati, Pasar Kebayoran Lama, Pasar Bahari, Pasar Muara Angke dan Pasar Burung Jatinegara.

Penggarapan anak dan keluarga tak mampu di pasar tradisional didasarkan pada suatu kenyataan bahwa di pasar tradisional berkegiatan 24 jam secara terus-menerus, sehingga akhirnya telah tumbuh sekelompok orang yang perlu mendapat perhatian. Perhatian perlu diberikan kepada mereka karena mereka bukan hanya pekerja kasar yang penghasilannya tidak

tetap, hidup sebagai orang liar dan tidak memiliki kediaman tetap, namun mereka juga berperilaku 'tidak biasa'.

Celaknya mereka ini umumnya masih kanak-kanak atau remaja yang tidak pernah sekolah, jika pun sekolah kebanyakan di antara mereka putus sekolah sebelum kelas tiga sekolah dasar. Kebanyakan di antara mereka juga tidak jelas siapa orang tuanya, karena pada waktu balita umumnya mereka dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk meminta sedekah dengan cara sebagai bayi yang digendong atau sebagai anak kecil yang berkeliaran di jalan-jalan. Hingga akhirnya ketika mereka mulai besar dan tidak lagi dapat dimanfaatkan untuk meminta sedekah, biasanya mereka dilepas begitu saja dan besar dalam lingkungan yang terbuka dan liar di pasar tradisional.

Hal itulah yang menyebabkan mereka telah bekerja sejak kecil, akibatnya ketika mereka mulai beranjak remaja memasuki dunia kerja pada pekerjaan-pekerjaan kasar, seperti menjadi kuli angkut atau mengutip buah-buahan atau sayur-sayuran yang berjatuhan di jalanan ketika diangkut dari truk. Bahkan tidak sedikit pula di antara mereka yang sudah memiliki kebiasaan merokok dan berkenalan dengan wanita jalanan dan para *jegger* atau 'preman', sehingga tidak heran mereka kemudian memiliki temperamen keras, suka berkelahi dan tidak peduli pada orang lain di lingkungannya.

Kendati demikian, dengan lingkungan yang keras dan liar itu tidak saja membentuk anak-anak menjadi orang yang tidak menghiraukan aturan atau norma yang berlaku di masyarakat, tetapi juga membentuk mereka menjadi orang yang berani menempuh resiko, memiliki etos kerja yang baik dan tak kenal menyerah. Hal itu karena hanya dengan sifat seperti itu mereka dapat bertahan hidup.

Sementara itu keluarga-keluarga yang tidak mampu dan tinggal di lingkungan pasar tradisional itu, keadaannya tidak berbeda jauh dengan anak-anak tersebut di atas. Mereka itu adalah para pengupas bawang, pengumpul sayur-sayuran yang berjatuhan dari truk atau sayur-sayuran yang telah layu, para kuli angkut dan

pengumpul sampah yang bertempat tinggal di pasar tradisional, mencari nafkah dan membesarkan anaknya di situ.

Kebanyakan dari anak-anak dan keluarga-keluarga yang telah di jelaskan di atas menganggap bahwa mereka tidak membutuhkan sekolah. Kebutuhan mereka adalah bekerja dan menghasilkan uang untuk bertahan hidup, sehingga tidaklah bijaksana jika memaksa mereka bersekolah seperti layaknya anak-anak biasa. Bukan saja terasa aneh bagi mereka, tetapi hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan menolaknya karena waktu produktifnya untuk mendapatkan uang akan hilang. Apalagi sekolah biasanya mengharuskan dijalaninya disiplin waktu yang sifatnya tetap, teratur dan mengikat. Sedangkan anak-anak itu memiliki jam kerja yang tidak teratur sepanjang 24 jam, terkadang mereka bekerja mulai pukul 23.00 sampai pukul empat dini hari ketika truk-truk buah dan sayur banyak berdatangan dan kemudian diikuti dengan aktivitas menurunkan bawasanya ke pasar. Bahkan pada lain waktu mereka bekerja di pagi hari atau sore sampai malam.

Jadi, jika ingin mengupayakan agar mereka menjalani pendidikan yang juga merupakan hak mereka dan kini menjadi kewajiban, maka sekolah reguler sama sekali tidak cocok buat mereka. Itulah yang mendorong YNDN mendirikan “Taman Pembina Anak dan Keluarga Tak Mampu Lingkungan Pasar Tradisional”, apalagi di dalamnya juga diupayakan pengentasan buta huruf bagi anak dan remaja, pemberian ketrampilan dan menanamkan sikap hemat dan penyuluhan hidup sehat dan mengenal etika dan hukum.

Program ini dimulai dengan pengenalan para pendidik pada anak dan seluruh situasinya. Pengenalan dilakukan oleh para pendidik dengan melakukan *home visit* terlebih dulu, yakni untuk meng-identifikasi riwayat hidup dan keluarganya secara keseluruhan. Menjalin hubungan tidak saja dengan anak dan keluarganya, juga membuka jalinan hubungan dengan para *jegger*. Hubungan baik dengan para *jegger* ini perlu dilakukan sejak mula, untuk meng-antisipasi kegagalan seluruh program karena ulah usil dan provokasi para *jegger*. Antisipasi ini dijaga

karena para anak-anak jalanan merupakan bagian dari pekerjaan yang mereka jalani, sehingga *jegger* berkepentingan agar anak-anak itu tetap liar. Liarnya anak-anak jalanan biasanya dimanfaatkan para *jegger* untuk mengedarkan narkotik, menjadi kurir pencari wanita jalanan, memperluas jaringan pencurian dan sebagainya. Dapatlah dibayangkan jumlah kerugian para *jegger* bila anak-anak menjadi orang yang terdidik.

Bila para *jegger* itu telah di'jinak'kan, kegiatan selanjutnya adalah membangun dialog dengan anak-anak untuk membangun kepercayaan para pendidik. Ini penting namun sulit untuk dikerjakan, karena anak-anak biasanya tidak mudah percaya pada orang yang tidak berasal dari kelompoknya. Jika rasa saling percaya telah dibangun, maka secara hati-hati dan setahap demi setahap anak-anak mulai diyakinkan tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka. Untuk itu, maka sejak semula gambaran tentang pendidikan yang diberikan tidaklah bersifat persekolahan seperti layaknya sekolah biasa, karena bila digambarkan demikian maka dapat dipastikan mereka akan menolaknya. Kendati demikian bila ada di antara mereka yang pernah sekolah, anak tersebut dapat dimanfaatkan sebagai orang yang ikut membantu teman-temannya. Demikian pula dengan para orang tua atau pemelihara mereka juga harus diberi pengertian tentang arti penting pendidikan bagi anak-anak mereka.

Langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan jika telah dapat mengumpulkan sekelompok anak, lebih dahulu secara perlahan-lahan memasukkan mereka ke dalam dunia yang normal. Jadi anak-anak tidak langsung diberikan pelajaran-pelajaran yang terkait yang nantinya akan menjadi pelajaran inti, seperti membaca, menulis dan menghitung. Sebelum memberikan pelajaran demikian, terlebih dahulu secara perlahan-lahan memasukkan mereka ke dalam dunia yang 'normal'. Tahap awal pelajaran yang diberikan untuk memasukkan mereka ke dalam dunia yang 'normal' seperti hal-hal yang berkaitan dengan norma-norma hidup sebagai anak 'normal'. Pengertian 'normal' di sini maksudnya bukan berarti gambaran persis sama dengan anak-anak lain yang menjalani hidup dalam keluarga-

keluarga biasa yang pada umumnya dikenal, tetapi memiliki arti bahwa mereka diberi kesadaran tentang apa yang **sebaiknya**, bukan **seharusnya** yang dilakukan dalam usia mereka itu. Kesadaran yang dibangun dengan cara memberi penilaian untuk memilah-milah jenis pekerjaan yang sebaiknya tetap terus dipertahankan untuk kepentingan kelangsungan hidupnya. Jadi kesadaran yang dibangun bukan dengan memberi penilaian bahwa pekerjaan yang mereka lakukan sebenarnya tidak benar. Dengan demikian mereka dapat memahami jenis pekerjaan yang terpuji atau tidak, sementara pada saat yang bersamaan juga ditanamkan perasaan bahwa mereka berguna bagi dirinya dan orang lain.

Tentu saja membangun kesadaran demikian membutuhkan waktu yang panjang, karena selama dalam proses itu diberikan kepada mereka perhatian yang dibangun dengan empati yang hampir tidak mereka dapatkan dari siapapun. Dengan cara ini pula akhirnya beberapa sikap positif yang sebenarnya telah menjadi 'cap' dari lingkungannya terus ditumbuhkembangkan. Bila semuanya telah berjalan — dengan catatan bahwa kegagalan dapat saja terjadi tiap langkah — maka kemudian materi-materi yang bersifat pengetahuan dan ketrampilan mulai diberikan. Tekanan kegiatan yang diberikan selanjutnya adalah peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, caranya yaitu dengan mengelompokkan mereka berdasarkan pada perbedaan kemampuannya dan bukan pada perbedaan usianya. Mereka ini dikelompokkan pada yang putus sekolah dan belum sekolah, sedang bagi yang putus sekolah bila belum dapat membaca, menulis dan berhitung akan dimasukkan ke dalam kelompok yang belum sekolah. Utamanya bagi orang dewasa, mereka dipisahkan dari kedua kelompok belajar anak-anak karena alasan psikologis.

Program di atas biasanya dilaksanakan berjenjang, yakni menjadi Dasar, Lanjutan I dan Lanjutan II dan secara keseluruhan dilaksanakan dalam waktu satu tahun. Dalam kurun waktu setahun itu pembinaan berisi tentang Pengenalan huruf dan angka, Membaca, Berhitung, Menulis, Pengetahuan umum, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Agama, Etika dan

Keterampilan. Program ini dilakukan setiap hari dari Senin sampai Sabtu, kecuali bagi yang menyelenggarakan pendidikan di mesjid pada hari Jum'at diliburkan. Kegiatan tersebut setiap hari hanya berlangsung dua jam, yakni antara jam 09.00- 11.00 setiap harinya dan diharapkan mereka dapat berkonsentrasi mengikuti pelajaran. Pertimbangannya waktu dua jam itu adalah karena dianggap tidak merugikan mereka dalam hal mencari *duit*, di samping juga atas pertimbangan pilihan waktu pada jam tersebut yang biasanya kurang produktif untuk bekerja di pasar.

Meski hanya dua jam sehari, belum tentu juga semua anak yang ikut dalam program ini dapat sepenuhnya mengikuti. Kendalanya adalah karena tingkat mobilitas keluar masuk² yang cukup tinggi, selain itu ada pula peserta yang justru baru masuk dan sebelumnya belum pernah hadir sama sekali. Bahkan kegiatan dapat bubar begitu saja ketika ada acara menarik di Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang justru bukan program sekolah.

Kendala ini untungnya dapat diatasi dengan keuletan para pengajar dan hubungan yang dekat dengan anak-anak, keluarganya dan pemeliharanya. Hal ini dilakukan karena mengingat mereka ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti untuk mengembalikan anak-anak itu masuk kembali ke dalam program.

Setelah program berjalan satu tahun, kemudian anak-anak yang dinilai berprestasi diikutsertakan dalam ujian persamaan SD, sedang bagi yang memiliki kemampuan lebih disalurkan ke SMP terbuka. Sedang bagi yang kurang 'mampu' diberikan ketrampilan tambahan, seperti ketrampilan tambahan berupa kursus otomotif, kursus menjahit, memasak, perkayuan, sablon dan kerajinan tangan membuat bunga kering dan cendera mata lainnya.

Dari program ini YNDN telah berhasil membantu 23 orang anak untuk menyelesaikan sekolah dasarnya dengan mengikutkan

² Seringkali peserta hanya mengikuti program sekali-kali saja, suatu hari datang kemudian keesokan harinya dan bahkan dalam jangka waktu yang panjang mereka tidak datang.

mereka dalam ujian SD. Namun bagi mereka yang bekerja sebagai pedagang kecil, selain menerima ijazah persamaan SD juga diberikan bantuan berupa gerobak dorong untuk mengembangkan usahanya. Selain itu kegiatan yang tidak terpisahkan dari program ini adalah pemberian modal usaha ekonomi yang produktif kepada 40 kepala rumah tangga. Sifat kedua bantuan tersebut diberikan kepada kepala keluarga dengan model dana bergulir, yakni diberikan dalam suatu kelompok dan dipergunakan secara bergiliran antaranggota.

Semua kegiatan yang telah dilakukan oleh YNDN, dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Jakarta, PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna dan juga Majelis Ta'lim setempat, serta pelajar kelas akhir Sekolah Menengah Sosial (SMPS) Negeri Jakarta. Dengan kerja secara bersama-sama ini maka pendidik yang mampu membangun empati dan memberi perhatian serta kasih sayang, dapat membangun kesadaran akan hari depan yang lebih baik.

Street Literacy **Upaya Perubahan Nasib Anak Jalanan?**

Sarah Whitmore dan Sutini,
Mitra Masyarakat Kota

Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah menandatangani pengesahan konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990. Penandatanganan konvensi tersebut selain menjadi landasan yang kokoh juga cermin sikap terbuka untuk melakukan pembi-naan kesejahteraan anak, termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan hak-hak mereka. Konsekuensi dari penanda-tanganan tersebut adalah bahwa pelaksanaan konvensi tentang anak-anak tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, serta bangsa dan negara, melainkan juga dalam bentuk kerjasama internasional.

Komitmen pemerintah Indonesia untuk menjamin hak-hak anak nampaknya sudah berlangsung sebelum penandatanganan pengesahan konvensi tersebut. Sebagai contoh, hak anak dalam bidang hukum perdata diatur antara lain dalam Undang-undang Kesejahteraan Anak no. 4/1979, Undang-undang Perkawinan no. 1/1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan dalam KUH Perdata, Pola Umum Pembinaan Kesejahteraan, Surat Edaran MA-RI no. 6/1983 dan no. 4/1989. Namun demikian sampai saat ini pelaksanaan atas konvensi tentang hak-hak anak di Indonesia masih dipertanyakan.

Berbagai liputan media massa — terutama internasional — seringkali memojokkan pemerintah dengan mengupas kasus-kasus pelanggaran dan penyalahgunaan hak-hak anak (buruh anak, anak jalanan, pekerja anak lepas pantai — jermal dll.). Padahal dalam kasus-kasus tersebut — buruh anak, anak jalanan dan pekerja anak lepas pantai dan sektor lainnya — peranan

pengusaha yang mencoba mengeruk keuntungan dengan mempekerjakan anak, baik secara formal maupun informal sangat signifikan. Kalangan LSM secara gigih mengadvokasi atas penyalahgunaan hak-hak anak yang bermuara pada keinginan agar pemerintah Indonesia bisa menjamin pelaksanaan hak-hak dalam konvensi tersebut.

Berbagai cara telah diupayakan untuk mendorong penegakan pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak di Indonesia, karena kepedulian akan nasib anak-anak yang menjadi harapan bagi masa depan bangsa. Seperti pengalaman Mitra Masyarakat Kota yang mengembangkan program '*street literacy*' bagi anak-anak jalanan dalam *Reaching Street Children in Urban Environment* (RESCUE-Indonesia), memperlihatkan bahwa pemerintah, LSM, masyarakat, pengusaha, keluarga dan media massa perlu bekerjasama bahu-membahu dan membangun keterbukaan untuk menegakkan pelaksanaan konvensi tentang Hak-hak anak di Indonesia.

Fenomena Permasalahan Anak Jalanan di Jakarta

Jika kita kaji literatur, banyak kesamaan tentang sebab tumbuhnya fenomena anak jalanan di Jakarta dengan yang terjadi di mancanegara. Pada umumnya mereka yang dikategorikan sebagai anak jalanan adalah berusia kurang dari 16 tahun. Berada di jalanan baik untuk hidup maupun bekerja dengan memasuki kegiatan ekonomi anak jalanan. Kegiatan ekonomi anak jalanan tersebut antara lain mengasong, menjajakan, menjadi joki (menumpang kendaraan di kawasan tertib lalu lintas), mengumpulkan barang bekas untuk daur ulang, menemani kebutuhan hidung belang yang ingin mendapatkan pasangan seks dari jalanan, menyemir sepatu, mengojek payung saat hari hujan, meminta-minta, mengumpulkan serpihan beras, menampung limbah bahan bakar dari mobil pengangkut bahan bakar dan banyak lagi.

Kenapa anak-anak dalam usia relatif muda, baik atas keinginan sendiri, di dorong keluarga atau ikut teman-teman berada di

jalanan? Hasil pendataan dari anak-anak binaan Yayasan Mitra Masyarakat Kota menunjukkan bahwa anak-anak tersebut pada umumnya datang dari keluarga kurang mampu, tinggal di kawasan tertentu yang dianggap pemerintah kota Jakarta sebagai daerah pemukiman kumuh (*slum-area*) — antara lain Prumpung, Manggarai, Pedongkelan, Jembatan Lima, Rawa Badak, Gudang Baru dan daerah pemukiman liar (*squater areas*), antara lain pemukim di sepanjang pinggir rel kereta api (Senen, Kota, Cipinang), pemukiman sepanjang bantaran kali (Ciliwung, Bendungan Hilir) dan sejumlah kawasan lainnya yang cukup jauh dari Jakarta, misalnya Pantai Utara (Cirebon), Bantul, Wonosari, Palembang, Rangkasbitung.

Kebanyakan anak jalanan mempunyai cerita tentang latar belakang keluarga mereka sendiri-sendiri sebelum mereka bekerja dan hidup di jalanan. Secara sederhana dapat diklasifikasikan sebab-sebab tersebut antara lain:

- a. terkait dengan permasalahan ekonomi sehingga anak terpaksa ikut membantu orang tua dengan bekerja;
- b. kekurangharmonisan hubungan dalam keluarga yang sering berakhir dengan penganiayaan dan kekerasan fisik orang tua terhadap anaknya sehingga melarikan diri dari rumah;
- c. orang tua (asal dan/angkat) 'mengkaryakan' anak sebagai sumber ekonomi keluarga pengganti peran yang seharusnya dilakukan orang dewasa;
- d. anak-anak mengisi peluang-peluang ekonomi jalanan baik secara sendiri-sendiri maupun diupayakan secara kelompok dan terorganisasi oleh orang yang lebih tua.

Warna Pendekatan dalam Penanganan Permasalahan Anak Jalanan

Bila kita simak sebab-sebab yang membawa anak berada di jalanan untuk hidup dan bekerja sebagaimana diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa kompleksitas kehidupan anak jalanan bukan sesuatu yang statis melainkan dinamis. Cara-cara yang mereka pergunakan untuk bertahan hidup berkembang

dari waktu ke waktu baik secara individual maupun secara kelompok sebagai suatu proses interaktif dengan perubahan lingkungan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di daerah perkotaan. Namun demikian seringkali kita sebagai orang yang menaruh perhatian dan kepedulian terhadap mereka, lupa dan kurang memberikan perhatian pada proses adaptasi dinamik kelompok anak jalanan. Kondisi tersebut tercermin dalam sifat-sifat program yang kita kenakan ke mereka. Satu asumsi dasar yang paling sering mewarnai berbagai program penanganan anak jalanan di daerah perkotaan adalah menganggap mereka sebagai orang yang tidak mampu dan perlu dikasihani — penjahat — warna program yang dikenakan adalah sapu bersih dan basmi, aib dan cermin kegagalan pembangunan perkotaan — program yang dikenakan adalah mengirim anak dan atau dipindahkan ke lokasi lainnya.

***Street Literacy*, Upaya Menyasati Perubahan Nasib**

Sebelum sarat dengan berbagai pengertian dan pertanyaan tentang apa itu *street literacy*, sebuah prosa yang digarap dari pengalaman mendampingi, bekerja dan membangun program bersama anak jalanan dipaparkan untuk memberikan ilustrasi sekaligus filosofi yang mendasari pendekatan *street literacy*.

Filosofi dari *street literacy* sebagaimana tersirat dari prosa ini adalah untuk meningkatkan dan membangun kemampuan *survival* anak jalanan baik secara individual maupun kelompok. *Street Literacy* tidak menutupi kemampuan, kegiatan sehari-hari, atau pengetahuan yang sudah diperoleh oleh anak jalanan. *Street literacy* berangkat dari kemampuan, ketrampilan, keinginan dan keadaan anak jalanan yang sudah ada untuk memperkuat kemungkinan dan kesempatan bagi anak untuk belajar dan berkembang.

Filosofi dan Pendekatan

Round Pegs in square holes

*We are all born the same shape:
Circles of faces; balls for bodies; triangular hands; rectangular feet
curious minds; open hearts
Worldly fates then take over and we begin to diversify:
the process starts almost instantly,
the day we are born and we learn how to be hungry; for food and love
and adventure and friends*

*Street children come from families that don't know what to do with
them
so they leave or are pushed out and learn to live on the street
to find food and friends and work*

*They are survivors: independent, resourceful appreciate small things
a place to lie down (a tikar is enough)
rice with an egg (plus sambal)
a muddy river to swim in (who knows what's in the mud)
a new shirt (used, of course)
a handshake with meaning (especially from a reliable friend)*

*They will never fit into some ideal club:
the family with one dad, one mom and two kids
(do any of us really)
but they make a family wherever they go:
in the terminal, the market, the station
Let them breathe with the freedom, the relief, and knowledge
that they are
"doing the best with what they got"*

even if they ain't got much

Round pegs will never fit in square holes

Street literacy bukan hanya "literacy" dalam arti baca tulis. Street Literacy adalah kemampuan orang untuk hidup, belajar, kerja,

main dan berkembang di jalan. *Street literacy* adalah kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dan pertemanan yang dibutuhkan oleh anak jalanan untuk mengatasi resiko, menghadapi tantangan dan mengembangkan diri — baik secara perorangan dan komunitas — di mana mereka berada (di jalan, rumah, rumah belajar, sekolah, lingkungan kerja).

Fokus Program

Proses awal dalam *street literacy* dimulai dengan membina anak-anak jalanan di lokasi mereka berada (*street-based activities*). Kebutuhan anak jalanan yang kami temani dalam kegiatan *street-based* ternyata berkembang. Bahkan sebagian dari mereka memerlukan kegiatan yang bersifat lebih permanen dan berkala, sebagian lainnya membutuhkan kegiatan yang mempunyai prospek lanjutan, baik di bidang pendidikan maupun keterampilan. Pengelolaan kebutuhan dan kegiatan yang semakin berkembang ini mendorong MMK untuk memantapkan pembinaan anak-anak jalanan tersebut ke rumah belajar (*The Learning House*). Sebagian anak yang ingin memperoleh pendidikan dan ketrampilan lanjutan akhirnya memulai kegiatan barunya di Rumah Belajar, sedangkan sebagian lainnya tetap dengan kegiatan yang berbasis di jalanan.

Program *street literacy* bisa dikelompokkan atas tiga kebutuhan anak, yakni sebagai berikut:

Pengembangan diri

Melalui kegiatan dan proses belajar, mengajak anak-anak mengembangkan kemampuan untuk menjaga dan merawat diri (baik secara fisik, emosi, mental), kemampuan untuk bergaul secara wajar dengan teman-teman sebaya dan masyarakat luas, dan meningkatkan kemampuan “pikir-baca-tulis-gambar-merencanakan sesuatu-gerak-berkarya”.

Perlindungan diri

Melalui beberapa latihan untuk memperkuat diri secara fisik (olah raga, latihan beladiri) dan diskusi untuk lebih memahami hak-hak dan untuk menghadapi kekerasan di jalan. Bagian perlindungan diri melibatkan orang lokal, utamanya aparat, satpam, polisi, preman, tokoh masyarakat lokal, dan advokat hukum (dari lembaga bantuan hukum) untuk menjaga dan mendukung keberadaan waktu anak di jalan.

Pengembangan Keterampilan dan Pekerjaan

Melalui pelajaran kayu, batik, menyetik, kerajinan tangan, gambar, sablon, menulis media, usaha dll., mengajak anak-anak menemukan bakat/minat dan mengembangkan keterampilannya. Selain keterampilan, juga mengajak anak belajar-kerja secara berkelompok, merencanakan sesuatu, mengelola uang (modal, laba) dan kewiraswastaan. Semua pelajaran tersebut membantu untuk anak untuk mempersiapkan diri untuk masuk dan menentukan nasib dalam dunia kerja pada usia remaja dan dewasa.

Kendati demikian, ketiga hal di atas harus dipersiapkan beberapa komponen, antara lain tenaga/orang yang akan menyampaikan masukan untuk anak-anak, materi dan cara yang tepat untuk anak dan wadah yang terbuka dan mendukung kehadiran dan perkembangan anak.

Hasil dan Cara Dalam Pencapaian Program

Street Literacy hanya bisa berjalan kalau ada tiga komponen ini, yaitu:

1. Selain anak-anak, orang yang menjadi sangat penting dalam program *street literacy* adalah *street educators* atau pendamping anak jalanan. Pendamping sekaligus sebagai kawan, kakak, ibu/ayah angkat, perawat, guru, pembela, pendukung untuk anak. Namun yang lebih penting dalam pendampingan tersebut

adalah hubungan pertemanan dan kepercayaan di antara pendamping dan anak. Cara yang paling tepat untuk anak — selain pertemanan — adalah peran pendamping sebagai panutan (*role model*) untuk anak.

Mitra Masyarakat Kota mendukung *street educators* atau pendamping dengan beberapa tawaran, misalnya:

- * dukungan atas pekerjaan penuh: keterangan kerja, jadwal mingguan dan bulanan, perjanjian, biaya transportasi, dukungan lembaga, asosiasi pendamping dan gaji. Tawaran menjadi pendamping ini adalah dengan kerja *ful-time* (bisa 24 jam x 7 hari tanpa cuti);
- * kesempatan dalam pengembangan staf (pelatihan, seminar, belajar ketrampilan, perjalanan studi, magang, diskusi);
- * sama-sama mengembangkan kurikulum *Street Literacy* sambil program berjalan (konsultasi dengan pendamping yang lain, melihat sumber-sumber, konsultasi dengan penasehat pendidikan alternatif);
- * mendukung dan bantu mengembangkan jaringan di antara pendamping baik di dalam Jakarta dan juga luar Jakarta.

Disadari bahwa kami sedang mengembangkan profesi yang baru, yakni **Pekerja Sosial yang Baru!**

2. Sampai saat ini, materi dan kurikulum yang tepat dan mendukung perkembangan anak jalanan sangat terbatas. Jadi, sambil pendamping-pendamping itu mengajak anak jalanan menjadi teman, kami juga harus menyiapkan materi dan pelajaran dalam unit-unit atau *module street literacy*. Pendamping bisa menciptakan materi tersebut — karena pendamping juga paling dekat dengan anak dan sudah mengenali kebutuhannya — asal ada waktu untuk merencanakan, menulis, merekam, hasilnya (yang baik dan juga yang gagal) dan merevisi rencana. Kalau pendamping mengikuti proses tersebut atas satu topik (misalnya musik jalanan atau kesehatan sehari-hari atau pengelolaan uang), beberapa minggu kemudian akan muncul satu unit atau modul kesehatan sehari-hari atau modul *street literacy*. Pengalaman tersebut dapat dicetak dan dikirim ke pendamping-pendamping

yang lain sebagai sumber ide pendidikan yang tepat dan mendukung perkembangan anak jalanan.

Anak-anak bisa mengembangkan materi belajar juga (namanya, **Learner Generated Materials** atau LGM), yaitu satu cerita anak bisa menjadi bahan belajar untuk anak yang lain. Kalau sudah dapat dikumpulkan, bisa menjadi majalah atau surat kabar anak jalanan¹

Pada saat kita sedang merencanakan materi belajar tersebut yang harus selalu ingat adalah kebutuhan anak dan pertanyaan pada diri kita sendiri: “anak dapat apa melalui pelajaran tersebut?” Mudah-mudahan bukan hanya pengetahuan, tetapi juga pemahaman, perilaku yang lebih sehat, pertemanan, kemampuan untuk bergaul dengan masyarakat luas dan kesempatan untuk berkreasi dan mengekspresikan diri.

Di rumah belajar setiap hari diusahakan dalam satu hari ada dua atau tiga kegiatan yang berlangsung di antaranya, sekolah informal, kreatifitas, drama, musik anak, musik kelompok, mengetik, perpustakaan, batik, kesehatan, bela diri, sepak bola, diskusi dengan dokter dan ahli hukum, pengelolaan uang, pengembangan usaha, rekreasi dan lain-lain.

Cara dan Metodologi dalam penyampaian ini juga tidak berarti seperti cara yang dapat dipakai di sekolah, di mana guru berdiri di depan banyak anak dan bicara (dan anak pada duduk, diam, dengar). Suatu saat ketika belajar bisa dalam bentuk diskusi, dalam perjalanan, pada saat kerja di pasar, melalui omongan, tulisan, gambar, cerita, nyanyi yang dilakukan secara perorangan — di antara satu pendamping dan satu anak — atau secara kelompok. Bisa juga dilakukan pada pagi, siang, sore atau malam hari. Malah bisa berlangsung dari pagi sampai sore, atau bisa pada waktu sedang menunggu bis kota datang di *halte*. Pada umumnya cara dan metodologi *Street Literacy* adalah cara yang seinteraktif mungkin sehingga anak mempunyai peran besar.

¹ Seperti yang sudah dibikin oleh anak jalanan di Yogya, Medan, dan Bandung.

Disadari bahwa MMK sedang mengembangkan pendidikan (baik materi dan metodologi) yang baru untuk anak jalanan: *Street Literacy!*

3. Lain dari “Rumah Terbuka” tempat anak tinggal atau “Rumah Singgah” tempat anak dapat tinggal sementara, atau “Balai Latihan Kerja” tempat anak belajar ketrampilan tertentu (lalu pulang ke rumah masing-masing), “Rumah Belajar” adalah wadah anak jalanan di mana anak jalanan dapat berkumpul, belajar bersama dan bertemu dengan kakak/*street educators*. Rumah duduk ini di tengah kampung kumuh, sehingga anak bisa belajar menjadi bagian dari masyarakat perkotaan (sosialisasi). Sebagian anak tinggal dan tidur di rumah, belajar menjadi “keluarga besar”, dan sekaligus mengurus rumah tangganya (sosialisasi). Terlebih penting adalah suasana keterbukaan, agar anak jalanan dari mana saja di Jakarta dan juga dari luar Jakarta bisa datang, berkumpul dengan teman sebaya, mengembangkan sesuatu bersama dan mengikuti beberapa kegiatan (yang sudah dijadwalkan).

Hambatan dan ancaman dan kekurangan tentu saja banyak, utamanya karena MMK sedang belajar dan menciptakan sesuatu yang baru (yaitu *Street Literacy* dan Rumah Belajar) sambil berjalan (*learning by doing*). Kebutuhan tinggal untuk anak jalanan yang tidak mempunyai rumah atau orang tuanya dan masa depan remaja jalanan² tetap menjadi tantangan bagi MMK

Kegiatan dan Advokasi Masalah Anak

Kegiatan dan upaya advokasi bagi kami lebih bersifat lokal dan melalui perorangan, daripada yang bersifat nasional dan melalui jalur juridis atau hukum. Kendati demikian MMK tetap mendukung advokasi secara nasional untuk merealisasi konvensi PBB, juga tetap mendiskusikan masalah konvensi dengan anak-anak binaan. Dalam upaya advokasi melibatkan beberapa orang, yakni:

² Dalam arti kerja dan kegiatan ekonomi yang memadai.

- masyarakat lokal,
- orang tuanya atau keluarga asal
- pendamping dan
- anak jalanan sendiri.

Inti atau ide dalam upaya advokasi mencoba menjembatani beberapa kesalahpahaman tentang anak jalanan, meningkatkan hal-hal positif (misalnya, peran anak dalam perkotaan, daya kreatifitas, kebaikan), dan *me-lobby* atas kebutuhan tertentu, misalnya, pendidikan. Beberapa bentuk advokasi lain dilakukan MMK, antara lain:

1. Advokasi dengan masyarakat lokal bisa dilakukan dalam interaksi sehari-hari dan keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan, baik di Rumah Belajar atau di tempat 'nongkrong'/kerja anak di jalanan, misalnya;

- pendamping bisa direkrut dari masyarakat dan remaja lokal;
- bikin kegiatan khusus (hari Raya dll.) dengan masyarakat lokal dan orang tua anak jalanan;
- ikut-serta — anak dan pendamping — di dalam kegiatan dan acara lokal, kerja bakti, kerjasama dengan tetangga dalam proyek memperbaiki kampungnya;
- mengundang masyarakat lokal ke satu kegiatan dengan anak, atau mengundang mereka ke Rumah Belajar dan mengajak diskusi — peran pendamping — supaya mereka lebih memahami anak

2. Satu bentuk advokasi informal mengajukan interaksi dan keterlibatan dengan beberapa keluarga anak melalui kunjungan rumah asal (kalau anak masih mempunyai keluarga dan kalau keluarga ingin tahu tentang kegiatan kami). Antara lain yang bisa dilakukan dalam kunjungan tersebut adalah:

- pendamping dapat *me-lobby* pada orang tua (dan kalau perlu, melindungi anak dari kekerasan atau eksploitasi yang dihadapi anak di rumah;

- pendamping dapat mengundang orang tuanya ke Rumah Belajar (kalau orang tuanya masih peduli atas nasib dan kegiatan anaknya), orang tuanya bisa menjadi bagian dari solusi masalah anak.

3. Pendamping atau *street educators* bisa membuka jalur supaya anak bisa bicara sendiri, atau mewakili anak pada saat tertentu. Anak jalanan perlu “advokat-advokat: (kakak, orang dewasa) di dalam konteks dan pada pendengar/penonton tertentu.

4. Anak-anak jalanan bisa bersuara ke publik dan masyarakat umum sendiri (menjadi advokat untuk diri sendiri). Pendamping membantu anak mempersiapkan diri dan menciptakan beberapa media bersama, misalnya: tulisan, pertunjukan drama/teater, kelompok musik, *bazaar*, pengembangan kerajinan tangan dan jualan di pasar umum, gambar dan foto (karya anak) dan cerita/pengalaman anak. Kalau sudah dapat diciptakan dan dilatih, media tersebut bisa dicetak, diperbanyak dan disebarluaskan ke masyarakat secara luas. Advokasi yang dilakukan oleh anak jalanan sendiri adalah upaya yang sangat efektif dan mempunyai dampak sampingan yang baik (anak dapat mengekspresikan diri, percaya diri dan mengembangkan komunitas dan ciri khas dan kebudayaan anak jalanan).

Oleh karena program penanganan kami memfokus kepada pendidikan, kami juga melakukan (sedang dan akan) beberapa upaya advokasi atas program *street literacy*, misalnya:

- * mengembangkan program *street literacy* (baik materi, cara) dan biarkan anak dan keberhasilan bicara sendiri
- *meningkatkan beberapa keberhasilan dan menawarkan program tersebut ke Depdikbud atau institusi pendidikan yang ada
- * mem-*promote* ide ke masyarakat umum bahwa kerja adalah bagian dari kehidupan, dan kehidupan adalah bagian dari proses pendidikan (kerja = hidup = pendidikan = pengalaman)

- * mengakses program pendidikan formal (sekolah atau BLK atau latihan ketrampilan) kalau anak kami ingin mengikuti pendidikan formal.
- * berusaha supaya program pendidikan kami (*street literacy*) dapat diakui oleh lembaga pendidikan lokal dan nasional.

Kerjasama dengan Lembaga Lain, Termasuk Pemerintah

Untuk mengatasi dan membantu anak jalanan — dan pekerja anak — tentu saja kita perlu mengembangkan kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga lokal, nonpemerintah juga pemerintah lokal dan nasional. Hal itu karena tantangan dan permasalahannya terlalu besar untuk ditangani kelompok kecil, sehingga bentuk kerja sama yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

- * Tukar informasi atas jenis dan maksud program dan keberhasilan dan hambatan/ancaman/masalah/kegagalan program tersebut di antara jaringan lembaga dan orang yang sudah mengembangkan dan melayani anak jalanan (dan pekerja anak).
- * *Referral sistem*, anak binaan dari satu lembaga bisa dikirim ke lembaga lain yang mempunyai pelayanan lebih tepat untuk kasus tersebut (misalnya, masalah hukum, masalah perempuan, masalah kesehatan, masalah pendidikan ketrampilan)
- * Mengembangkan dan menguji coba pendidikan alternatif khusus untuk anak jalanan/pekerja anak (misalnya *street literacy*), lalu menerbitkan dan menyebarluaskan buku panduannya, contoh-contoh kurikulum serta unit-unitnya (atas topik atau masalah tertentu). Kita harus menciptakan pendidikan alternatif ini sendiri untuk anak binaannya.
- * Sebaiknya, pemerintah mengakui eksistensi anak jalanan dan pekerja anak dan juga sadar bahwa anak tersebut tetap akan

kerja-hidup-belajar. Anak-anak tersebut berasal dari keadaan ekonomi-sosial (di keluarga asal) yang tidak mendukung anak menjadi “anak biasa” yang bisa memasuki institusi-institusi biasa (sekolah, masyarakat, lapangan kerja, dll.).

* Sebaiknya, program-program yang sudah diciptakan dan dilaksanakan oleh pemerintah (BLK, latihan ketrampilan, kesempatan kerja-magang-belajar dan juga sekolah formal, baik SD, SMP, dan SMA) dapat diakses dengan mudah oleh anak jalanan dan pekerja anak. Sekarang untuk anak yang ingin mendaftar ada banyak sekali hambatan termasuk biaya, identitas resmi (KTP, KK), administrasi dan masalah kependudukan (RT/RW), cara dalam latihan yang mengutamakan sekolah formal (kemampuan baca-tulis) dan cara belajar yang kaku formal.

Usul Agenda Advokasi untuk Penguatan, Memberdayakan dan Melindungi

Seringkali upaya advokasi dilakukan melalui pembicaraan. Dengan pembicaraan, kami berharap pihak yang lain akan lebih sadar, akan mengubah sikapnya, lalu membantu kami membawa satu perubahan yang akan memperbaiki keadaan anak jalanan/pekerja anak. Kegiatan advokasi tetap mendukung pembicaraannya dan sekaligus memberdayakan anak binaan, misalnya:

* Mengembangkan alat-alat dan sarana pendidikan *street literacy* (pokoknya yang khas anak jalanan), media anak dan program-program pelayanan. Pada forum tertentu, bisa ditawarkan sarana-media-program tersebut sebagai alternatif yang nyata untuk anak jalanan. Sebelum ada alternatif yang nyata untuk anak binaannya, orang lain tidak akan melihat upaya program ini sebagai upaya yang serius dan tepat.

* Topik-topik unit *street literacy* untuk anak bisa meliputi antara lain: hukum dan pengetahuan tentang konvensi PBB, perawatan diri (kesehatan sehari-hari), pendidikan usaha dasar, kreatif-

itas dan ekspresikan diri (musik, drama, seni), kemampuan interaksi sosial (antara anak jalanan sendiri dengan masyarakat lokal, serta dengan masyarakat kota secara luas).

- * Perlindungan anak jalanan paling terasa (untuk anak) di tingkat lokal: polisi, satpam, dan preman setempat harus diajak untuk bersama-sama melindungi anak (dan tidak melihat anak sebagai gangguan ketertiban, sampah masyarakat, atau orang-orang yang membahayakan masyarakat).

- * Advokasi di tingkat nasional bisa menggambarkan beberapa contoh tentang anak dan remaja jalanan sedang dan sudah mengembangkan diri dan sudah tidak acuh dengan masyarakat (biar sama-sama bangga). Tentu saja masalah anak jalanan dan kasus kekerasan, eksploitasi, perkosaan, pembunuhan perlu diadvokasi juga, tetapi pandangan masyarakat terhadap anak jalanan dan kehidupan di jalan sudah berbau *image* yang negatif. Dengan pandangan negatif tersebut akhirnya masyarakat tetap mendukung program pembersihan kota di mana wadah anak (*public space*) dapat “ditutupi”, sehingga anak dan keluarganya ditransmigrasi ke Bekasi, Tangerang atau Kalimantan. Padahal tidak sulit mengembangkan simpati, kehormatan dan penghargaan atas upaya dan kehidupan anak jalanan. Marilah kita melemparkan ke masyarakat cerita anak jalanan yang akan membuka jalan untuk masa depan anak kita.

- * Sekarang ini tetap ada beberapa jenis pekerjaan yang tidak tepat untuk anak (hal-hal yang positif untuk anak kecil sedangkan resiko cukup besar). Orang yang mempekerjakan anak tersebut mestinya diingatkan secara drastis mengenai keadaan dan suasana pekerjaan tersebut atau kalau bisa mencari pekerjaan alternatif untuk anak-anak ini. Misalnya, anak yang bekerja di jermal, di dalam pelacuran dan di beberapa pabrik. Sebelum pekerjaan tersebut — atau pekerjaan lain — dapat dinilai bahaya untuk anak, satu penelitian atau survei kebutuhan yang mengangkut perspektif anak sendiri mesti dilakukan, kebudayaan lokal, latar belakang keluarga dan juga melemparkan beberapa pilihan alternatif untuk anak dan keluarganya.

Anak Jalanan: Dari Masalah Sehari-Hari Sampai Kebijakan

Tata Sudrajat
Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta

Pendahuluan

Bila sampai saat ini anak belum menjadi prioritas pembangunan, patut dimaklumi, karena masalah-masalah sosial yang besar pun masih banyak yang belum diperhatikan. Lagipula masalah-masalah sosial seringkali menjadi urusan kedua setelah masalah-masalah ekonomi usai. Dalam persoalan-persoalan sosial ini seringkali kiprah pemerintah sudah terlambat. Seperti masalah anak jalanan, sementara anak-anak sudah dan tengah diper-oleh banyak ancaman yang membahayakan hidupnya, Departemen Sosial baru berkeputusan tentang pendataan dan definisi anak jalanan.

Beruntung masih ada dukungan dari masyarakat yang sangat besar, baik melalui partisipasi langsung dalam berbagai kegiatan maupun secara formal melalui peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan dukungan ini setidaknya masalah yang terlanjur muncul dapat segera diatasi, karena bila masalah yang muncul tersebut penanganannya ditunda dan dibiarkan menjadi besar, maka dalam sesaat bisa menghancurkan semua tatanan yang telah dibentuk dengan baik.

Sampai saat ini suatu kebijakan khusus untuk anak jalanan dan pekerja anak sudah sangat mendesak untuk dibuat, namun belum juga dikeluarkan. Padahal kebijakan ini dapat menjadi dasar pijakan bagi kesamaan tindakan, utamanya bagi kepentingan masyarakat (LSM) dalam upayanya melakukan berbagai kegiatan terhadap anak jalanan maupun pekerja anak. Belum adanya kebijakan khusus ini akhirnya membuat LSM terkesan bekerja sendiri-sendiri. Hingga akhirnya LSM selalu hati-hati dalam melakukan pekerjaannya, sebagai akibat tidak

dipunyainya cantolan konstitusi. Apalagi dalam budaya politik kita yang bila tidak ada referensi konstitusinya, sering dicap sebagai kelompok luar dari kepentingan pemerintah.

Tampaknya kebijakan yang lambat muncul ini adalah karena masalah dana yang tidak siap ditanggung oleh pemerintah, kebijakan baru ini adalah masalah implikasi dana, hal ini mengingat setiap kebijakan harus diimplementasikan ke dalam sebuah program yang sudah barang tentu memerlukan banyak dana untuk mewujudkannya. Ini tentu akan menguras anggaran pemerintah, apalagi untuk masalah seperti anak jalanan yang terhitung masih baru. Sementara masalah anak-anak terlantar lainnya belum juga disentuh secara efektif.

Pada kebijakan yang ada sampai saat ini, biasanya setelah diwujudkan dalam institusi dan berbagai program seringkali tidak memenuhi harapan. Banyak institusi yang belum berfungsi secara fleksibel, tetapi sudah diklaim bahwa masalah yang dihadapi sudah ditangani. Untuk itu berbagai institusi harus terus mengembangkan fungsinya secara fleksibel, karena masalah ini sangat cepat berkembang dan berjalan seiring dengan kemajuan modernisasi yang begitu cepat memasuki kehidupan masyarakat.

Apalagi dalam strategi pembangunan sumber daya manusia di PJP II ini anak tampaknya belum mendapat perhatian utama, padahal manusia yang unggul dan berkualitas tidak terbentuk begitu saja. Namun harus disiapkan sejak dini, sejak anak-anak, sejak balita, bahkan sejak dalam kandungan. Jadi jangan harap memperoleh SDM yang baik jika pertumbuhan dan perkembangan masa anak-anak tidak mulus. Selain itu bila berbicara tentang anak haruslah secara keseluruhan, meliputi pula aspek anak-anak bermasalah. Bukan hanya memoles anak-anak yang memang sudah unggul, tetapi juga disertakan anak-anak yang mengalami hambatan dalam perkembangannya.

Salah satu kunci yang dapat mengungkapkan permasalahan di atas adalah karena tidak adanya *political will* yang kuat dari pemerintah. Suatu *political will* harus gencar dan diikuti pula oleh suatu tindakan untuk mengatasi anak-anak bermasalah ini. Lihat

contohnya dalam kasus penahanan anak yang dilakukan dengan sewenang-wenang. Merembaknya kasus ini ternyata tidak juga menggoyahkan para pengambil keputusan untuk menggolkan UU peradilan anak yang sudah bertahun-tahun terkatung-katung.

Demikian pula dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan untuk mengatasi masalah anak yang sampai saat ini belum terkoordinasi dengan baik. Urusan anak dibagi dalam beberapa departemen, yakni Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kesehatan yang kemudian pada tingkat Menko Kesra dibentuk kelompok kerja. Kalau pemerintah bisa membentuk BKKBN atau DNIKS, mengapa tidak dapat dibentuk Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Anak? Atau lembaga sejenis yang mempunyai *level* tidak jauh dari departemen. Jika saja pengelolaan urusan anak diadakan dalam satu naungan, tentu akan lebih mengefektifkan pekerjaan dan pencapaian tujuan daripada dibagi-bagi seperti sekarang ini yang memerlukan banyak waktu dan tenaga.

Meski kegiatan kesejahteraan anak merupakan bagian usaha kesejahteraan sosial, tetapi yang patut diingat adalah kegiatan ini tidak dapat dipandang sebagai kegiatan konsumtif yang hanya menghabiskan uang. Akan lebih baik mengeluarkan rupiah untuk mengatasi 10 anak nakal ketimbang membiarkan sepuluh anak tersebut tetap nakal dan menjadi penjahat di kemudian hari. Kerugian yang lebih besar akan diderita negara dan masyarakat di masa datang jika tidak dilakukan satu tindakan untuk merubah mereka dari awal. Pengeluaran biaya untuk penanganan anak-anak bermasalah bisa jadi merupakan investasi yang bermanfaat besar di masa datang.

Dengan kata lain masalah anak ternyata tidak berdiri sendiri, mereka sebenarnya merupakan akibat dari berbagai masalah makro seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, kurangnya kebijakan, *stress* dalam keluarga dan tuntutan produksi. *Ngenes*-nya, sebagai korban dari masalah yang besar, mereka sebagai anak jalanan dan pekerja anak dalam kesehariannya menghadapi juga masalah-masalah yang cukup rumit. Betapa tidak mengharukan,

sosok yang masih belum tahu apa-apa, belum mandiri dan belum tuntas untuk bertanggung jawab sudah harus berhadapan pada dua dimensi masalah, yakni korban dari situasi makro dan masalah keseharian mereka. Oleh karenanya, selain tindakan di tingkat makro melalui advokasi, penting untuk tidak melupakan juga menolong keseharian mereka melalui bimbingan dan pendampingan. Tak seorang pun bisa menunda pemenuhan kebutuhan anak sampai muncul suatu kebijakan yang diharapkan. Arah pemberdayaan mereka selayaknya juga ditujukan pada penguatan fungsi-fungsi pribadi dan keluarganya, sehingga menjadi pribadi-pribadi tegar menghadapi situasi hidup yang semakin berat saja.

Tak pelak, anak jalanan dan pekerja anak merupakan pejuang kehidupan. Mereka berani memasuki suatu dunia yang mungkin bagi anak-anak normal tak dapat melakukannya. Keberanian ini bukan merupakan suatu paksaan, karena tidak semua anak telantar memilih menjadi anak jalanan atau pekerja anak. Meski mereka menghadapi berbagai masalah, mereka tetap berjuang untuk meneruskan hidup bukan melulu untuk dirinya tetapi juga untuk keluarganya. Celaknya masyarakat sering tidak adil menilai mereka, perilaku buruk mereka lebih sering dikedepankan ketimbang jasa-jasa mereka.

Siapa tahu misalnya barang-barang yang ada di rumah anda merupakan hasil ketrampilan mereka atau ketika anda kehujanan, di tengah jalan mereka menyodorkan payung dan dengan rela berhujan-hujan hanya untuk seratus rupiah.

Anak Jalanan

Anak jalanan dan pekerja anak meski sama-sama masuk kategori anak marjinal, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang cukup tajam. Sebagian berpendapat bahwa anak jalanan adalah pekerja anak informal karena mereka sebenarnya bekerja di jalanan, tetapi sisi-sisi kehidupan anak jalanan tidak cukup dilihat dari aspek pekerjaan. Bahkan pada beberapa anak jalanan, bekerja bukan merupakan hal yang mutlak bagi. Bagi mereka persoalan sebenarnya bukan bekerja atau tidak, melainkan

bagaimana harus tetap hidup (*survived*)? Untuk menjawab pertanyaan kehidupan itu, mereka bisa dengan mengemis, memakan *oyen* (makanan sisa) pun mereka bisa hidup, pekerjaan menjadi tidak masalah bagi mereka. Dengan demikian anak-anak jalanan seperti ini tidak bisa dimasukkan sebagai kelompok anak yang bekerja, tetapi bisa dimasukkan sebagai anak-anak yang menggelandang.

Masalah pekerja anak berkuat pada persoalan-persoalan yang menyangkut faktor-faktor, seperti pengusaha, pemerintah, lingkungan pekerjaan, keluarga dan anak sendiri. Berbeda dengan pekerja anak, anak jalanan menghadapi berbagai masalah yang meliputi pekerjaan, pendidikan, lingkungan jalanan, keluarga, teman sebaya, kriminalitas, eksploitasi dan lain-lain. Selain itu anak jalanan merupakan kelompok yang sangat beda dan antagonis dengan anak-anak normal yang hidup di tengah keluarga, bersekolah dan bermain dengan lingkungan sebaya, sedangkan di jalanan, anak hidup tanpa keluarga, tidak sekolah dan selalu bermain dengan sesama anak jalanan lelaki maupun perempuan jalanan.

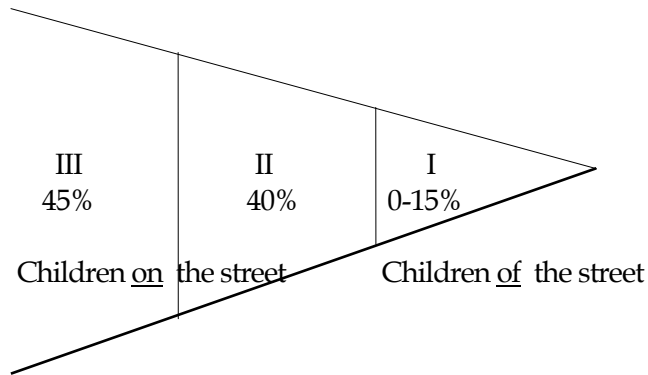
Untuk mengakomodasi variasi anak jalanan, pada umumnya anak jalanan terbagi dua; yakni *pertama*, *Children of the street* (anak-anak yang tumbuh dari jalanan), seluruh waktunya dihabiskan di jalanan. Adapun ciri dari anak-anak ini biasanya tinggal dan bekerja di jalanan (*living and working on the street*), tidak mempunyai rumah (*homeless*) dan jarang atau bahkan tidak pernah kontak dengan keluarga. Mereka umumnya berasal dari keluarga yang berkonflik, misalnya ayah-ibunya cerai, penyiksaan orang tuanya dan konflik-konflik lainnya. Mereka lebih *mobile*, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, karena mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Masalah yang banyak dialami mereka adalah karena tinggal di jalanan dan tanpa ada yang mendampingi. Jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan kelompok anak jalannya lainnya, diperkirakan hanya 10-15% dari seluruh populasi anak jalanan.

Kedua, *Children on the street* (anak-anak yang ada di jalanan), yakni anak-anak yang hanya berada sesaat di jalanan. Di dalam kelompok ini sendiri terdapat dua kelompok lagi anak jalanan,

yakni anak dari luar kota dan anak yang tinggal bersama dengan orang tuanya. Pada anak-anak dari luar kota, mereka biasanya mengontrak rumah secara bersama-sama di satu lingkungan tertentu dan penghuninya adalah teman satu daerah sendiri. Mereka ini sudah tidak bersekolah lagi dan ikut ke kota karena ajakan teman-teman atau orang yang lebih dewasa. Kontak dengan keluarga lebih sering dibandingkan kelompok *Children of the street*, bahkan lebih teratur, misalnya sebulan sekali atau dua bulan sekali untuk menyerahkan uang penghasilannya kepada orang tua. Sebagian kecil mereka tinggal bersama orang tuanya (urbanisan). Motivasi mereka adalah ekonomi, jarang yang sifatnya konflik.

Kelompok kedua adalah anak yang sesaat di jalan, yaitu adalah anak-anak dari dalam kota sendiri dan masih tinggal bersama orang tuanya. Biasanya orang tua mereka ada yang asli penduduk kota dan ada pula urbanisan. Sebagian besar anak-anak ini masih bersekolah, namun ketika di luar waktu sekolah, mereka ke jalanan dan umumnya berjualan koran. Di samping mempunyai motivasi ekonomi, beberapa anak mempunyai motivasi untuk belajar mencari uang dan menolong diri sendiri. Aspirasi mereka terhadap sekolah masih baik dibandingkan kelompok anak jalan lainnya. Mereka pulang ke rumahnya setelah berjualan, tetapi karena jalanan menawarkan kemudahan memperoleh uang dan hal-hal menarik lainnya maka sebagian kecil dari mereka menjadi lebih lama di jalanan. Lambat laun mereka meninggalkan sekolah dan rumah, sehingga secara tidak sadar mereka menjadi *children of the street*. Dibandingkan dengan kelompok pertama, dua kelompok terakhir ini lebih sedikit mempunyai masalah, kelompok *children on the street* mencapai 40-45% dari seluruh populasi anak jalanan.

Klarifikasi perbedaan antara anak jalanan dengan pekerja anak jelas diperlukan, yakni untuk menentukan definisi program. Di samping itu antara anak jalanan dan pekerja anak, baik dalam tingkat internasional maupun nasional mempunyai kepentingan dan isu-isu sendiri-sendiri. Dengan pembedaan ini maka kedua masalah — antara anak marjinal atau anak jalanan — ini dalam pengkajian dan intervensi program akan lebih dalam lagi.



Gambar 1: Diagram kelompok anak jalanan

Masalah dan Penanganan Anak Jalanan

Anak jalanan adalah kelompok anak yang menghadapi banyak masalah. Selain masalah pribadi sehari-hari di jalanan, perkawanan dan pekerjaan, anak jalanan secara langsung menerima pengaruh-pengaruh lingkungan yang datang dari ke-luarga maupun jalanan tempat ia berada. Di jalanan, stasiun, mall, terminal ia sering diuber-uber petugas karena tidak diizinkan berjualan di tempat itu. Jika tertangkap, hukuman berat pun mereka terima. Para preman pun kadang memanfaatkan mereka untuk tindak pelanggaran hukum kecil-kecilan. Risiko-risiko lain yang dihadapi anak di jalan antara lain:

1. Korban eksploitasi seks ataupun ekonomi
2. Penyiksaan fisik
3. Kecelakaan lalu lintas
4. Ditangkap polisi
5. Korban kejahatan dan penggunaan obat
6. Konflik dengan anak-anak lain
7. Terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum baik sengaja maupun tidak.

Kondisi risiko di jalanan tersebut hampir sama di seluruh negara berkembang. Di Brazil, anak jalanan di'habisi' karena dianggap sebagai mata rantai jaringan narkoba, selain itu mereka juga dianggap oleh pemerintah sebagai beban ekonomi yang tidak bisa ditanggulangi lagi. Di masyarakat, banyak warga yang menolak mereka karena tidak memiliki kartu identitas. Di keluarga, kalau bukan tekanan ekonomi harus memperoleh uang untuk menopang keluarga, beberapa anak jalanan berasal dari kekerasan orang tua yang menyimpannya.

Ada tiga tingkat yang menyebabkan munculnya fenomena anak jalanan, yakni:

1. Tingkat mikro (*immediate causes*), yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi anak dan keluarganya;
2. Tingkat meso (*underlying causes*), yakni faktor-faktor yang ada di masyarakat tempat anak dan keluarga berada;
3. Tingkat makro (*basic causes*), yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan struktur makro dari masyarakat seperti ekonomi, politik, dan kebudayaan.

Secara lebih terperinci keberadaan anak di jalanan didorong pula oleh kondisi-kondisi keluarga dan ekonomi seperti;

1. Mencari pekerjaan
2. Telantar
3. Ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar
4. Kondisi psikologis seperti ditolak orang tua
5. Salah perawatan atau kekerasan di rumah
6. Kesulitan berhubungan dengan keluarga atau tetangga
7. Bertualang
8. Lari dari kewajiban keluarga

Meski kesulitan dan masalah selalu dihadapi oleh anak jalanan, tetap saja mereka tidak berbeda dengan anak-anak sebayanya. Anak jalanan juga mempunyai harapan-harapan dan aspirasi, adapun harapan dan aspirasinya adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan sekolah
2. Memperoleh pekerjaan tetap dan cukup memperoleh uang
3. Bersatu kembali dengan keluarga
4. Memulai hidup baru jika diberikan kesempatan dan cukup dukungan.

Dengan uraian di atas, tampaknya anak jalanan merupakan korban dari masalah-masalah yang lebih besar di sekelilingnya, untuk menepis hal itu anak jalanan tidak dapat berbuat banyak. Anak jalanan menerima masalah itu tanpa dapat berbuat banyak untuk menghalaunya, celaknya masalah tersebut berada di luar kemampuan dan daya tahan anak jalanan. Bila orang yang dijadikan harapan dan gantungannya tidak makan, maka anak pun akan merasakannya juga.

Ketergantungan yang demikian tinggi dengan lingkungan sekelilingnya, maka wajar jika penanganannya juga turut melibatkan masyarakat lingkungan sekelilingnya. Pelibatan ini meliputi seluruh orang yang hidup di sekelilingnya, baik keluarga, teman-temannya, pekerjaannya dan juga termasuk orang-orang yang berpengaruh lainnya. Tanpa tindakan intervensi terhadap lingkungan di sekelilingnya, maka akan sulit anak jalanan keluar dari kungkungan kesulitan.

Kelompok anak jalanan merupakan kelompok yang unik, justru di tengah kesulitan masalah dan resiko besar yang terdapat di jalanan itu mereka dapat bertahan hidup. Tidak sedikit anak jalanan memperoleh pelajaran dari jalanan, dari situ mereka cepat belajar dan memahami sehingga akhirnya secara alamiah berbagai potensi mereka dapat tersalurkan dengan baik. Berbagai potensi mereka yang telah memberikan manfaat agar dapat bertahan hidup di jalanan antara lain seperti:

1. Pandai membaca peluang
2. Tahan kerja keras karena terbiasa dengan panas dan hujan
3. Belajar bekerja
4. Mempunyai solidaritas yang tinggi sesama teman
5. Menempa kesabaran
6. Mudah belajar membuat sesuatu (keterampilan)
7. Bersikap terbuka dan percaya

Kendati anak jalanan memang secara alamiah sudah mempunyai potensi, beberapa anak jalanan justru sengaja menjadikan jalanan sebagai sarana belajar untuk menaklukan kehidupan jalanan. Latar belakang mereka dengan sengaja terjun ke jalanan biasanya untuk belajar kerja, memperoleh uang dan sekaligus juga membantu orang tuanya.

Segi positif yang dimiliki anak jalanan ini sangat penting diperhatikan, utamanya dalam penanganan dan pemberdayaan anak jalanan. Penanganan anak jalanan ini juga patut melihat kondisi anak jalanan yang beragam, sehingga dengan kondisi ini membuat model penanganan anak jalanan selalu berbeda dan disesuaikan dengan kondisinya. Model-model yang diterapkan untuk anak jalanan tidak lepas pula dari pengaruh visi dan misi lembaga. Namun secara umum terdapat dua tujuan dalam penanganan anak jalanan, yakni:

1. Melepaskan anak jalanan untuk dikembalikan kepada keluarga asli, keluarga pengganti atau pun panti.
2. Penguatan anak di jalan dengan memberikan alternatif pekerjaan dan ketrampilan.

Kedua tujuan tersebut tampak saling melengkapi, yakni memperkuat anak di jalan kemudian mencarikan peluang untuk mengembalikan anak kepada keluarganya. Meski demikian dalam prakteknya tidak mustahil ditemukan kebalikannya, seperti misalnya dengan kasus beberapa anak yang memang bisa dikembalikan, tetapi yang lainnya tidak bisa dikembalikan karena telah kehilangan akses, meski telah dirujuk ke lembaga manapun.

Umumnya tipe pendekatan yang dilakukan oleh LSM untuk mencapai tujuan di atas adalah dengan melakukan beberapa pendekatan, antara lain sebagai berikut:

Street based

Street based merupakan penanganan di jalan atau tempat-tempat anak jalanan berada, kemudian para *street educator* datang kepada mereka berdialog, mendampingi mereka bekerja, me-

mahami dan menerima situasinya serta menempatkan diri sebagai teman. Dalam beberapa jam, anak-anak diberikan materi pendidikan dan ketrampilan, di samping itu anak jalanan memperoleh kehangatan hubungan dan perhatian yang bisa menumbuhkan kepercayaan satu sama lain yang berguna bagi pencapaian tujuan intervensi.

Centre based

Pendekatan ini merupakan penanganan di lembaga atau panti. Anak-anak yang masuk dalam program ini ditampung dan diberikan pelayanan di lembaga atau panti, seperti pada malam hari diberikan makanan dan perlindungan, serta perlakuan yang hangat dan bersahabat dari pekerja sosial. Pada panti yang permanen disediakan pelayanan pendidikan, keterampilan, kebutuhan dasar, kesehatan, kesenian dan pekerjaan.

Dalam penanganan di lembaga atau di panti ini terdapat beberapa jenis atau model penampungan, yakni seperti penampungan yang bersifat sementara (*drop-in centre*) dan tetap (*residential centre*)¹. Untuk anak jalanan yang masih bolak-balik ke jalan biasanya dimasukkan ke dalam *drop-in centre*, sedang untuk anak-anak yang sudah benar-benar meninggalkan jalanan akan ditempatkan di *residential centre*.

Contoh lembaga dengan pendekatan *centre based* ini adalah Yayasan Amalia di Jakarta Utara, sedangkan rumah singgah YKAI di Jakarta Timur hanya berupa *drop-in centre*.

Community based

Di dalam *community based*, penanganan melibatkan seluruh potensi masyarakat, utamanya keluarga atau orang tua anak jalanan. Pendekatan ini bersifat *preventif*, yakni mencegah anak-anak turun ke jalan. Keluarga diberikan kegiatan penyuluhan peng-

¹ Pada panti atau lembaga anak jalanan yang mapan biasanya disediakan *drop-in centre* dan *residential centre*.

asuhan anak dan peningkatan taraf hidup, sementara anak-anak diberi kesempatan memperoleh pendidikan formal maupun informal, pengisian waktu luang dan kegiatan lainnya. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat agar sanggup melindungi, mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Tiga pendekatan tersebut merupakan pilihan yang bisa diterapkan kepada kondisi anak-anak. Tidak satu pun tipe pendekatan yang dilakukan lebih baik dari yang lain, karena setiap tipe mempunyai ciri khas tersendiri dan semuanya tergantung pada kebutuhan dan masalah anak jalannya. Berdasarkan pengertian ini pula maka keberhasilan penanganan tergantung pada pengaruhnya kepada anak.

Tidak semua LSM menggunakan strategi pendekatan kepada anak dan keluarga, ini dimaklumi karena keluarga anak biasanya jauh dan membutuhkan banyak biaya dan waktu untuk dijangkau. Padahal strategi pendekatan yang melibatkan anak dan keluarga ini sangat tepat, mengingat sumber masalah sebenarnya datang dari keluarga.

Penanganan anak jalanan ini akan menjadi lebih baik lagi bila diperluas lagi pada lingkungan di tempat kerja dan bermain anak jalanan, meski pada akhirnya penanganan menjadi lebih kompleks dan menyeluruh. Untuk menjangkau ini bisa dilakukan dengan cara pemetaan, yakni dengan menguraikan orang-orang yang terlibat dan berhubungan dengan anak jalanan. Meski akhirnya pekerjaan menjadi lebih kompleks, tetapi penanganannya menjadi menyeluruh.

Kegiatan-kegiatan yang umumnya dilakukan oleh para LSM berkisar pada:

1. Bimbingan sosial
2. Pendidikan jalanan
3. Ekonomi jalanan
4. Bimbingan keluarga
5. Kegiatan agama

6. *Income generating*
7. *Literacy*
8. Reintegrasi dengan keluarga
9. Kesenian
10. Advokasi

Bila pendekatan program/strategi di atas dihubungkan dengan tipologi anak jalanan, maka akan tampak pada tabel 1. Dari tabel 1 ini juga diketahui fungsi kegiatan pelayanan yang dilakukan. Sebenarnya fungsi intervensi lebih dari satu, namun yang ditulis merupakan fungsi utama.

Tabel 1. Pendekatan dalam penanganan anak jalanan

Pengelompokan Anak Jalanan	Pendekatan Program/ Strategi	Fungsi Intervensi
Anak yg masih berhubungan/tinggal dengan orang tua	<i>Community based</i>	Preventif
Anak yg masih ada hubungan dengan keluarga tetapi jarang berhubungan/ tinggal dengan orang tua	<i>Street based</i>	Perlindungan
Anak tersisah/putus hubungan dengan keluarga/orang tua	<i>Centre based</i>	Rehabilitasi

Pengalaman Rumah Singgah Anak Jalanan YKAI

Rumah Singgah Anak Jalanan (RSAJ) merupakan program penanganan langsung anak jalanan yang dilakukan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI). Perhatian YKAI terhadap anak jalanan telah dimulai sejak tahun 1989 melalui berbagai kajian penelitian, penerbitan buletin maupun forum ilmiah. Jauh sebelumnya, YKAI juga menaruh perhatian

terhadap pekerja anak dengan menyelenggarakan penelitian dan lokakarya nasional. RSAJ didirikan tanggal 23 Januari 1994 yang berbarengan dengan kegiatan *need assesment* pada 1 Desember 1993 sampai dengan 30 April 1994. Sedangkan sebagai suatu program, RSAJ mulai efektif sejak 1 Mei 1994 sampai dengan sekarang.

RSAJ merupakan lembaga semi institusional (semi panti), bentuk-nya berbeda dengan bentuk nonpanti dan sistem panti. Pada sistem non panti, lembaga tidak menampung anak binaan, namun melakukan pelayanan langsung ke rumah anak jalanan, seperti memberikan beasiswa, bantuan makanan ataupun pakaian. Sedangkan pada sistem panti, anak-anak binaan — biasanya anak-anak yang orang tuanya tidak mampu lagi — ditampung di dalam panti. Di panti mereka memperoleh banyak fasilitas, mulai dari kebutuhan dasar, pendidikan, keterampilan, kesehatan, pengisian waktu luang, pekerjaan sampai pada perkawinan. Mereka terikat secara formal dan bahkan sebagian panti mempunyai aturan-aturan yang ketat.

Program semi institusional bersifat terbuka (*open house*) selama 24 jam untuk anak jalanan. Anak-anak tidak diikat secara formal dan mereka bebas keluar masuk RSAJ kapan pun mereka mau, untuk sekedar berkumpul atau untuk penanganan suatu masalah. Meski semi instutisional, RSAJ dapat dipandang sebagai *centre based*, yakni suatu lembaga/panti yang dikelola secara fleksibel menuruti keadaan anak jalanan. RSAJ memang kecil dan hanya bisa menampung sekitar 10 anak, namun pelayanan yang diberikan kepada anak-anak yang tinggal di RSAJ lebih intensif. Di rumah singgah ini anak-anak bagai suatu keluarga, karena pekerja sosial yang menangani mereka bertindak sebagai orang tua pengganti. Anak-anak binaan datang berkelompok atau sendirian meluangkan waktu selama beberapa jam untuk bermain, bahkan berhari-hari tinggal di tempat singgah. Kelompok *homeless* biasanya berbulan-bulan tinggal di RSAJ, sampai akhirnya mereka memperoleh rujukan.

Disadari bahwa RSAJ mempunyai keterbatasan pekerja sosial dan anak jalanan sendiri masih mempunyai keluarga, maka

RSAJ hanya bertindak sebagai jembatan antara anak dan keluarga (fasilitator), atau berupa *drop-in centre*. Dengan fungsi 'fasilitator' ini tujuan yang ingin dicapai adalah pelepasan anak dari jalan. Untuk mencapai tujuan itu maka dikembangkan sistem *referral*, seperti merujuk kepada keluarga asli, keluarga panti, panti atau bersama teman-temannya. Dengan demikian RSAJ menggunakan pendekatan melalui anak dan keluarga secara sekaligus.

Pencapaian tujuan pelepasan anak dari jalan ternyata bukan pekerjaan yang mudah, bahkan ada kelompok anak yang tidak bisa dirujuk ke manapun, termasuk juga anak-anak jalanan yang memang sudah tidak tinggal dengan orang tuanya serta berkelompok mengontrak bersama-sama. Proses pelepasan pada kasus-kasus ini sangat bervariasi, dari yang bisa dicapai beberapa hari sampai yang berbulan-bulan².

Dengan pola demikian, RSAJ sendiri dikembangkan dengan tujuan agar:

1. Anak mempunyai cara hidup yang sehat dan normatif
2. Anak mempunyai pengetahuan dan ketrampilan
3. Anak dapat menghindarkan diri dari pengaruh negatif jalanan.

Dengan demikian maka selama anak dalam proses pemulangan di RSAJ, anak-anak dibekali materi sesuai dengan tujuan di atas, sehingga apabila seorang anak tidak lepas dari jalan ia akan tetap *survive* hidup di jalanan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan RSAJ dan sesuai dengan bentuk lembaga, fungsinya, pendekatan yang kemudian dilakukan adalah:

² Di antara anak-anak ini ada juga yang kemudian kembali ke jalanan.

Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial merupakan kegiatan membantu anak untuk mengatasi masalah sehari-hari, baik dalam lingkungan jalanan, pekerjaan, keluarga maupun masalah pribadi. Anak-anak ditangani secara satu per satu dengan pendekatan *case by case* (*social case work*). Selain itu anak-anak yang mempunyai kesamaan masalah dikelompokkan melalui metode *social work group*. Di dalam kelompok tersebut bimbingan yang diberikan meliputi berbagai masalah anak, seperti hubungan dengan keluarga, hubungan dengan sekolah, pekerjaan dan pengaturan uang, persahabatan, kesehatan, keagamaan, masa depan dan masalah negatif. Kegiatan ini untuk mengarahkan anak agar mempunyai mekanisme pertahanan diri agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan mengatasi berbagai ancaman-ancaman di jalanan. Bimbingan dapat berlangsung di jalan, di rumah mereka maupun di RSAJ sendiri, dengan metoda pemberian nasehat, penyuluhan, diskusi, permainan peran dll.

Pendidikan Jalanan

Banyak anak jalanan yang menghadapi situasi jalanan namun tidak tahu tentang apa yang dihadapinya, seperti pengalaman di-'usap-usap' dan di-'isap-isap' kemaluannya oleh lelaki dewasa. Apalagi sosok anak-anak jalanan yang umumnya bergaul dengan orang dewasa di jalanan, karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup akhirnya anak-anak seringkali dijadikan suruhan (umpan) untuk perilaku-perilaku yang negatif. Dengan demikian pendidikan-an jalanan yang diberikan adalah materi pengetahuan yang sesuai dengan situasi dan masalah yang dihadapi anak di jalanan. Materi ini berupa pengetahuan umum, kesehatan, sistem sosial, komunikasi dan *literacy*. Pendidikan jalanan dalam prakteknya dilakukan pada malam hari di RSAJ, di "Waru-waruu", yakni tempat sekelompok anak jalanan mengontrak secara bersama-sama.

Home Visit

Kegiatan ini merupakan penjabaran dari pendekatan keluarga. *Home visit* dilakukan kepada semua keluarga anak jalanan, utamanya anak jalanan yang sudah kembali ke orang tuanya. Kegiatan ini terbagi empat kegiatan, yakni:

1. Kunjungan keluarga
2. Mengirim surat
3. Datang ke RSAJ
4. Menerima surat.

Dalam setiap kunjungan dilakukan bimbingan pengasuhan anak kepada orang tua dan mengidentifikasi anak yang sudah pulang. Dalam perkembangannya, kepada orang tua anak diberikan pula pinjaman uang dari yang nilainya puluhan ribu sampai ratusan ribu, pinjaman ini digunakan untuk masalah sehari-hari atau untuk *income generating*.

Dari uraian atas, terlihat bahwa kegiatan RSAJ bertumpu pada penguatan anak dan keluarganya, selain itu RSAJ juga mengarahkan anak binaan dan keluarganya agar dapat mandiri, berusaha bisa mengatasi masalah secara benar dan pemenuhan hidup sehari-hari.

Untuk kegiatan makro yang berkaitan dengan kebijakan, RSAJ merupakan anggota Jaringan Kerja Anak dan Pekerja Anak yang aktif memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial. Advokasi yang dilakukan hanya pada lingkungan terbatas, yakni pada petugas terminal agar anak-anak dapat menyemir dan bekerja di terminal.

Sebagai suatu gambaran hasil, selama tahun 1994 telah 86 anak datang ke RSAJ, 44 di antaranya rutin dan tinggal beberapa bulan. Di antaranya sebanyak 22 anak kembali ke orang tua, 9 anak mengikuti saudaranya, 13 anak sekolah dan 8 anak alih kerja. Jumlah kunjungan keluarga sebanyak 25 kali yakni: Jakarta 8 kali, Jabar 7 kali, Jawa Tengah 4 kali dan Lampung sebanyak 6 kali.

Untuk mencapai tujuannya, beberapa hambatan sering kali di hadapi RSAJ. Hambatan tersebut antara lain:

- Keterbatasan pekerja sosial yang hanya dua orang tidak maksimal melaksanakan kegiatan.
- Anak binaan yang menyebar di luar Jakarta sehingga sulit memonitor
- Beberapa anak sangat *mobile*, sehingga tidak mudah untuk dilayani.

Usulan Agenda Advokasi

Betapapun advokasi merupakan kegiatan penting untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan nyaman bagi anak jalanan, namun kegiatan langsung terhadap anak harus tetap diprioritaskan. Advokasi dapat memberikan keuntungan yang besar, karena jika berhasil akan dapat menggerakkan sumber-sumber untuk pelayanan. Namun hal itu tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Advokasi kepada polisi yang kekuatannya lebih besar misalnya, bahkan membutuhkan waktu bertahun-tahun karena banyak faktor yang harus diperhatikan, baik ekonomi, sosial budaya maupun politik. Pada saat seperti itu, anak jalanan harus segera dilayani. Hal yang tidak mungkin apabila kebutuhan anak ditunda karena LSM bergerak menunggu keberhasilan advokasi. Beberapa hal yang dapat diusulkan dalam agenda advokasi adalah:

1. Bangun dari bawah melalui *social action* pada *grass roots* dan *lobbying* untuk kelompok berpengaruh. Kedua kegiatan ini berupaya membentuk opini publik dan memperoleh dukungan. Aksi di lapangan perlu untuk penyebaran isu, sedangkan *lobbying* pada kelas atas untuk menggugah perhatian yang lebih serius.
2. Memulai advokasi dari lingkungan yang kecil dan dekat kepada anak. Ini bersifat *emergency* karena langsung dirasakan anak, seperti anak diijinkan berjualan di tempat-tempat umum. Dari yang kecil/lokal diharapkan berkembang ke arah yang lebih luas.

3. Membuat *public campaign* melalui forum ilmiah maupun reportase media cetak dan elektronik. Dukungan publik harus terus diperoleh melalui publikasi yang gencar, terutama dengan mengundang kelompok yang berpengaruh seperti politisi, akademisi, pejabat pemerintah, praktisi dan kelompok yang berpengaruh lainnya melalui seminar, diskusi, debat terbuka dan forum-forum lainnya. Penerbitan juga penting untuk membahas secara mendalam isu-isu yang muncul. Media cetak dan elektronik diperlukan dalam upaya penyebaran isu yang lebih luas.
4. Memperkuat jaringan LSM yang bergerak pada anak jalanan maupun pekerja anak untuk kegiatan makro. Untuk itu perlu pula ada advokasi yang merupakan gabungan beberapa LSM, karena LSM hanya bisa bersuara apabila merupakan gabungan dari berbagai lembaga yang memang betul-betul bergerak dalam masalah yang ditangani. Selain itu pada tingkat LSM adalah dengan memperkuat program-programnya untuk pemberdayaan pada anak dan keluarga. LSM pun harus dapat menunjukkan apa yang telah dikerjakannya selama ini

Rekaman Proses

Surya Mulandar
Gugus Analisis, Jakarta

Pendahuluan

Sampai sekarang pemerintah masih melarang anak untuk bekerja, baik untuk yang berada di sektor informal maupun di sektor formal. Implikasi yang muncul dari kebijakan 'malu-malu' ini pada akhirnya memunculkan pelanggaran-pelanggaran tentang hak anak yang bekerja di pabrik, perkebunan, pertanian maupun di jalanan.

Hak anak untuk menentukan nasibnya sendiri yang telah 'di-amputasi' ini, makin diperparah lagi oleh penindasan yang dialaminya ketika sedang bekerja. Sementara kehadiran mereka untuk bekerja tidak dapat dihindari, karena bisa didorong atas tekanan ekonomi maupun atas dasar keinginan anak untuk bekerja.

Di sisi lain Organisasi Non Pemerintah (Ornop) berupaya keras melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak-anak, tidak lain adalah agar mereka memiliki hak yang sama dan mendapatkan perlindungan yang layak. Kendati demikian dalam gerakannya Ornop pun seringkali berbenturan dengan kepentingan pemerintah atau antarOrnop sendiri, bahkan perdebatan yang tidak kunjung habis adalah perdebatan tentang antara dilarang atau tidak dan dihapuskan atau tidak. Sementara pelanggaran hak anak terus berlangsung, sedangkan perubahan di tingkat makro tidak mengalami perubahan yang berarti. Bila kondisi semacam ini dibiarkan terus-menerus tentu akan sangat sulit menemukan upaya perlindungan terhadap pelanggaran hak anak.

Dengan mempertemukan berbagai Ornop dan aktivisnya dalam lokakarya, setidaknya mungkin dapat memberi pijakan baru untuk mengidentifikasi masalah maupun hambatan yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan terhadap anak-anak marjinal. Selain itu pemahaman baru terhadap perubahan sosial, ekonomi

dan politik di antara Ornop dan aktivisnya diharapkan akan turut membawa perubahan yang berarti dalam kegiatan di akar rum-put. Hingga akhirnya lokakarya tidak terbatas pada media tukar pengalaman aktivis Ornop yang menjadi partisipan saja, namun juga merupakan media untuk menimba, pembelajaran, memben-tuk mekanisme komunikasi dan sosialisasi. Kemudian bila sudah mulai terbukanya jalinan tersebut, maka untuk selanjutnya akan memudahkan para aktivis untuk mulai memperluas cakupan kerja Ornop. Tidak hanya terbatas pada pemberdayaan di tingkat lokal, namun juga pemberdayaan yang sifatnya holistik.

Dengan dasar pijakan di atas, pada tanggal 12-14 September 1995 Gugus Analisis bekerjasama dengan AKATIGA Bandung telah melaksanakan Lokakarya “Pekerja Anak dan Anak Marjinal Indo-nesia; Menuju Ke Arah Pengakuan dan Perlindungan”, bertem-pat di Wisma Kilang Caringin, Sukabumi Jawa-Barat. Lokakarya yang bersifat terbatas ini, mengundang aktivis Ornop dan pribadi yang peduli dalam masalah buruh anak dan Anak Marjinal.

Secara umum lokakarya boleh dianggap telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan. Kesengajaan untuk melibatkan partisipan lokakarya yang cukup selektif, ternyata juga berdampak pada dalamnya kajian selama diskusi-diskusi dalam lokakarya. Hasil akhir lokakarya pun tidak terjebak pada rencana-rencana ambisius, namun hasil yang ditekankan adalah aksi konkret yang dapat diimplementasikan langsung oleh partisipan setelah lokakarya berakhir. Kemudian di akhir lokakarya semua partisipan bersepakat untuk menyebarkan berbagai keputusan lokakarya kepada masyarakat luas, yakni dengan melalui siaran pers yang ditandatangani oleh seluruh partisipan lokakarya.

Lokakarya

Lokakarya terbatas oleh Gugus Analisis dan AKATIGA ini sengaja mengundang partisipan dari kalangan aktivis Ornop anak, baik dari Ornop yang independen maupun non independen (berorientasi pada Ormas tertentu atau pemerintah). Sengaja

pula dalam lokakarya terbatas ini menghadirkan partisipan yang mempunyai pandangan berbeda, sehingga lokakarya dapat memunculkan pemikiran-pemikiran beragam untuk mencari model pemberdayaan yang lebih holistik pada dataran makro maupun mikro.

Berbagai pengalaman diungkapkan oleh partisipan, dari situ terlihat bahwa ada tiga bentuk gerakan Ornop dalam melakukan pemberdayaan anak. Tekanan ketiga kelompok itu adalah pada permasalahan anak di perkotaan, pertanian atau agroindustri dan aktivitas pendidikan. Kendati demikian warna kelompok target yang diberdayakan oleh Ornop terkonsentrasi pada dua kasus, yakni pemberdayaan buruh anak dan anak marjinal di perkotaan.

Keragaman latar belakang Ornop yang menjadi partisipan lokakarya, ternyata memberikan manfaat yang sangat besar dalam upaya mengapresiasi berbagai sudut pandang masalah anak. Yayasan Bintang Pancasila, LWR-DPP SPSI, YNDN, Muhammadiyah serta Yayasan Mitra Indonesia yang lebih sering bekerjasama dengan pemerintah, sangat berantusias untuk bersama-sama menjalin hubungan dengan Ornop lain. Demikian pula Ornop independen seperti Kompak, ISJ, Mitra Masyarakat Kota, Akatiga, Gugus Analisis, YPSM, Yayasan Pondok Kreatif Indonesia, dan juga Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, sangat berharap banyak dapat membuat perubahan secara bersama-sama di tingkat makro.

Meski sangat terbatas, secara umum aktivitas ini dianggap cukup memadai dalam mewakili keragaman latar belakang Ornop dan cakupan permasalahan yang diangkat. Harapan lokakarya untuk menghadirkan aktivis di tingkat akar rumput dan peneliti juga telah mencapai harapan, sehingga pembahasan agenda kerja diwarnai sisi pragmatis maupun filosofis. Apalagi partisipan lokakarya juga sangat mendukung upaya untuk mencari titik temu pemberdayaan di tingkat yang lebih luas.

Dengan demikian lokakarya tidak hanya sekedar pertukaran pengalaman saja, tetapi juga merupakan kesempatan pertama untuk menjalin mata-rantai pemberdayaan anak.

Agenda Lokakarya

Agenda pembahasan lokakarya terbagi dalam dua isu pokok yakni anak marjinal perkotaan dan buruh anak. Setiap partisipan yang telah menuliskan pengalamannya ke dalam sebuah kertas kerja, menguraikan tentang:

1. Persoalan anak dalam proses pembangunan di Indonesia.
2. Berbagai aspek permasalahan anak yang mengalami proses marginalisasi, penindasan dan diskriminasi.
3. Cara pendekatan aktivis/ORNOP dalam teknik pendekatan, metodologi dan strategi (definisi program).
4. Hasil-hasil kerja yang telah dicapai, kemudian bagaimana cara mencapai hasil tersebut dengan melihat:
 - Hambatan, masalah utama dan peluangnya
 - Ancamannya, kekuatannya dan kelemahannya.
5. Bagaimana aktivis/ORNOP merumuskan kegiatan advokasi masalah anak.
6. Bagaimana pandangan aktivis/ORNOP terhadap pemerintah, utamanya peran pemerintah, lembaga-lembaga internasional atau SPSI).
7. Beberapa usulan agenda advokasi yang perlu dilakukan untuk pemberdayaan dan perlindungan.

Pembahasan Substansi

Dari uraian yang disampaikan oleh partisipan selama diskusi berlangsung telah muncul pemikiran-pemikiran baru, utamanya dalam hal pemberdayaan dan perlindungan anak. Seiring dengan refleksi pengalaman tersebut, setidaknya sudah terfokus pada perlunya diambil langkah-langkah yang bersifat makro.

Dengan mengaitkan pada masalah-masalah yang setiap hari dihadapi, ternyata hampir semua partisipan menghadapi kebuntuan dalam menghadapi masalah di tingkat mikro. Partisipan pun memandang pengalaman-pengalaman yang telah disampaikan mempunyai benang merah dan kaitan masalah

yang jelas, baik pada anak marjinal perkotaan maupun buruh anak.

Anak Marjinal Perkotaan

Pengalaman pemberdayaan anak marjinal perkotaan dipaparkan oleh enam orang panelis selama dua sesi. Partisipan lokakarya yang menjadi panelis permasalahan anak marjinal perkotaan adalah Sarah Whitmore, Azas Tigor, Nusa Putra, Cecep Junaedi, Tata Sudrajat, dan M. Intan. Kedua sesi diskusi tersebut dipandu oleh Juni Thamrin dari Yayasan AKATIGA, Bandung.

Anak marjinal perkotaan cenderung dikatakan oleh para panelis sebagai anak jalanan, maksudnya adalah anak yang sehari-hari hidup, mencari nafkah dan segala aktivitas sehari-harinya berada di jalanan. Anak jalanan ini mengalami penindasan yang berlapis, yakni dari tingkat keluarga, lingkungan sehari-hari, intervensi pemerintah dan sebagainya. Fenomena ini makin diperburuk lagi dengan munculnya 'label' yang ditujukan kepada mereka, baik yang datang dari masyarakat, pakar maupun pemerintah. Dengan demikian anak jalanan makin tersudutkan oleh kepentingan yang datang dari sisi eksternal diri mereka.

Sedangkan dalam diri internal anak jalanan sendiri sebenarnya muncul suatu dinamika sendiri dalam kehidupannya, kondisi kehidupan jalanan — utamanya di kota besar — yang keras justru menjadi jalan keluar mereka. Anak jalanan menurut pengamatan partisipan justru memunculkan "seninya untuk hidup", mereka berhasil mengkombinasikan belajar, kerja, pertemanan dan hidup yang akhirnya menjadi satu kekuatan.

Dari kedua sesi diskusi pengalaman partisipan kelompok anak marjinal perkotaan, berhasil diangkat beberapa pokok permasalahan, yakni:

Penyebab dan Fenomena Anak di Jalanan

Pengalaman kasus yang diungkapkan selama dua sesi anak marjinal perkotaan mencuatkan penyebab anak-anak berada di

jalan. Secara jelas penyebab munculnya dan bertahannya keberadaan anak jalan antara lain:

- keluarga yang berantakan sehingga anak memilih hidup di jalan
- penyiksaan di dalam keluarga sehingga anak lari dari rumah
- tidak mempunyai keluarga (rumah, keluarga dsb.)
- pemaksaan orangtua terhadap anak untuk mencukupi ekonomi keluarga
- kemiskinan ekonomi, akses informasi dan sebagainya di dalam keluarga, sehingga mendorong anak untuk mandiri dengan hidup di jalan
- budaya yang menganggap anak harus mengabdikan pada orang tua.

Setelah berada di jalan anak-anak justru mengalami penindasan yang jauh di luar kemampuannya untuk melawan, seperti:

- masyarakat cenderung mengucilkan mereka
- pemerasan hasil kerja diikuti penyiksaan bila melakukan perlawanan
- 'pelabelan' yang tidak etis dari masyarakat, ilmuwan, pemerintah dan sebagainya
- kesalahan intervensi pemerintah dalam penanganan anak marjinal perkotaan (perangkat peraturan dan sebagainya)
- penyiksaan yang dilakukan oleh aparat, 'preman' atau 'jegger',
- pemerkosaan oleh orang yang lebih dewasa
- tidak jelasnya masa depan untuk hidup secara layak ketika dewasa
- dan segala bentuk penindasan lainnya.

Anak marjinal perkotaan berada di jalan mempunyai sebab-sebab yang beragam, namun setelah berada di jalan mengalami nasib yang sama. Bahkan dengan fenomena yang terjadi di jalan, penindasan yang terjadi pada anak marjinal perkotaan berlapis-lapis. Meski Ornop telah melakukan pemberdayaan, namun lapisan-lapisan seperti keluarga, pemerintah, masyarakat maupun sistem sangat sulit untuk ditembus.

Dengan penyebab dan fenomena ini anak marjinal perkotaan semakin ditempatkan pada posisi yang tidak manusiawi. Hingga akhirnya mereka memilih bertahan dengan menampilkan beberapa kreasi/seni bertahan hidup. Jika beruntung bisa selamat sampai menjelang remaja dan dewasa, kendati setelah remaja atau de-wasa jaminan kehidupan yang layak masih perlu dipertanyakan lagi.

Metodologi Pemberdayaan

Hampir seluruh partisipan yang melakukan pemberdayaan anak jalanan melakukan pola pendidikan luar sekolah, atau pendekatan lainnya yang memperhatikan latar belakang anak. Kendati ada perbedaan metodologi di antara Ornop, tetapi secara prinsip tujuannya adalah melindungi anak dari segala bentuk penindasan. Dalam lokakarya, segala metodologi pemberdayaan yang telah dipresentasikan, bertujuan sebagai media refleksi antarOrnop selama melakukan pemberdayaan anak marjinal perkotaan.

Program-program yang bersifat internal —langsung pada diri anak— dikembangkan oleh Ornop kepada anak marjinal perkotaan melalui program perlindungan legalitas, humanisasi, resosialisasi, pendidikan alternatif, bermain dan sebagainya. Tujuannya adalah antara lain:

- mengembalikan rasa percaya diri anak, rasa aman
- membuka wacana anak pada masalah yang selama ini menindas/mengeksploitasi,
- bertahan hidup,
- pembekalan diri untuk masa depan.

Program ini berbarengan dengan membuat arena bermain/belajar atau disebut “*open-house*” di dekat lokasi anak marjinal perkotaan/anak jalanan berada. “*Open-house*” ini ditujukan sebagai media interaksi terbuka antara anak dengan anak dan antara anak dengan pendampingnya. Namun beberapa Ornop mengungkapkan “*open-house*” terkadang harus bubar karena lokasi tergusur atau sebab-sebab lainnya.

Program yang bersifat eksternal atau di luar diri anak, dilakukan dengan berbagai pendekatan kepada pemuka masyarakat lokal, aparat pemerintah atau kepada penindasnya langsung (preman, orang tua yang mengeksploitasi). Pendekatan itu dilakukan dengan cara melibatkan mereka pada pendampingan anak, diseminasi kemampuan anak mengembangkan diri dalam rangka pengakuan keberadaan anak jalanan. Terkadang Ornop mencari keluarga angkat atau keluarga baru, memberikan beasiswa melalui kerjasama dengan bank.

Anak marjinal perkotaan yang mempunyai keluarga, utamanya anak dari keluarga 'bermasalah' seperti eksploitasi orang tua atau keluarga berantakan, sangat sulit mengembalikan anak ke keluarga atau ke rumah. Tidak jarang anak yang sudah dikembalikan ke orang tuanya justru kembali ke jalan, karena setelah kembali ke rumah atau ke keluarga tidak terjadi perubahan sikap.

Hanya sedikit Ornop yang melakukan pemberdayaan anak marjinal perkotaan melakukan upaya perubahan di tingkat makro. Selain kapasitas sumber daya Ornop masih belum mampu, juga tidak ada mekanisme yang jelas di antara Ornop-Ornop sendiri. Dengan kondisi ini Ornop dalam melakukan perubahan di tingkat makro berjalan sendiri-sendiri dan tidak mencapai hasil yang maksimal. Akibatnya Ornop terjebak pada kegiatan 'mengobati luka-luka' di tingkat lokal, sementara fenomena anak jalanan sudah mulai berkembang sejak tahun 1965.

Sementara itu pula sampai sekarang belum terjadi perubahan yang berarti di tingkat makro dalam rangka perlindungan hak anak marjinal perkotaan. Celaknya regulasi yang digulirkan pun semakin menyudutkan posisi anak yang bekerja di jalanan, sehingga tidak heran mereka selalu ditindas, dieksploitasi dan perlakukan asosial lainnya.

Analisis Pilihan Pemberdayaan

Beberapa alternatif pemberdayaan anak marjinal perkotaan mendapat tanggapan yang cukup hangat dari partisipan. Hal ini di-

dasarkan pada kesadaran partisipan bahwa media interaksi antar Ornop anak marjinal masih jarang dilakukan, akibatnya Ornop seringkali saling tuding atau saling mencurigai. Lokakarya ternyata membawa manfaat besar untuk menjalin saling pengertian dalam gerakan pemberdayaan anak marjinal perkotaan, sehingga partisipan mengharapkan lokakarya dapat menganalisa pilihan pemberdayaan di tingkat mikro maupun makro dan tindak lanjutnya secara bersama-sama. Apalagi dalam lokakarya ini timbul pula kesadaran bahwa Ornop cenderung berkuat pada kasus-kasus lokal dan tidak merubah kebijakan di tingkat makro.

Eksploitasi yang berlapis terhadap anak marjinal perkotaan — sistem, lingkungan, orang tua/keluarga, pemerintah, pakar dsb. — disadari partisipan sebagai inti dari masalah anak marjinal perkotaan. Dengan kondisi ini anak marjinal perkotaan sangat sulit untuk dihapuskan, karena mereka juga memiliki hak juga untuk menentukan pilihan. Alternatif yang dapat dilakukan oleh Ornop adalah melindungi anak dengan pemberdayaan dari penindasan, eksploitasi yang berlapis-lapis.

Langkah mendesak yang dilakukan oleh Ornop adalah pengakuan keberadaan anak marjinal perkotaan yang bekerja di jalanan, baik kepada pemerintah, masyarakat, peneliti dan sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan atas langkah pemerintah yang melakukan penghapusan anak marjinal perkotaan secara sistematis, sementara masih mencari definisi dan langkah-langkah pendekatan anak marjinal perkotaan.

Dalam diskusi ini, diharapkan Ornop dapat saling mendukung dan menunjang kegiatan Ornop lain yang melakukan pemberdayaan anak. Sekaligus dengan demikian mulai menghilangkan *label* yang dibuat oleh Ornop, masyarakat, pakar maupun pemerintah, karena pe-*'label'*-an — tunawisma, anti pancasila, tuna-karya, pro pemerintah — itu justru menghambat gerakan pemberdayaan anak marjinal perkotaan.

Alternatif pemberdayaan anak marjinal perkotaan pada tingkat lokal mungkin masih dapat di tanggulangi oleh Ornop, namun pada tingkat makro sudah saatnya dibuat mekanisme dan prog-

ram konkretnya. Aksi bersama mungkin bisa melalui diseminasi anak marjinal, atau penggugatan-penggugatan melalui institusi yang sudah ada, kemudian jika memungkinkan mulai mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan.

Dengan dua tingkatan alternatif pemberdayaan ini diperlukan pula suatu aksi bersama yang disesuaikan dengan kapasitas Ornop. Selain itu mekanisme yang terbangun juga harus ada pengakuan atas keberagaman metodologi, strategi dan sebagainya dalam pemberdayaan, namun dapat menuju pada pemberdayaan anak di semua tingkatan. Dengan munculnya kesepakatan demikian, partisipan lokakarya sepakat untuk segera menindaklanjuti dengan program konkret yang dapat dilakukan secara bersama-sama oleh semua Ornop yang menjadi partisipan.

Tercetus usulan untuk mendorong pemerintah membentuk komisi hak anak, mengingat pelanggaran hak anak meski kasuistik namun selalu terjadi dimana-mana. Peran Ornop dalam hal ini hanya mendorong terbentuknya komisi tersebut, diharapkan Ornop tidak terjebak untuk membentuk komisi hak anak tersebut. Komisi Hak Anak tersebut harus dibentuk pemerintah, mengingat perubahan yang diperlukan adalah perubahan yang fundamental dalam masalah anak-anak marjinal yang sangat kompleks. Ornop dalam hal ini selain sebagai pendorong juga dapat memboboti berbagai kalangan pemerintah yang berkepentingan agar ber-pihak pada anak dan si lemah. Cetusan usul ini akhirnya ditunda pembicaraannya pada saat sesi terakhir, yakni agenda kerja lokakarya.

Buruh Anak Penyebab dan Fenomena Anak Bekerja

Pengalaman pemberdayaan oleh partisipan dipaparkan dalam dua sesi berikutnya, setelah pemaparan pengalaman dari dua sesi anak marjinal perkotaan selesai. Dalam dua sesi diskusi yang di-pandu oleh Juni Thamrin ditampilkan delapan panelis, yakni Heru P, Wasis Sasmito, Rostymaline, Oktoviana, Anny, Sukman, Iin Chotimah dan pengalaman dari peneliti AKATIGA, Indrasari.

Diskusi dalam sesi pertama buruh anak adalah penyebab munculnya buruh anak di sektor formal dan informal. Kedelapan panelis mengungkapkan bahwa buruh anak bekerja di sektor formal dan informal didorong oleh:

- tekanan ekonomi keluarga
- dipaksa oleh orang tua
- diculik dan dipaksa bekerja oleh orang yang lebih dewasa
- anak ingin mencari uang sendiri
- asumsi bahwa dengan bekerja bisa digunakan sebagai sarana bermain
- pembenaran dari budaya bahwa sejak kecil anak harus bekerja.

Selain itu pemilik modal mempekerjakan anak karena didorong oleh faktor pengupahan — murah, mudah diatur dan tidak banyak tuntutan — kerja, sehingga pemilik modal lebih senang mempekerjakan anak.

Kondisi buruh anak di tempat bekerja ternyata jauh lebih memprihatinkan lagi, eksploitasi, penindasan telah dianggap hal yang wajar dan biasa. Beberapa kondisi yang memprihatinkan tersebut antara lain:

- anak dipekerjakan pada tempat yang berbahaya
- anak tak pernah menerima upah penuh dari hasil pekerjaannya
- pelecehan seksual oleh orang yang lebih dewasa
- sistem diskriminasi pengupahan yang tidak adil
- pemerintah dan pemilik modal mengaku tidak mempekerjakan anak, sehingga karena anak dianggap tidak ada maka pemilik modal dapat leluasa menindas dan menghisap tenaga anak.

Dari kondisi ini terungkap bahwa sebenarnya dalam permasalahan buruh anak, baik di sektor formal maupun informal sedang terjadi proses dehumanisasi. Buruh anak dikondisikan hidup di luar ukuran-ukuran manusia wajar, apalagi ukuran manusia normal.

Metodologi

Secara konstitusional buruh anak tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah, sehingga pemilik modal atau pemerintah tidak akan mengakui bila ada anak bekerja dan kemudian ditindas dan dieksploitasi. Sementara dalam kedua diskusi masalah buruh anak tersebut, panelis mengungkapkan kesulitannya dalam memberdayakan buruh anak. Akhirnya celah-celah pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh Ornop adalah dengan melakukan pendampingan dan pemberdayaan.

Pendampingan Ornop terhadap buruh anak biasanya dilakukan dengan membuat media interaksi seperti "*open-house*", dari tempat tersebut Ornop dengan metode pertemanan — anak dianggap setara dengan pendamping — melakukan pemberdayaan buruh anak. Seringkali Ornop melakukan kegiatan rekreasi bersama dengan buruh anak, sebagai media penyalur kebutuhan utama anak yang sehari-harinya telah dieksploitasi. Kegiatan pengembangan ketrampilan terhadap buruh anak juga dilakukan, namun kegiatan seperti tidak menarik dilakukan oleh buruh anak.

Selain pendampingan langsung, Ornop juga melakukan pengungkapan fakta-fakta eksploitasi buruh anak kepada pihak luar seperti pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya. Namun seringkali gerakan seperti ini seringkali justru memukul balik Ornop dan buruh anak, tidak adanya pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan buruh anak maka pemilik modal tidak segan-segan menekan kembali buruh anak. Sanksi pemecatan buruh anak atau hukuman tahanan bagi aktivis adalah risiko yang dihadapi buruh anak. Dengan kondisi ini maka Ornop dihadapkan pada pilihan yang sulit untuk mengangkat berbagai kasus yang dialami buruh anak.

Ada dua strategi pemberdayaan yang diungkap panelis dan menjadi bahan diskusi, yakni bekerjasama dengan pemerintah atau konfrontatif dengan pemerintah. Kedua pendekatan tersebut diakui sampai sekarang belum menghasilkan perubahan di tingkat makro, tetapi dari dua strategi pendekatan tersebut sama-sama mempunyai tujuan untuk memberdayakan buruh anak.

Tidak diakuinya keberadaan buruh anak oleh pemerintah maupun pemilik modal, telah makin meningkatkan proses dehumanisasi buruh anak. Buruh anak dalam proses dehumanisasi tersebut sedang mengalami proses pencerabutan nilai-nilai kemanusiaan, maka upaya yang mendesak juga dilakukan. Ornop adalah dengan melakukan usaha-usaha memerangi. Di sisi lain keberadaan buruh anak juga tidak dapat dihindari, sebagai akibat dari kemiskinan yang melanda keluarga buruh anak. Dengan kondisi ini maka Ornop dalam kegiatannya selain melakukan pemberdayaan terhadap buruh anak, juga dapat lebih bijaksana dalam memahami keberadaan buruh anak. Jadi usaha perlindungan buruh anak ini bila tidak hati-hati justru merugikan buruh anak sendiri, penghapusan buruh anak bisa jadi malah mematikan mata pencaharian buruh anak.

Analisis Pilihan Pemberdayaan

Dihapuskan atau tidak keberadaan buruh anak mengemuka kembali dalam dua sesi diskusi mengenai masalah buruh anak. Namun akhirnya partisipan sepakat untuk tidak menghapuskan keberadaan buruh anak, karena anak mempunyai hak untuk menentukan nasibnya. Perlindungan dan langkah pemberdayaan menjadi penting untuk dilakukan dalam memperjuangkan hak anak, utamanya agar buruh anak diakui keberadaannya. Selain itu keberadaan anak di tempat bekerja yang membahayakan keselamatan, antisipasinya adalah tidak mempekerjakan buruh anak di tempat berbahaya dan bahkan buruh dewasa sekalipun. Maka bila ditemukan kasus serupa, yakni buruh anak ditempatkan pada tempat yang berbahaya, menjadi tidak relevan bila kemudian keberadaan buruh anak kemudian harus dihapuskan.

Kesepakatan tersebut diambil dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah yang selalu menyangkal bahwa di Indonesia terdapat buruh anak. Sangkalan tersebut belakangan telah berdampak negatif pada nasib buruh anak, sehingga pengakuan menjadi penting agar buruh anak secara transparan dapat terlindungi. Selain itu argumentasi yang mengemuka adalah, anak-anak bekerja justru untuk keluar dari kemiskinannya. Bila

anak kemudian dilarang untuk bekerja, maka mereka malah tidak dapat melepaskan diri dari kemiskinan.

Terjadinya proses dehumanisasi buruh anak telah menjadi topik hangat yang dibicarakan dalam dua sesi diskusi buruh anak. Buruh anak pun dalam kondisi nyatanya telah mengalami dua kali tertindas, *pertama* dari eksploitasinya, dan *kedua*, dari sistem yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kaitan ini maka untuk menunjuk secara spesifik anak yang bekerja, maka dalam diskusi tersebut juga muncul kesepakatan untuk menggunakan kata “buruh anak”, ketimbang menggunakan “pekerja anak” yang tidak secara jelas menggambarkan penindasan dan penghisapan tenaga anak-anak.

Dengan kesepakatan itu pula maka secara tidak langsung pemberdayaan yang dilakukan dalam tingkat aksi adalah mengurangi atau meniadakan proses dehumanisasi. Pijakan yang digunakan dalam proses dehumanisasi dapat digunakan ukuran-ukuran minimal, yakni ukuran minimal atau standar-standar minimal manusia normal. Sedangkan saat ini buruh anak baik di sektor for-mal maupun di sektor informal sedang mengalami proses yang makin menjauhkan dari ukuran-ukuran standar hidup manusia biasa.

Selain itu lemahnya konstitusi/hukum adalah instrumen penting yang perlu pula diberdayakan, dengan kondisi ini hukum tidak melindungi buruh anak tetapi malah justru menjadi penindas buruh anak. Untuk itu langkah pemberdayaan anak perlu juga melihat aspek hukum ini, sehingga hukum yang telah dimanipulasikan kembali menjadi dasar pijakan untuk melindungi buruh anak. Rasa pesimisme terhadap pemberdayaan hukum juga tidak diabaikan, namun dalam perjuangan jangka panjang hukum bisa menjadi bahan pertimbangan.

Catatan Penutup

Dalam banyak kasus-kasus pemberdayaan buruh anak terungkap bahwa banyak sekali perlakuan buruk yang dialami oleh anak-anak ini di Indonesia. Apalagi kondisinya di Indonesia saat ini sangat tidak kondusif, karena berbagai alasan anak tidak diakui keberadaannya. Hal inilah yang kemudian akhirnya menyebabkan posisi buruh anak maupun anak marjinal di Indonesia mengalami proses dehumanisasi dan dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi.

Kasus-kasus yang diungkap oleh Institut Sosial Jakarta (ISJ), seperti anak-anak marjinal yang bekerja di jalanan, misalnya pedagang asongan, kaki lima, pengamen, calo, peminta-minta atau penyemir seringkali ditindas oleh petugas keamanan. Anak-anak telah menjadi objek kekerasan petugas Tibum (Ketertiban Umum) Pemda untuk disiksa, ditangkapi, dianiaya (disiram air panas, dilempari batu, disundut rokok, diperkosa melalui dubur, dipaksa bersenggama atau bertelanjang di depan umum). Demikian pula yang dialami para buruh anak yang diungkap Yayasan Pondok Kreatif, diketahui bahwa anak-anak yang bekerja sebagai buruh pabrik telah ditempatkan di ruangan panas, berdebu, kotor, dingin (bagian pengalengan), bising dan di bagian yang membutuhkan ketelitian mata. Kondisi-kondisi penindasan demikian telah membukakan mata kita bahwa sampai saat ini belum ada pengakuan atau perlindungan hak anak untuk bekerja secara aman dan sehat.

Dalam proses 'dehumanisasi' yang berlangsung terhadap buruh anak dan anak marjinal, ternyata dilakukan juga secara sistematis, sehingga tidak ada celah lagi buat Organisasi Non Pemerintah (Ornop) untuk melakukan pemberdayaan terhadap buruh anak dan anak marjinal lainnya. Menghadapi hal demikian, beberapa agenda kerja telah diluncurkan oleh Ornop untuk mencari celah pemberdayaan. Beberapa agenda yang telah diluncurkan antara lain sebagai berikut:

1. Mekanisme komunikasi antarOrnop di tingkat makro dan mikro
2. Agenda Pembentukan komisi nasional hak anak
3. Ukuran-ukuran dehumanisasi
4. Pemberdayaan buruh anak dan anak marjinal
5. Rencana Aksi Bersama.

Kelima agenda kerja tersebut dilatarbelakangi oleh masalah-masalah berdasarkan pengalaman di lapangan. Partisipan loka-karya mempunyai kebutuhan yang mendesak untuk segera melakukan kegiatan secara bersama, sehingga perubahan yang cukup fundamental dan cepat dalam pemberdayaan buruh anak dan anak marjinal dapat terjadi.

Selain kelima agenda di atas, ditambahkan pula beberapa agenda yang patut dibicarakan secara lebih mendalam lagi, yakni:

- advokasi "pendidikan penting"
- advokasi "*space*" untuk anak marjinal perkotaan
- pengiriman informasi mengenai pelanggaran hak anak
- format pengiriman informasi.

Agenda 1: Mekanisme Komunikasi AntarOrnop

Partisipan menganggap jaringan kerja antar Ornop sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera dilakukan, jaringan ini merupakan media untuk solidaritas dalam gerakan pemberdayaan. Dapat dilakukan secara formal maupun non formal, antarOrnop atau secara bersama-sama dengan beberapa Ornop. Jaringan ini tidak mutlak untuk dilembagakan, pertimbangannya adalah pada masalah efektifitas kerja dan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh Ornop.

Di tingkat makro jaringan yang bersifat memupuk solidaritas ini bisa dilakukan dengan membuat suatu agenda kegiatan tertentu, namun dengan mekanisme yang tidak mengikat. Selanjutnya Ornop dalam aktivitas di tingkat mikro dapat bekerjasama

dengan Ornop lainnya, kebijakan pemberdayaan pun disesuaikan dengan kebijakan lembaga masing-masing.

Agenda 2: Pembentukan Komisi Nasional Hak Anak

Pelanggaran hak anak yang terjadi sudah sangat mendesak untuk ditanggulangi bersama, tidak bisa lagi hanya mengandalkan Ornop yang prihatin masalah anak. Dalam lokakarya ini disepakati bahwa pembentukan “Komisi Nasional Hak Anak” akan diperjuangkan secara bersama-sama oleh Ornop yang menjadi partisipan lokakarya. Pembentukannya tidak dilakukan oleh Ornop, namun harus dilakukan oleh pemerintah yang sudah seharusnya tidak mengabaikan kepentingan hak anak dan utamanya buruh anak dan anak marjinal.

Agenda 3: Ukuran-ukuran Dehumanisasi

Pembahasan masalah dehumanisasi dianggap masih belum tuntas dibicarakan, utamanya mengenai ukuran-ukuran dehumanisasi masih perlu lebih dipertajam. Lokakarya sendiri tidak sampai menentukan ukuran-ukuran dehumanisasi, meski dalam keseharian pengalaman partisipan telah disadari proses dehumanisasi tengah berlangsung. Untuk itu ukuran-ukuran dehumanisasi masih perlu dibicarakan dan diperdalam lagi oleh partisipan setelah lokakarya untuk mempercepat langkah selanjutnya. Ornop dapat membentuk tim khusus yang merumuskan ukuran-ukuran dehumanisasi. Lokakarya kemudian mendelegasikan tim khusus tersebut kepada empat lembaga, yakni AKATIGA, ISJ, KOMPAK dan Gugus Analisis.

Langkah praktis yang dapat dilakukan oleh Ornop dalam mengidentifikasi dehumanisasi tersebut, bisa melalui opini umum dengan melihat pelaksanaan kebijakan pemerintah dan praktek-praktek yang dilakukan. Dengan melalui tahapan itu dalam

tingkat pemberdayaan dapat mulai dilakukan proses ‘penalaran’ untuk melakukan perubahan di tingkat makro dan mikro.

Agenda 4: Pemberdayaan Buruh Anak dan Anak Marjinal

Konsep dan metoda pemberdayaan di tingkat lokal disesuaikan dengan wilayah kerja masing-masing Ornop. Namun yang terpenting adalah konsep dan metoda tersebut sudah menyentuh ukuran-ukuran pemberdayaan. Pemberdayaan di tingkat lokal ini juga sudah harus dapat menunjang perubahan di tingkat makro, sehingga aktivitas di tingkat mikro berkaitan erat dengan kegiatan bersama di tingkat makro.

Sedangkan di tingkat makro, Ornop secara bersama-sama melakukan advokasi kebijakan pada tataran pemerintah dan internasional. Pertentangan sistem, perundang-undangan/peraturan perburuhan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata menjadi prioritas dalam langkah kegiatan pemberdayaan bersama antar Ornop. Termasuk juga di dalamnya antisipasi terhadap intervensi pemerintah yang dengan nama ‘pemberdayaan’, seringkali ber-benturan dengan keinginan anak dan hak anak untuk menentukan nasibnya.

Agenda 5: Rencana Aksi bersama

Selain beberapa agenda yang bersifat jangka panjang tersebut, partisipan menyepakati beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat. Aksi ini dipertimbangkan sebagai aksi yang realistis dari segi waktu, biaya dan mendesaknya kebutuhan di lapangan.

Lokakarya memandang perlu untuk tidak melupakan kegiatan diseminasi kepada kalangan yang lebih luas. Dengan diseminasi ini diharapkan buruh anak dan anak marjinal dapat diakui keberadaannya, sehingga kalangan yang lebih luas dapat ikut pula

memberikan perhatian yang akhirnya mendorong perubahan kebijakan di tingkat makro. Diseminasi ini bisa dilakukan secara bersama atau kerjasama antar lembaga dengan melakukan berbagai aksi yang dapat mendorong terjadinya perubahan kebijakan.